

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NOVEMBER 2018





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah November 2018" dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, November 2018
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Hamid Ponco Wibowo
Direktur Eksekutif

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	01

SUPLEMEN

SUPLEMEN I	39
Penyusunan <i>Roadmap</i> Upaya Penurunan Defisit	85
Neraca Transaksi Berjalan Di Jawa Tengah Dengan Pendekatan <i>Growth Strategy</i>	123

SUPLEMEN II

Analisis Indikator <i>Financial Imbalances</i> Jawa Tengah berdasarkan Regional <i>Financial Account and Balance Sheet</i> (RFABS) Triwulan II 2018	
---	--

SUPLEMEN III

Gambaran dan Potensi Industri Otomotif di Wilayah Soloraya	
--	--

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan III 2018	09
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	11
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	25
1.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2018	33
1.2.1 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan IV 2018 Sisi Pengeluaran	33
1.2.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan IV 2018 Sisi Lapangan Usaha	36

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum APBD 2018	47
2.2. Realisasi APBD Triwulan III 2018	47
2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan III 2018	48
2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan III 2018	49
2.3. APBN Provinsi Jawa Tengah 2018	51



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL NOVEMBER 2018

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Secara Umum	55
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok	56
3.2.1. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	57
3.2.2. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	58
3.2.3. Kelompok Sandang	59
3.2.4. Kelompok Bahan Makanan	59
3.3. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah	60
3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang	61
3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Tegal	62
3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	62
3.4. <i>Tracking</i> Inflasi	63
3.4.1. Inflasi Oktober 2018	63
3.4.2. Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2018	64
3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah	65

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah	69
4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan III	69
4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan III 2018	71
4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan III 2018	72
4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	76
4.2.1. Perkembangan Bank Umum	77
4.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah	81
4.4. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	83

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	93
5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	95
5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	97
5.4. Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	98



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL NOVEMBER 2018



BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Ketenagakerjaan	103
6.2. Pengangguran	106
6.3. Nilai Tukar Petani	107
6.4. Tingkat Kemiskinan	110
6.5. Pembangunan Manusia	111
6.6. Pemerataan Penduduk	113

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2019 dan Tahun 2019	117
7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	118
7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	119
7.1.3. Prospek Inflasi Triwulan I 2019 dan Keseluruhan Tahun 2019	121

Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	09	Grafik 1.18 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	17
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	09	Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	17
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	10	Grafik 1.20 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil <i>Liaison</i>)	17
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.21 <i>Likert Scale</i> Investasi (Hasil <i>Liaison</i>)	17
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan <i>Outflow</i> Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	18
Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	12	Grafik 1.23 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	19
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen	13	Grafik 1.24 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	19
Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	13	Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	19
Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	14	Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	19
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	14	Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	20
Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	14	Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	20
Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	14	Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	21
Grafik 1.13 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	15	Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	21
Grafik 1.14 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	15	Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	21
Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	16	Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah	22
Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	16	Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	22
Grafik 1.17 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	16	Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	22
		Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	22
		Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	23
		Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	23

Grafik



Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	24	Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar- Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	31
Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	24	Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, <i>Likert Scale</i>	31
Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	24	Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan	32
Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	25	Grafik 1.56 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	32
Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27	Grafik 1.57 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	32
Grafik 1.43 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	27	Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi	32
Grafik 1.44 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	27	Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan	32
Grafik 1.45 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	27	Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	33
Grafik 1.46 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	28	Grafik 1.61 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	33
Grafik 1.47 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	28	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2017 dan T.A. 2018	48
Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	28	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan III 2017 & 2018	48
Grafik 1.49 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	29	Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah	48
Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan	29	Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah	48
Grafik 1.51 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	30	Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah	49
Grafik 1.52 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% , YOY)	30	Grafik 2.6 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan III 2018	49
Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% , YOY)	30	Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan III 2018	50
		Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	55



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL NOVEMBER 2018

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah	55	Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi	70
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	55	Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan	70
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	55	Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	70
Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	58	Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah	71
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	58	Grafik 4.6 Perkembangan <i>Debt to Equity Ratio</i> Korporasi Jawa Tengah	71
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Sandang	59	Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah	72
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan	60	Grafik 4.8 Perkembangan <i>Current Ratio</i> Korporasi Jawa Tengah	72
Grafik 3.9 Inflasi Tahunan Triwulan III 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	60	Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	73
Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	61	Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	73
Grafik 3.11 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw III 2018	61	Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen	73
Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Kota Semarang Berdasarkan Kelompok	62	Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	74
Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Kota Tegal Berdasarkan Kelompok	62	Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	74
Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok	63	Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	74
Grafik 3.15 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen	65	Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	75
Grafik 3.16 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran	65	Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	75
Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian	70	Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	75

Grafik



Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	75	Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	79
Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	76	Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah	79
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa	76	Grafik 4.33 Perkembangan Nominal Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	80
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	76	Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	80
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah	76	Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Jawa Tengah	81
Grafik 4.23 Perkembangan Rasio <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah	77	Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah	81
Grafik 4.24 Perkembangan Rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Perbankan Jawa Tengah	77	Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah	81
Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah	77	Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah	82
Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah	77	Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah	82
Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah	78	Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah	82
Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	79	Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	82
Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	79	Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah	82
Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	79	Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah	83
		Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	83
		Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah	83
		Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah	83



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL NOVEMBER 2018

Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan	83	Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan	97
Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah	84	Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah	97
Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah	84	Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah	97
Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah	84	Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa	98
Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah	84	Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km ² Luas Wilayah	98
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah	93	Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	104
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE	93	Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan	107
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	94	Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang	107
Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	94	Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	108
Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	94	Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	109
Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	95	Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah	109
Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	95	Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	109
Grafik 5.8 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	96	Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	109
Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	96	Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (ribuan orang)	110
Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	97	Grafik 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional	112
Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	97	Grafik 6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	113
		Grafik 6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah	113
		Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2018-2019	122

Tabel



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)	10	Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan III 2017 dan 2018	52
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	11	Tabel 2.8 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan III 2017 dan 2018	52
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	11	Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	56
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% , YOY)	12	Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	56
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	25	Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah	56
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	26	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	57
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% , YOY)	26	Tabel 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	57
Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2018p (Rp Miliar)	47	Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	57
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan III Tahun 2017 & 2018	48	Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	73
Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan III 2017 dan 2018	50	Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	74
Tabel 2.4 Pagu APBN berdasarkan Kementerian/Lembaga Penerima Utama Tahun 2017 dan 2018	51	Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah	78
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi	51	Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai	79
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja	26	Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	81
		Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	103
		Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	104



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL NOVEMBER 2018

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2015 – Februari 2018 (juta orang)	105
Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	106
Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	106
Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	110
Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2018 (Rupiah)	111
Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers	112
Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen	112
Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	113
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	117
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	119

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR	2016	2017				2017	2018		
		I	II	III	IV		I	II	III
EKONOMI MAKRO REGIONAL *)									
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (% , YOY)	5,27	5,32	5,18	5,17	5,40	5,27	5,40	5,48	5,25
PERTUMBUHAN BERDASARKAN SEKTOR									
- PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,28	10,06	-3,49	-0,22	0,36	1,46	1,72	5,14	3,88
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	18,98	6,70	7,77	2,06	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17
- INDUSTRI PENGOLAHAN	4,10	3,74	5,04	4,25	4,34	4,35	4,85	4,39	3,98
- PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,57	4,05	5,52	7,61	3,81	5,22	4,11	5,36	6,36
- PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	2,17	7,19	6,10	6,91	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05
- KONSTRUKSI	6,52	5,55	7,08	7,44	8,33	7,13	6,56	6,07	7,83
- PERDAGANGAN BESAR-ECERAN DAN REPARASI MOBIL-SEPEDA MOTOR	5,61	5,40	8,07	7,18	3,84	6,10	4,81	4,53	5,25
- TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,91	6,24	8,44	6,18	4,46	6,30	5,47	9,21	7,08
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6,40	6,06	5,89	6,24	8,13	6,59	8,91	7,67	6,82
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8,31	7,08	13,15	13,80	18,81	13,27	15,86	11,83	11,56
- JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	9,11	4,71	7,37	5,72	3,78	5,38	6,80	3,61	2,34
- REAL ESTATE	6,80	7,22	6,77	6,27	5,76	6,49	5,51	5,09	4,67
- JASA PERUSAHAAN	10,62	8,08	10,03	5,51	11,23	8,72	9,88	11,04	9,48
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	2,37	-0,83	-0,10	3,65	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62
- JASA PENDIDIKAN	7,64	1,83	8,01	9,80	8,93	7,15	7,29	5,83	7,79
- JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,86	4,68	9,84	9,83	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84
- JASA LAINNYA	8,62	6,25	9,92	9,88	9,85	8,99	9,22	9,93	8,92
PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN									
- KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,56	4,65	4,89	4,32	4,65	4,63	4,67	5,15	4,30
- KONSUMSI LNPRT	5,61	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20
- KONSUMSI PEMERINTAH	-0,59	2,22	-4,97	6,64	5,81	2,93	5,26	2,48	2,38
- PMTB	5,99	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,37	8,94	10,15
- EKSPOR LUAR NEGERI	-2,25	8,30	-1,71	33,93	13,22	12,55	12,33	15,71	16,26
- IMPOR LUAR NEGERI	-9,05	16,19	-11,75	12,81	25,07	9,98	18,36	45,54	47,74
- NET EKSPOR ANTARDAERAH	-3,35	20,88	-12,05	-13,55	115,20	2,04	14,07	45,04	39,71
- PERUBAHAN INVENTORI	9,85	29,98	2,68	-63,16	-35,01	6,75	28,80	19,49	244,93
EKSPOR									
- NILAI EKSPOR NON MIGAS (USD JUTA)	6.253	1.717	1.673	1.889	1.908	7.186	1.975	1.903	2.153
- VOLUME EKSPOR NON MIGAS (RIBU DN)	2.989	685	699	773	748	2.906	714	710	793
IMPOR									
- NILAI IMPOR NON MIGAS (USD JUTA)	5.411	1.500	1.572	1.659	2.158	6.889	2.022	2.311	2.585
- VOLUME IMPOR NON MIGAS (RIBU DN)	4.278	1.153	1.310	1.169	1.371	5.003	1.179	1.242	1.443
INDEKS HARGA KONSUMEN									
PROVINSI JAWA TENGAH	124,71	126,65	128,35	128,12	129,34	129,34	130,94	131,85	131,69
KOTA PURWOKERTO	123,23	125,22	127,23	126,71	128,05	128,05	129,19	130,53	130,30
KOTA SURAKARTA	122,41	124,24	125,88	124,64	126,21	126,21	127,76	128,86	127,98
KOTA SEMARANG	124,59	126,35	127,85	128,07	129,13	129,13	130,71	131,45	131,57
KOTA TEGAL	122,49	123,94	126,23	126,19	127,43	127,43	128,62	130,17	129,95
KOTA KUDUS	131,20	134,15	136,05	135,51	136,67	136,67	138,90	139,55	139,44
KOTA CILACAP	127,81	130,59	132,67	132,12	133,45	133,45	135,58	136,35	136,12
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , YOY)									
PROVINSI JAWA TENGAH	2,36	3,30	4,61	3,58	3,71	3,71	3,39	2,72	2,79
KOTA PURWOKERTO	2,42	3,22	4,84	4,02	3,91	3,91	3,17	2,59	2,83
KOTA SURAKARTA	2,15	2,83	4,11	2,64	3,10	3,10	2,83	2,37	2,68
KOTA SEMARANG	2,32	3,27	4,44	3,62	3,64	3,64	3,45	2,82	2,74
KOTA TEGAL	2,71	3,17	4,71	3,51	4,03	4,03	3,78	3,12	2,98
KOTA KUDUS	2,32	3,86	5,56	4,48	4,17	4,17	3,54	2,57	2,90
KOTA CILACAP	2,77	4,21	5,47	4,06	4,41	4,41	3,82	2,77	3,03

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2016	2017				2017	2018		
		I	II	III	IV		I	II	III
PERBANKAN **)									
DANA PIHAK KETIGA (RP TRILIUN)	240,40	245,78	252,59	257,35	262,97	262,97	270,39	279,53	282,04
- GIRO	30,25	35,81	35,91	35,65	32,77	32,77	39,99	40,68	39,06
- TABUNGAN	123,34	119,59	125,19	128,37	138,37	138,37	135,66	142,07	144,28
- DEPOSITO	86,81	90,38	91,49	93,33	91,83	91,83	94,74	96,78	98,70
KREDIT (RP TRILIUN)	236,76	237,77	247,13	250,76	258,42	258,42	260,10	268,37	272,37
- MODAL KERJA	125,63	125,47	132,20	134,51	138,34	138,34	138,00	145,53	149,63
- KONSUMSI	39,82	40,23	40,71	40,93	41,83	41,83	42,50	43,31	41,60
- INVESTASI	71,30	72,08	74,21	75,33	78,26	78,26	79,59	79,53	81,14
LOAN TO DEPOSIT RATIO (%)	98,49	96,74	97,82	97,44	98,27	98,27	96,19	96,01	96,57
NPL GROSS (%)	2,84	3,06	3,23	3,00	2,22	2,22	2,43	2,43	2,59

**Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2016	2017				2017	2018		
		I	II	III	IV		I	II	III
SISTEM PEMBAYARAN									
TRANSAKSI KLIRING									
- RATA-RATA HARIAN NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)	855	770	707	681	679	709	653	714	702
- RATA-RATA HARIAN VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR)	19.035	18.555	18.814	17.340	17.732	18.110	17.035	18.382	17.601
TRANSAKSI KAS (RP TRILIUN)									
-INFLOW	72,49	18,38	13,91	29,38	14,71	76,39	20,97	24,38	24,77
-OUTFLOW	52,98	10,12	24,32	9,92	15,98	60,34	11,34	29,85	11,41





RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan III 2018, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,25% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 5,48% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,17% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa sebesar 5,74% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, melambatnya perekonomian Jawa Tengah pada periode laporan terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Hal tersebut seiring dengan normalisasi pengeluaran rumah tangga pasca mencapai puncak pada periode Ramadan dan Idul Fitri di triwulan II 2018. Sementara itu, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR) masih tumbuh meningkat dibanding triwulan II 2018 sejalan dengan dimulainya aktivitas persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Di sisi lain, impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB justru kembali mencatatkan peningkatan di tengah terbatasnya perbaikan ekspor luar negeri, sehingga turut menahan laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, investasi yang merupakan komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua mencatatkan akserelasi yang cukup signifikan, didorong oleh berlanjutnya investasi nonbangunan, sehingga dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah disebabkan oleh melemahnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mencatatkan perlambatan, yang salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi industri pengilangan migas pasca normalisasi permintaan BBM setelah lebaran. Lapangan usaha pertanian terpantau tumbuh melambat, disebabkan oleh turunnya tingkat produksi padi pasca panen raya yang terjadi di triwulan II. Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan mengalami perbaikan, yang didorong oleh akselerasi perdagangan mobil dan sepeda motor.

Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan APBD pada triwulan laporan meningkat dibandingkan triwulan lalu, dan secara kumulatif mencapai 76,93%; utamanya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan kontribusi PAD meningkatkan Derajat Otonomi Fiskal menjadi 53,17%. Di sisi lain, serapan belanja APBD juga meningkat, dengan kumulatif realisasi sebesar 64,86% disumbang oleh realisasi belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Hal ini diantaranya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. Secara keseluruhan, pada triwulan laporan, postur APBD Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp 3,33 triliun.

Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah yaitu pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Kumulatif hingga triwulan III 2018, realisasi APBN mencapai 60,8% dari pagu. Realisasi terutama ditujukan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan penyaluran Dana Desa, sesuai dengan target penyaluran dana desa tahap I sebesar 60%, paling lambat di bulan Juli 2018.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan III 2018 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018.

Berdasarkan disagregasi kelompoknya, penurunan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh perlambatan inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga serta kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Normalisasi permintaan mobilisasi masyarakat pasca hari raya keagamaan serta peningkatan harga yang terjaga moderat pada biaya pendidikan menjadi penyebab utama penurunan inflasi tahunan pada triwulan III 2018.

Pada triwulan IV 2018, tekanan inflasi tahunan diperkirakan meningkat seiring dengan berkurangnya pasokan produksi komoditas hortikultura serta peningkatan konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun. Namun demikian peningkatan inflasi tersebut diperkirakan masih akan terjaga di rentang bawah target sasaran inflasi nasional sebesar $3,5 \pm 1\%$.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Di tengah kinerja perekonomian yang tumbuh melambat, penyaluran kredit masih menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Pada sektor RT, kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman. Pada sektor korporasi, normalisasi permintaan pasca HBKN dan pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang menahan kinerja penjualan dan profitabilitas, namun likuiditas korporasi masih terjaga.

Terkait upaya pengembangan dan akses keuangan, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Pada triwulan laporan, pangsa kredit UMKM mencapai 40,41% dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan indikator sistem pembayaran tunai dan non tunai di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 menunjukkan kinerja perekonomian daerah yang membaik, secara triwulanan maupun tahunan.

Pertumbuhan nilai transaksi melalui SKNBI mengalami perbaikan 10,92% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan tahunan yang mengalami kontraksi sebesar 3,21% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp13,36 triliun seiring dengan kembali masuknya aliran uang ke BI akibat normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Idul Fitri.

Penerapan elektronifikasi pembayaran jalan tol dan penyaluran bantuan sosial non tunai dapat terselenggara dengan baik. Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 98%. Mulai akhir triwulan III 2018 akan dilakukan perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan III 2018 relatif membaik, tercermin dari berkurangnya persentase kemiskinan dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2018 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan.

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja. Sedangkan angka pengangguran sedikit menurun pada Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan II 2018 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan tren yang sama dengan tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan NTP, sebagai dampak pemulihan produktivitas tanaman

pertanian dan hortikultura di Jawa Tengah setelah mengalami gangguan akibat fenomena El Nino di tahun 2016.

Indeks Pembangunan Manusia relatif meningkat, yang diindikasikan perbaikan di aspek pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2018 sedikit meningkat dibandingkan Maret 2017. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah menempati urutan pertama terendah.

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2019 diperkirakan masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perbaikan bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan masih tertahan di awal tahun, di tengah berlanjutnya penguatan impor luar negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diprediksi tumbuh melambat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3%-5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang diperkirakan 5,2%-5,6%. Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap

meningkatnya permintaan domestik. Optimisme tersebut ditopang oleh prospek belanja pemilu, terjaganya daya beli, serta dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Sementara itu, pendapatan ekspor diperkirakan lebih terbatas, yang disebabkan oleh meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh melandai dan tidak merata, serta risiko meningkatnya ketegangan hubungan perdagangan antarnegara akan berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dunia, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2019. Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri pengolahan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2019 diperkirakan mengalami penurunan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong penurunan laju inflasi terutama berasal dari kelompok Bahan Makanan serta kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu $3,5 \pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian

inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2018.





PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan III 2018 tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan triwulan laporan didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan normalisasi permintaan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Kembali menguatnya impor luar negeri di tengah terbatasnya perbaikan ekspor luar negeri juga menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan. Namun demikian, akselerasi investasi yang didorong oleh berlanjutnya investasi nonbangunan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam.
- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan mencatatkan perlambatan, sedangkan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perbaikan dibandingkan triwulan II 2018.



1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN III 2018¹

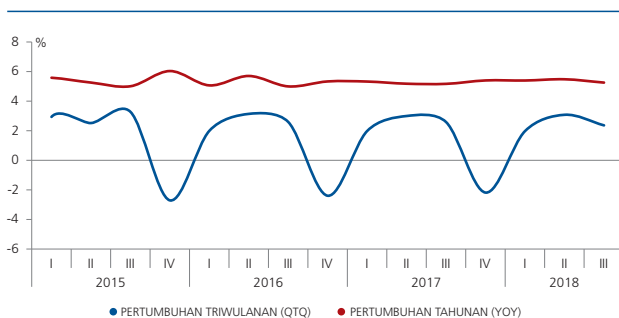
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 5,25% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 5,48% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,17% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa sebesar 5,74% (yoy). Lebih lanjut, secara triwulanan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh 2,36% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 2,58% (qtq).

Perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah berbeda arah dengan perekonomian kawasan Jawa yang tercatat mengalami perbaikan. Pada triwulan III 2018, tiga provinsi di kawasan Jawa mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan sebelumnya, yaitu DKI Jakarta (6,41%), Banten (5,89%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (6,03%). Sementara tiga provinsi lainnya mencatatkan perlambatan pertumbuhan, termasuk di antaranya adalah Jawa Tengah. Provinsi lain yang juga mencatatkan deselerasi pertumbuhan pada periode

laporan yaitu provinsi Jawa Barat (5,58%) dan Jawa Timur (5,40%).

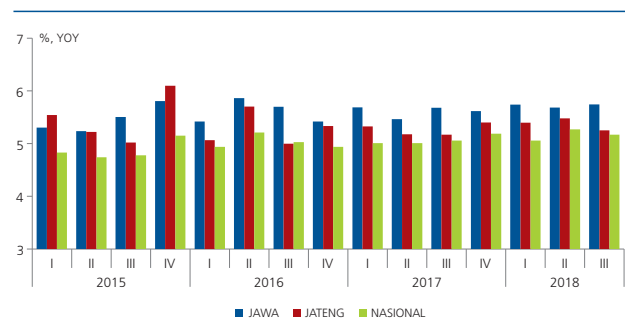
Pada triwulan III 2018, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,65% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,60% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan besar sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa sarana pendukungnya, seperti aktivitas sistem pembayaran. Seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, kebutuhan akan uang kartal untuk kegiatan ekonomi di Jawa Tengah turut mengalami perlambatan. Hal tersebut tercermin dari aliran keluar (*outflow*) uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Tengah yang tumbuh 14,95% (yoy) pada triwulan laporan, lebih



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

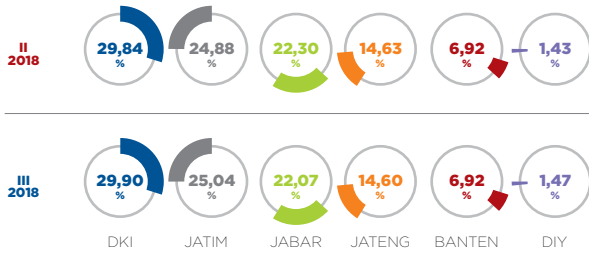
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

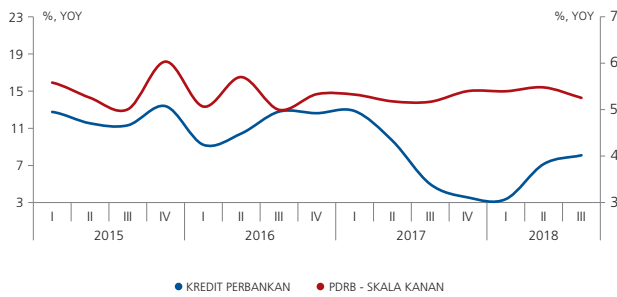
Sumber: BPS, diolah

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan III 2018 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2018, 2017, dan 2016 masih bersifat sementara.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

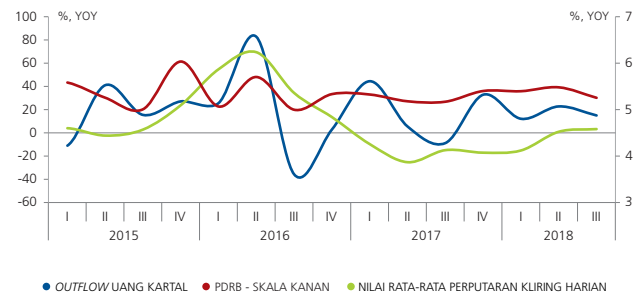
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

rendah dari pertumbuhan triwulan II 2018 (22,74%; yoy). Aliran masuk (*inflow*) uang kartal juga tercatat kontraksi 15,67% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 75,28% (yoy). Hal ini mengindikasikan aliran masuk uang masyarakat ke perbankan dari hasil produksi menurun seiring dengan melemahnya kegiatan perekonomian di Jawa Tengah, sebagai contoh di sektor pertanian mengingat Jawa Tengah merupakan daerah sentra produksi pertanian. Meskipun aktivitas ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 mengalami perlambatan, kebutuhan akan pembiayaan masih terpantau meningkat. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh lebih tinggi pada periode tersebut. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa Tengah tercatat 8,09% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,14% (yoy)².

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)

PROVINSI	TW II 2018	TW III 2018
DKI JAKARTA	5,94	6,41
BANTEN	5,54	5,89
JABAR	5,65	5,58
JATENG	5,48	5,25
DIY	5,92	6,03
JATIM	5,59	5,40
JAWA	5,68	5,74

Sumber: BPS, diolah



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 terutama disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor antardaerah. Sementara itu, sebagai elemen pengurang, impor luar negeri kembali tumbuh lebih tinggi dan menjadi penahan laju perekonomian triwulan laporan untuk tumbuh lebih tinggi. Lebih lanjut, dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan pada periode laporan dialami oleh dua lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor tercatat tumbuh lebih cepat.

2. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2018 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 59,35%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar 32,76%. Lebih lanjut, pangsa ekspor luar negeri sebesar 10,42%, net ekspor antardaerah sebesar 8,45%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,16%. Pangsa impor luar negeri, sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga berkontribusi cukup besar, yaitu 21,99%. Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian peningkatan impor luar negeri perlu diwaspadai mengingat pangsa komponen tersebut pada periode laporan lebih tinggi dibanding rata-rata periode yang sama dalam tiga tahun terakhir (14,88%).

Melambatnya perekonomian Jawa Tengah pada periode laporan terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR) masih tumbuh meningkat dibanding triwulan II 2018. Di sisi lain, impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB justru kembali mencatatkan peningkatan di tengah terbatasnya perbaikan ekspor luar negeri, sehingga turut menahan laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, investasi yang merupakan komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua mencatatkan akserelasi yang cukup signifikan, didorong oleh berlanjutnya investasi nonbangunan, sehingga dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2014	2015	2016*	2017**				2017**	2018**		
				I	II	III	IV		I	II	III
KONSUMSI RUMAH TANGGA	570.433	620.264	666.628	174.589	179.274	182.779	184.064	720.706	188.148	193.115	197.005
KONSUMSI LNPR	10.773	11.439	12.257	3.201	3.329	3.284	3.378	13.193	3.443	3.630	3.651
KONSUMSI PEMERINTAH	75.556	85.226	87.964	14.017	20.244	22.658	36.796	93.714	15.302	21.532	23.773
INVESTASI	274.558	308.702	333.977	84.796	89.288	94.089	98.594	366.766	93.337	101.167	108.746
EKSPOR LUAR NEGERI	84.542	92.813	94.566	26.273	25.355	28.727	29.538	109.893	30.427	30.244	34.604
IMPOR LUAR NEGERI	220.421	188.360	153.817	42.374	38.786	42.872	54.864	178.897	54.139	62.712	72.993
NET EKSPOR ANTARDAERAH	99.974	66.634	43.313	17.593	11.024	16.008	5.371	49.996	24.950	26.435	28.039
PERUBAHAN INVENTORI	27.054	14.269	8.233	6.356	5.229	1.458	(1.368)	11.676	8.433	7.472	9.131
P D R B	922.471	1.010.987	1.093.121	284.451	294.958	306.131	301.509	1.187.049	309.901	320.883	331.955

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: SBR Provinsi Jawa Tengah dan data diolah
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2014	2015	2016*	2017**				2017**	2018**		
				I	II	III	IV		I	II	III
KONSUMSI RUMAH TANGGA	465.234	485.947	508.108	129.872	132.228	134.661	134.853	531.614	135.941	139.037	140.445
KONSUMSI LNPR	8.299	8.047	8.499	2.177	2.242	2.200	2.257	8.875	2.278	2.392	2.402
KONSUMSI PEMERINTAH	56.643	58.118	57.772	9.286	12.753	14.196	23.231	59.467	9.775	13.070	14.534
INVESTASI	220.773	232.335	246.247	61.805	64.784	67.888	70.240	264.716	65.744	70.573	74.780
EKSPOR LUAR NEGERI	68.523	68.717	67.169	18.362	17.552	19.715	19.968	75.597	20.627	20.309	22.921
IMPOR LUAR NEGERI	118.498	99.894	90.856	24.166	22.086	24.345	29.327	99.925	28.604	32.145	35.968
NET EKSPOR ANTARDAERAH	47.723	48.419	46.798	16.154	13.148	14.322	4.129	47.753	18.427	19.070	20.010
PERUBAHAN INVENTORI	16.261	5.076	5.576	3.513	2.883	636	(1.080)	5.953	4.525	3.446	2.195
P D R B	764.959	806.765	849.313	217.003	223.504	229.274	224.270	894.050	228.712	235.752	241.320

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% , YOY)

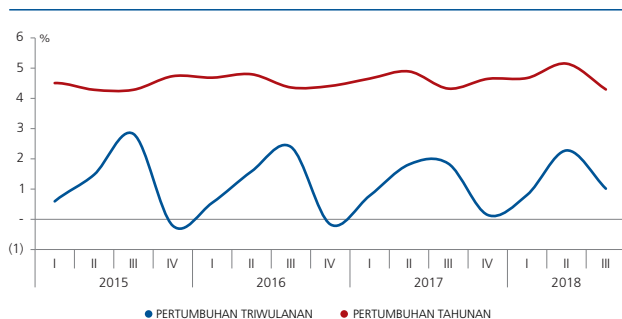
KOMPONEN PENGELUARAN	2014	2015	2016*	2017**				2017**	2018**		
				I	II	III	IV		I	II	III
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,31	4,45	4,56	4,65	4,89	4,32	4,65	4,63	4,67	5,15	4,30
KONSUMSI LNPRT	8,62	(3,04)	5,61	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20
KONSUMSI PEMERINTAH	2,19	2,60	(0,59)	2,22	(4,97)	6,64	5,81	2,93	5,26	2,48	2,38
INVESTASI	4,52	5,24	5,99	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,37	8,94	10,15
EKSPOR LUAR NEGERI	10,66	0,28	(2,25)	8,30	(1,71)	33,93	13,22	12,55	12,33	15,71	16,26
IMPOR LUAR NEGERI	(7,29)	(15,70)	(9,05)	16,19	(11,75)	12,81	25,07	9,98	18,36	45,54	47,74
NET EKSPOR ANTARDAERAH	(6,80)	1,46	(3,35)	20,88	(12,05)	(13,55)	115,20	2,04	14,07	45,04	39,71
PERUBAHAN INVENTORI	(22,63)	(68,78)	9,85	29,98	2,68	(63,16)	(35,01)	6,75	28,80	19,49	244,93
P D R B	5,27	5,47	5,27	5,32	5,18	5,17	5,40	5,27	5,40	5,48	5,25

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masih mencatatkan pertumbuhan positif walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan komponen konsumsi swasta lainnya yaitu lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mengalami perbaikan dibanding triwulan II 2018.

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh **4,30% (yoy)** pada triwulan III 2018, melambat dibandingkan triwulan II 2018 yang sebesar **5,15% (yoy)**. Secara triwulanan, konsumsi rumah tangga triwulan laporan tumbuh 1,01% (qtq), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 1,84% (qtq).

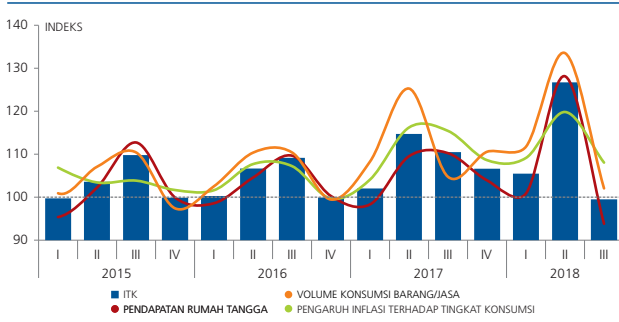


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga terjadi seiring dengan pola normalisasi setelah di triwulan II pola konsumsi dan permintaan masyarakat mengalami peningkatan pada bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Lebih lagi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan utama pemudik dari provinsi lain, sehingga konsumsi masyarakat di triwulan sebelumnya naik signifikan, ditambah faktor libur Lebaran yang lebih panjang. Lebih lanjut, pergeseran arus balik Lebaran yang pada tahun 2017 sebagian masih berlangsung di triwulan III, pada tahun ini bergeser menjadi berlangsung penuh di triwulan II 2018 sehingga turut memengaruhi perlambatan konsumsi masyarakat triwulan laporan.

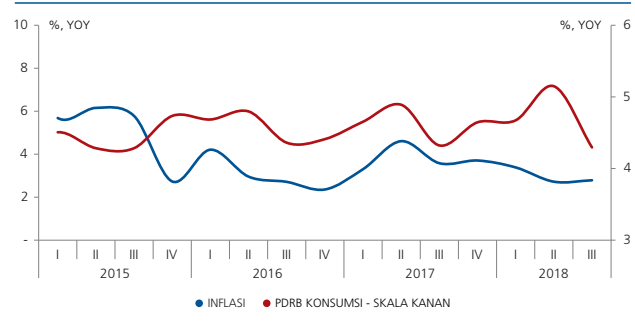
Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa berdasarkan jenis konsumsinya, hampir seluruh komponen konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari triwulan II 2018, kecuali komponen pengeluaran pendidikan dan rekreasi budaya yang masih tercatat meningkat seiring dengan kegiatan tahun ajaran baru pada awal triwulan III. Pangsa konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai 60% dari total PDRB menyebabkan deselerasi kinerja konsumsi rumah tangga berpengaruh besar terhadap tertahannya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.



Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen

Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei tersebut, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga triwulan laporan melemah. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan III 2018 yang sebesar 99,51; lebih rendah dari ITK triwulan II 2018 sebesar 126,73. Melemahnya optimisme terhadap kondisi ekonomi rumah tangga ini terutama bersumber dari penurunan pendapatan rumah tangga, yang tercermin dari indeks 93,82. Penurunan pendapatan pada periode laporan tidak terlepas dari pengaruh musiman berupa perayaan Idul Fitri di triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2018, rumah tangga mendapatkan tambahan pendapatan karena memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) maupun peningkatan keuntungan usaha seiring meningkatnya volume penjualan/produksi sektor riil.

Lebih lanjut, volume konsumsi barang dan jasa yang dilakukan rumah tangga masih terpantau meningkat, tercermin dari besaran indeks yang di atas angka 100 yaitu sebesar 102,05. Peningkatan paling tinggi terjadi pada konsumsi pendidikan, yang ditunjukkan dengan indeks 124,45. Sementara itu, beberapa barang dan jasa mengalami penurunan volume konsumsi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu konsumsi pakaian, akomodasi, dan rekreasi dengan nilai indeks masing-masing sebesar 81,84; 94,73; dan 99,89.

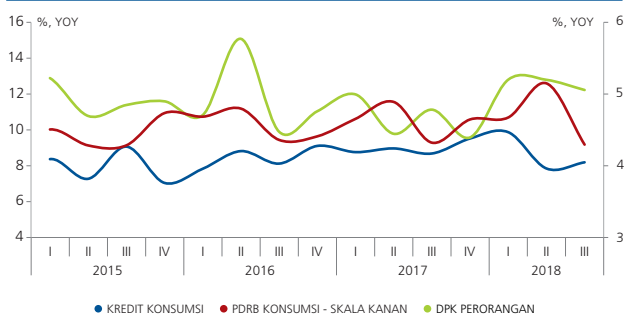


Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Hal tersebut mengkonfirmasi adanya konsolidasi belanja masyarakat selepas berakhirnya momen Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan II.

Lebih lanjut, kegiatan konsumsi yang melambat juga tercermin dari konsumsi listrik kelompok rumah tangga yang tumbuh 0,57% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan II 2018 (5,02%; yoy) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya (0,95%; yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit konsumsi masih mencatatkan peningkatan pada triwulan laporan. Penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan tumbuh 8,19% (yoy); sedikit membaik dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,85% (yoy). Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh meningkat dari 8,01% (yoy) menjadi 10,36% (yoy). Pertumbuhan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) juga terpantau naik, yaitu dari 10,12% (yoy) menjadi 11,98% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode laporan terjadi pada penyaluran kredit pembelian peralatan rumah tangga dan kredit multiguna lainnya.

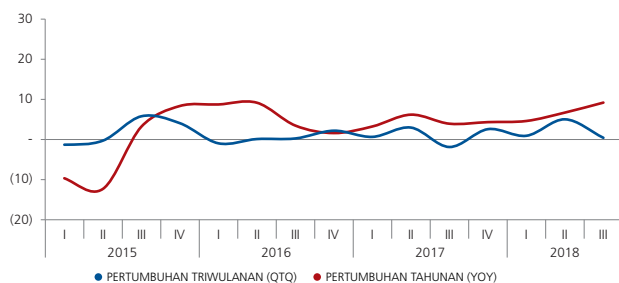
Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) pada triwulan III 2018 tumbuh 9,20% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2018 yang tercatat 6,71% (yoy). Meskipun pada triwulan laporan terjadi penurunan kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

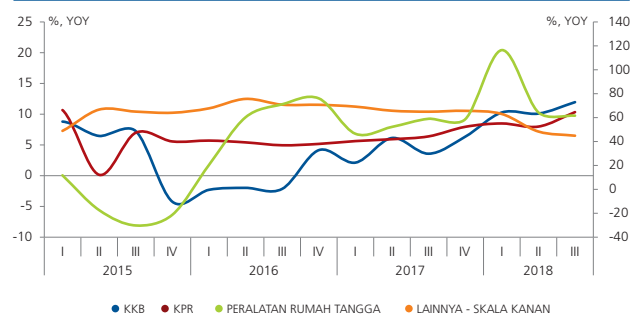
Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

seiring berakhirnya masa Ramadan dan Idul Fitri, kegiatan organisasi masyarakat atau partai politik dalam rangka persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang mulai meningkat menjadi pendorong pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT. Pada triwulan III 2018, tengah berlangsung tahapan Pemilu yaitu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden hingga 21 September 2018, sehingga kegiatan tersebut diyakini mendorong dinamika kegiatan ormas dan partai politik di periode laporan. Meskipun mengalami akselerasi, komponen ini hanya menyumbang 1,10% dari total perekonomian Jawa Tengah, sehingga akselerasi pertumbuhan komponen ini tidak memberikan dampak signifikan secara langsung. Namun demikian, perbaikan kinerja komponen ini dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

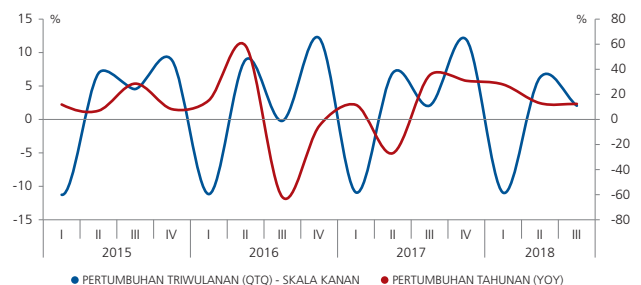
Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT



Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

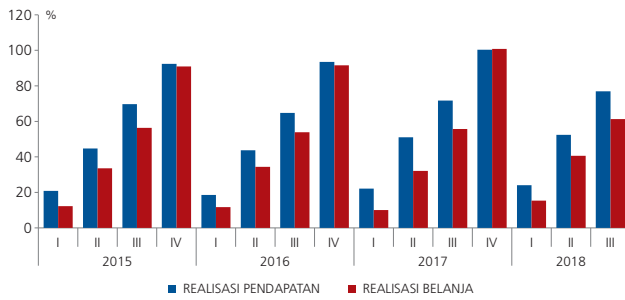
Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2018. Konsumsi pemerintah tumbuh 2,38% (yoy); sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,48% (yoy). Secara triwulanan, komponen pengeluaran ini tercatat tumbuh 11,20% (qtq) pada triwulan laporan, juga lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,31% (qtq).

Berdasarkan hasil FGD, perlambatan terutama disebabkan oleh realisasi APBD Kabupaten/Kota yang belum optimal. Dilihat dari komponen belanja pada APBD Pemerintah Provinsi, penurunan realisasi anggaran terjadi pada belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Lebih lanjut, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang belum maksimal disebabkan oleh masih rendahnya penyerapan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dibanding triwulan III 2017. Penyerapan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

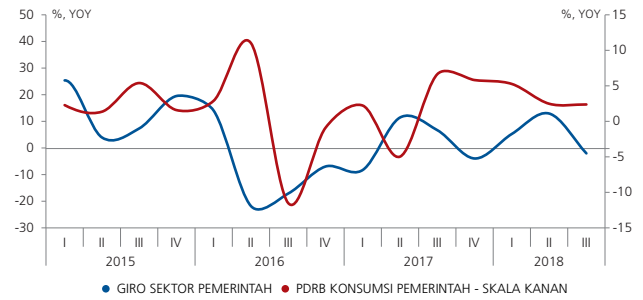


Grafik 1.13 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

sampai dengan triwulan III 2018 terpantau sebesar 65% dan 89% dari alokasi anggaran, lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu mencapai 70% dan 100%. Sampai dengan triwulan laporan, realisasi penyaluran dana desa di Jawa Tengah baru sebesar Rp4,39 triliun, dari alokasi anggaran sebesar Rp6,74 triliun. Kendala yang dihadapi dalam penyerapan dana desa adalah perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program padat karya tunai di desa yang mewajibkan 30% dana desa digunakan untuk upah tenaga kerja. Perubahan kebijakan tersebut juga menyebabkan perlunya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai syarat penyaluran dana desa.

Pertumbuhan tahunan konsumsi pemerintah yang melambat pada periode ini juga tidak terlepas dari faktor *base-year effect* dimana pertumbuhan konsumsi pemerintah di periode yang sama tahun 2017 tercatat cukup tinggi sebesar 6,64% (yoy). Pada triwulan laporan, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat 61,26% dari total anggaran belanja, lebih tinggi dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 55,67%; seiring dengan realisasi pendapatan yang mengalami perbaikan. Sementara itu, simpanan giro pemerintah yang terdapat pada perbankan di Jawa Tengah terpantau mengalami penurunan, yaitu tumbuh negatif 2,03% (yoy), dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,94% (yoy).



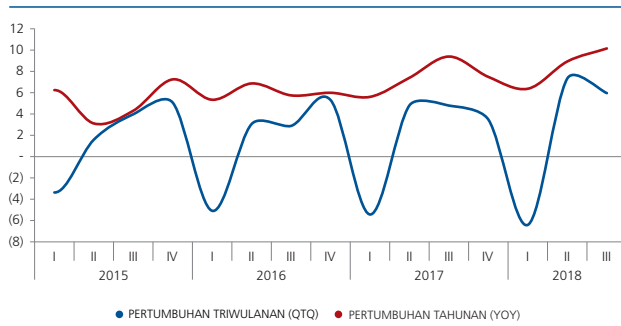
Grafik 1.14 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Faktor yang menahan perlambatan konsumsi pemerintah lebih dalam yaitu pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial seiring dengan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Seperti halnya konsumsi LNPR, sumbangan konsumsi pemerintah tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun komponen pengeluaran ini memberikan dampak secara tidak langsung yang dapat memicu pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah, dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah. Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli masyarakat yang terlibat sehingga berpotensi mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga.

1.1.1.2 Pengeluaran Investasi

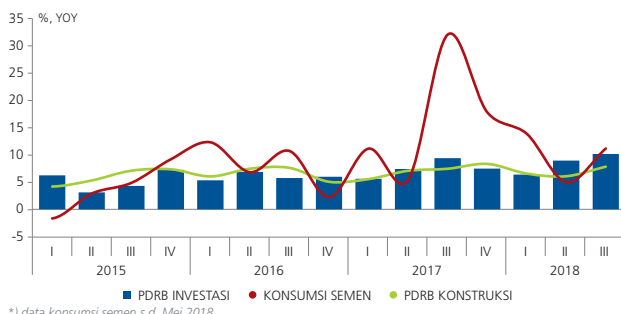
Pada triwulan III 2018, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 10,15% (yoy), kembali terakselerasi dibanding triwulan lalu yang tumbuh 8,94% (yoy). Percepatan pertumbuhan investasi menjadi penahan deselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan pada periode laporan. Secara triwulanan, investasi tercatat tumbuh 5,96% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh 4,79% (qtq). Peningkatan kinerja ini diindikasikan terjadi pada investasi dalam bentuk nonbangunan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pertumbuhan investasi pada dua triwulan terakhir tergolong signifikan. Pertumbuhan investasi pada triwulan II dan III 2018 merupakan yang tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan investasi triwulan II dan III selama lima tahun terakhir (2013-2017) yang sebesar 6,35% dan 6,63%. Peningkatan kinerja investasi diindikasikan dalam bentuk nonbangunan, yang tercermin dari masih kuatnya impor barang modal menjadi 132,40% (yoy) dari pertumbuhan 110,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meningkatnya impor barang modal terutama berupa mesin-mesin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU serta investasi pembelian mesin oleh swasta. Komponen mesin dan perlengkapannya yang paling banyak diimpor pada periode laporan meliputi impor mesin pembangkit, alat listrik dan alat telekomunikasi. Berdasarkan hasil FGD, impor barang modal tersebut terkait dengan penyelesaian investasi proyek pembangkit listrik di Batang, Cilacap, dan Jepara. Sebagai informasi, investasi pembangunan PLTU Batang



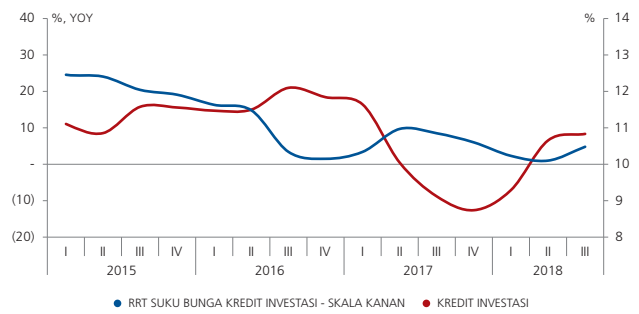
* data konsumsi semen s.d. Mei 2018

Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

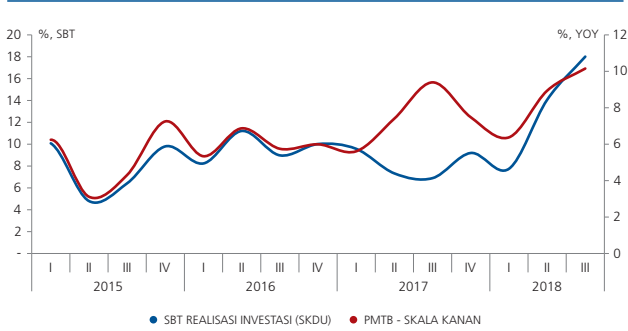
Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen

bernilai USD2,7 miliar atau setara dengan Rp30 triliun, dengan target penyelesaian pada tahun 2020. Sampai dengan triwulan III 2018, *progress* pembangunan PLTU mencapai 58% dan ditargetkan akan diuji coba pada April 2019 untuk Unit I dan September 2019 untuk Unit II, sehingga diperkirakan investasi masih tumbuh cukup tinggi hingga tahun mendatang.

Sementara itu, investasi bangunan masih terpantau meningkat pada triwulan III 2018. Hal tersebut tercermin dari data penjualan semen di Jawa Tengah pada periode laporan yang tumbuh 11,16% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya 5% (yoy). Pertumbuhan investasi bangunan tidak terlepas dari masih berlanjutnya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, antara lain Tol Trans Jawa, Bandara Baru Ahmad Yani, dan Bandara Jenderal Soedirman (Bandara Wirasaba), meskipun beberapa proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan PDRB lapangan usaha konstruksi yang juga meningkat menjadi 7,83% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dari triwulan II 2018 (6,07%; yoy). Peningkatan tersebut juga dikonfirmasi oleh realisasi belanja modal pemerintah provinsi Jawa Tengah yang pada triwulan laporan mencapai 38,05% dari total anggaran, atau lebih tinggi dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 28,83%.



Grafik 1.17 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi

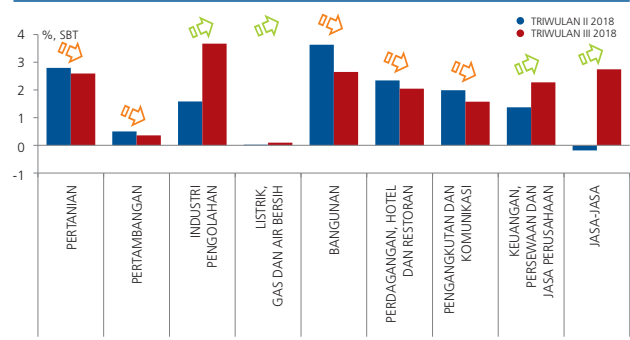


Grafik 1.18 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pihak perbankan juga mengonfirmasi adanya peningkatan pertumbuhan investasi pada triwulan III 2018. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 8,33% (yoy), dari tumbuh 6,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya; meskipun rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi cenderung meningkat dari 10,10% menjadi 10,48% pada periode laporan.

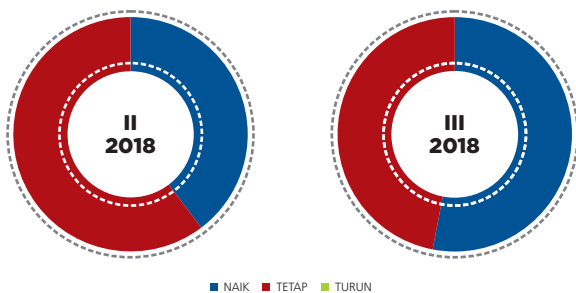
Pada sisi swasta, percepatan investasi terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SKDU, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi pada triwulan laporan tercatat 18,01%; lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,06%. Hasil survei menunjukkan bahwa peningkatan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, jasa-jasa, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.



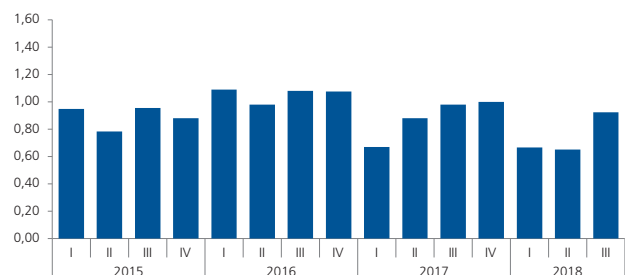
Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU)

Percepatan kegiatan investasi juga tercermin dari hasil kegiatan *liaison* pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) realisasi investasi triwulan laporan sebesar 0,92 lebih tinggi dibanding LS triwulan sebelumnya sebesar 0,65. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya responden yang menyatakan terdapat peningkatan kegiatan investasi menjadi sejumlah 53,03% responden, sedangkan sejumlah 46,97% responden mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi pada triwulan berjalan relatif tetap.

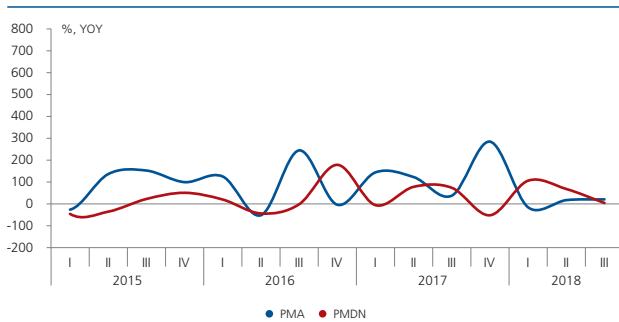
Peningkatan investasi mengindikasikan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian ke depan yang masih akan membaik. Pelaku usaha masih melakukan investasi baik berupa investasi rutin maupun *multiyears*. Investasi rutin yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan peremajaan mesin serta sarana-prasarana, dan juga penggantian ataupun perbaikan peralatan operasional. Sementara investasi *multiyears* yang dilakukan antara lain pembangunan



Grafik 1.20 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)



Grafik 1.21 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

kantor dan pabrik baru, perluasan pabrik, penambahan lini produksi, penambahan dan perluasan *outlet* penjualan, pembelian mesin baik untuk otomatisasi produksi dan peningkatan kapasitas, renovasi jalan, dan sebagainya. Investasi *multi-years* utamanya dilakukan oleh pelaku usaha pada sub-sektor industri tekstil, kayu, penyediaan akomodasi, konstruksi, dan ketenagalistrikan.

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal, akselerasi investasi diindikasikan terjadi pada investasi yang berasal dari pihak asing, sedangkan pertumbuhan investasi dalam negeri cenderung mengalami perlambatan. Pada triwulan III 2018 penanaman modal asing di Jawa Tengah adalah sebesar USD657,69 juta; atau tumbuh meningkat menjadi 20,58% (yoy) dari triwulan II 2018 yang tumbuh 17,20% (yoy). Sementara itu, nilai penanaman modal dalam negeri pada triwulan laporan sebesar Rp5.493,66 miliar; atau tumbuh 4,11% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh signifikan mencapai 68,14% (yoy).

1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

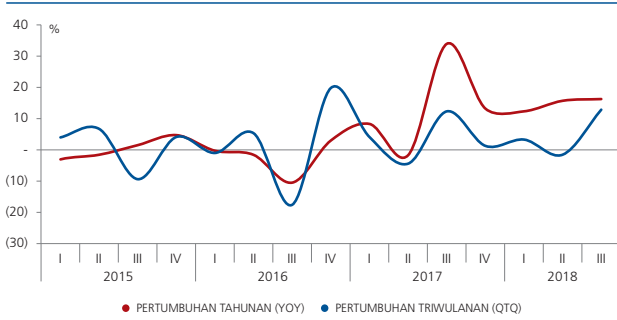
Pada triwulan III 2018, kinerja ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,26% (yoy).

Meskipun cukup tinggi, perbaikan pertumbuhan ekspor luar negeri relatif terbatas jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,71% (yoy). Menurut hasil FGD, peningkatan ekspor salah satunya

dipengaruhi oleh kembali normalnya jumlah hari kerja untuk pengiriman barang setelah pada triwulan sebelumnya berkurang karena *event* Ramadan dan Idul Fitri. Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan III 2018 tumbuh 12,86% (qtq), atau meningkat dibanding pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (12,32%; qtq).

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 48,86%, serta kayu dan barang dari kayu dengan pangsa 17,05%. Selain kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan, ekspor permesinan dan alat transportasi, serta ekspor kimia juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini relatif persisten selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jenis komoditasnya, ekspor mebel dan kayu olahan serta permesinan dan alat transportasi mencatatkan perbaikan pertumbuhan pada triwulan III 2018. Sementara itu, ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) serta bahan makanan masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, meskipun lebih lambat dibanding triwulan II 2018.

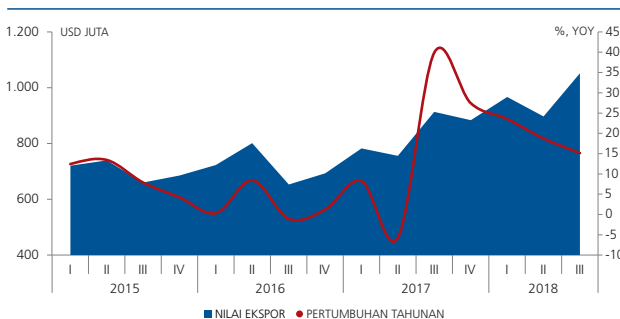
Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, ekspor TPT mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2018, pertumbuhan ekspor TPT tercatat 15,13% (yoy), kembali melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,72% (yoy). Perlambatan tersebut terutama berasal dari melambatnya ekspor tekstil berupa benang dan kain, yaitu sebesar 2,68% (yoy) pada triwulan laporan, jauh melambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya (24,23%; yoy). Sementara itu, ekspor garmen atau pakaian jadi masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan meski



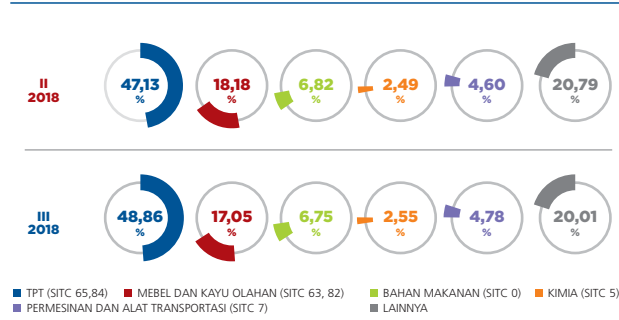
Grafik 1.23 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

terbatas, yaitu dari 16,57% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi 20,11%. Ekspor komoditas pakaian jadi secara konsisten mencatatkan pertumbuhan selama hampir 5 tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan di beberapa periode.

Meskipun nilai ekspor pakaian jadi jauh lebih dominan dibanding nilai ekspor benang dan kain, perlambatan yang cukup dalam pada komoditas benang dan kain akhirnya menahan pertumbuhan ekspor TPT di periode laporan. Ekspor benang dan kain mengalami perlambatan pada hampir seluruh pasar ekspor utama Jawa Tengah, dengan perlambatan terdalam terjadi untuk ekspor ke negara Tiongkok dan Korea Selatan. Sementara ekspor ke Amerika Serikat, baik berupa benang dan kain maupun pakaian jadi masih terpantau meningkat. Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa perlambatan penjualan disebabkan oleh terbatasnya kapasitas produksi *existing* sehingga belum mampu memenuhi semua permintaan, di samping karena faktor daya saing terutama di pasar Eropa.



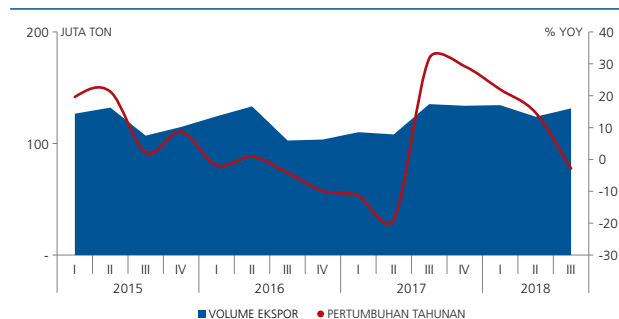
Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT



Grafik 1.24 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas

Kompetisi pasar yang semakin ketat, terutama dengan Vietnam, masih menjadi tantangan utama dalam kegiatan ekspor TPT. Di sisi hulu, daya saing industri tekstil hulu (benang dan kain) sangat tergantung pada teknologi permesinan yang digunakan atau lebih bersifat padat modal, sehingga restrukturisasi/modernisasi teknologi mesin menjadi faktor utama penentu daya saing ekspor. Sementara di sisi hilir, industri garmen/pakaian jadi merupakan industri yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja.

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu Jawa Tengah pada triwulan laporan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekspor komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,33% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,02% (yoy). Berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah pada triwulan laporan dirasakan berdampak terhadap



Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

meningkatnya ekspor produk yang berbahan baku domestik seperti kayu dan barang dari kayu. Pada triwulan III 2018, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.603 atau melemah 4,64% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp13.956³.

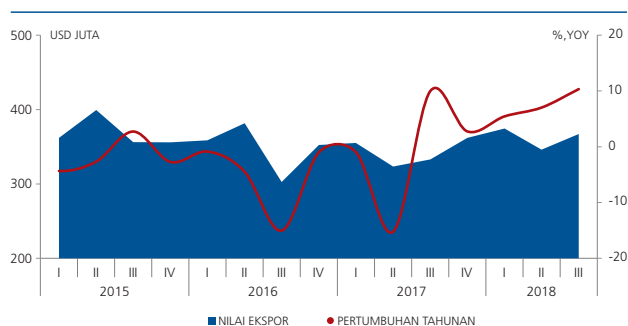
Peningkatan ekspor terjadi baik pada komoditas barang olahan kayu dan gabus maupun dalam bentuk mebel, baik secara nilai maupun volume. Secara nilai, ekspor komoditas barang olahan kayu dan gabus tercatat tumbuh meningkat menjadi 8,54% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 6,07% (yoy). Ekspor komoditas mebel juga tercatat mengalami perbaikan menjadi tumbuh 12,94% (yoy), dari triwulan II 2018 sebesar 8,31% (yoy). Pertumbuhan positif ekspor komoditas mebel secara berturut-turut dalam lima triwulan terakhir mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekspor setelah hampir selalu tercatat kontraksi sejak pertengahan tahun 2015.

Ditinjau lebih jauh, ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu terutama ditujukan untuk negara Amerika Serikat (22,42%); negara-negara di kawasan Eropa (16,64%); serta Tiongkok (14,12%). Pada triwulan laporan, perbaikan ekspor komoditas ini terutama terjadi untuk negara tujuan Tiongkok. Berdasarkan hasil *liaison*, beberapa tantangan dalam ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu di antaranya yaitu persaingan yang semakin ketat dengan negara pesaing yang memiliki kapasitas produksi masal seperti Vietnam

dan Tiongkok. Kedua negara tersebut mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, karena memperoleh dukungan pemerintah di negaranya, seperti dalam aspek UMK, energi, regulasi, bahan baku, maupun pembiayaan. Lebih lanjut, industri ini juga mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku, tenaga kerja terampil, serta sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dinilai belum efektif.

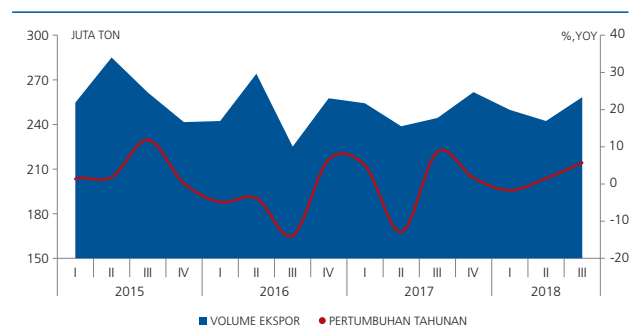
Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan pangsa masing-masing 31,84% dan 14,79%. Setelah kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (12,09%), Tiongkok (8,29%), dan ASEAN (6,93%). Pada triwulan laporan, peningkatan kinerja terjadi untuk ekspor ke negara ASEAN, Jepang, dan Eropa. Pertumbuhan ekspor ke Amerika Serikat relatif stabil dibanding triwulan lalu, sedangkan ekspor ke Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar masih tercatat tumbuh tinggi sebesar 21,72% (yoy) pada triwulan laporan, relatif stabil dibanding triwulan II 2018 yang tumbuh 21,74% (yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke ASEAN mengalami akselerasi menjadi tumbuh 16,79% (yoy), berbalik arah setelah kontraksi



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

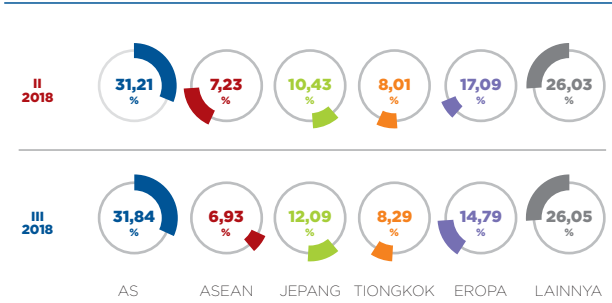
Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

3. Data nilai tukar rupiah bersumber dari rata-rata Kurs Tengah BI pada suatu periode tertentu



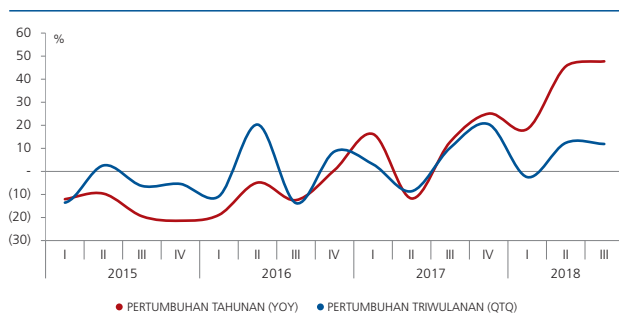
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

6,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Ekspor nonmigas ke negara mitra dagang utama lain seperti Jepang dan Eropa juga mencatatkan peningkatan pertumbuhan, yaitu masing-masing dari 9,39% (yoy) dan 8,61% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi 16,98% (yoy) dan 10,37% (yoy) pada periode laporan. Sebaliknya, pertumbuhan ekspor ke Tiongkok menunjukkan perlambatan yaitu sebesar 9,31% (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2018 (11,13%; yoy).

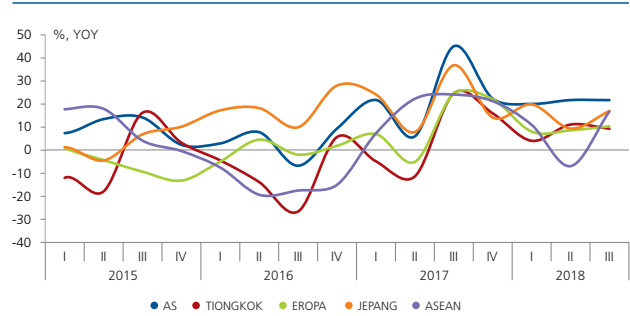
1.1.1.3.2 Impor Luar Negeri

Kinerja impor luar negeri Jawa Tengah kembali mencatatkan pertumbuhan signifikan pada triwulan III 2018. Pada periode laporan, impor luar negeri Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 47,74% (yoy), kembali meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang telah tumbuh signifikan (45,54%; yoy). Sebagai komponen pengurang PDRB, berlanjutnya penguatan impor luar negeri di tengah perbaikan ekspor yang relatif terbatas menjadi penahan laju perekonomian triwulan laporan untuk tumbuh



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



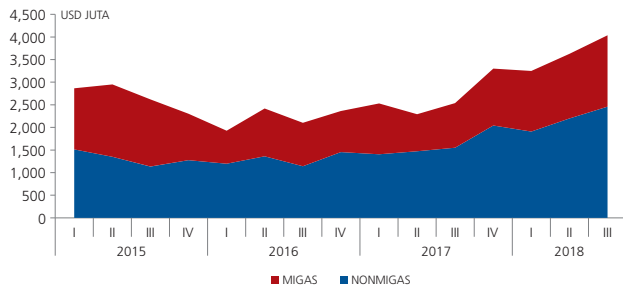
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

lebih tinggi. Secara triwulanan, impor luar negeri tumbuh 11,89% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun 2017 yang tumbuh 10,23% (qtq).

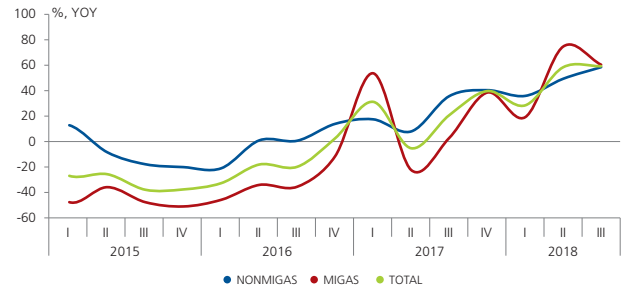
Pada triwulan laporan, impor luar negeri meningkat signifikan terutama didorong oleh kenaikan impor nonmigas. Di sisi lain, pertumbuhan impor komoditas migas pada triwulan laporan tercatat melambat. Perlambatan pertumbuhan impor migas terjadi seiring dengan kembali normalnya kebutuhan BBM pasca periode puncak arus mudik-balik Lebaran yang terjadi pada triwulan II 2018. Impor migas Jawa Tengah pada triwulan laporan mencatatkan pangsa sebesar 39,11% dari total impor Jawa Tengah, sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu 60,89%. Impor komoditas migas masih memiliki peran signifikan terhadap total impor di Jawa Tengah. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengilangan minyak di Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 348.000 barel/hari. Unit pengolahan ini bernilai strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

Seiring dengan normalisasi permintaan BBM pasca fenomena perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan II, impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas mengalami perlambatan secara nominal. Pada triwulan III 2018, impor migas mencatatkan perlambatan menjadi tumbuh



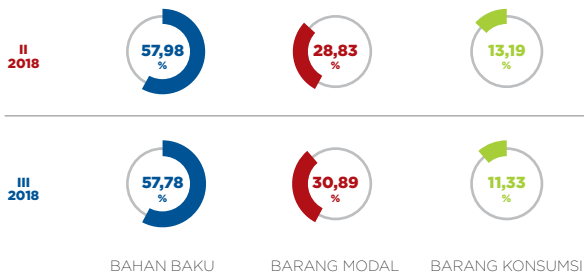
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah



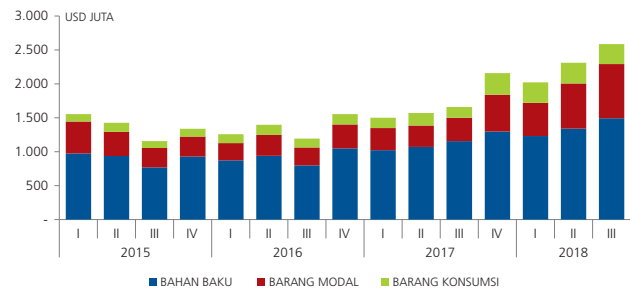
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

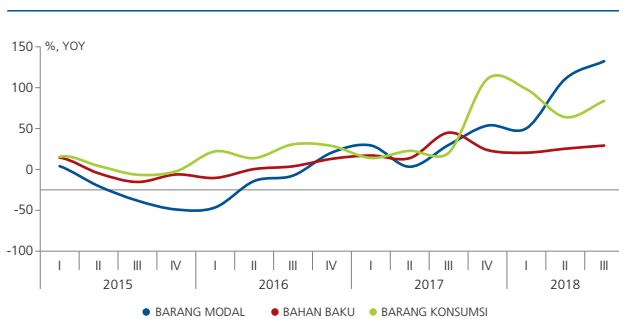
60,40% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai 74,66% (yoy); meskipun angka pertumbuhannya masih tergolong tinggi. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata historis pertumbuhan impor migas triwulan III dalam kurun lima tahun terakhir (2013-2017) yang tercatat kontraksi 5,05%. Tingginya pertumbuhan impor migas secara nominal ditengarai juga dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Harga minyak dunia menunjukkan tren yang meningkat sejak triwulan akhir 2017, yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan, ketidakpastian pencapaian produksi OPEC dan Non-OPEC pasca pertemuan Vienna, serta dampak kebijakan sanksi AS terhadap Iran berupa larangan impor minyak dari Iran. Pada triwulan III 2018, rata-rata harga minyak WTI dan Minas masing-masing meningkat menjadi USD69,61 dan USD77,53 per barel, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD67,97 dan USD72,68 per barel. Harga minyak pada awal Oktober 2018 kembali naik tajam hingga menembus USD80 per barel akibat sanksi AS ke

Iran, meskipun telah menurun sejak minggu IV Oktober 2018 akibat pelonggaran sanksi AS terhadap Iran.

Berbeda dengan impor migas yang mencatatkan perlambatan, pada triwulan laporan komoditas nonmigas justru menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan menjadi pendorong kembali menguatnya impor luar negeri secara keseluruhan. Impor nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh 58,49% (yoy), menguat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 49,35% (yoy). Impor komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan pangsa mencapai 57,78% dari total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa 30,89%. Sementara itu, impor barang konsumsi memiliki pangsa 11,33%. Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan pangsa impor barang modal yang lebih tinggi dibanding rata-rata pangsa historis tahun 2015-2017 (23,03%).

Secara nilai, percepatan pertumbuhan impor nonmigas triwulan laporan didorong oleh peningkatan impor barang modal, bahan baku, serta barang konsumsi. Impor barang modal yang memiliki pangsa terbesar kedua menunjukkan pertumbuhan signifikan menjadi 132,40% (yoy), dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sudah tergolong tinggi (110,67%; yoy). Peningkatan impor ini terutama dalam bentuk nonbangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesoris barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi yang tumbuh 129,49% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 (115,73%; yoy). Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, aparat dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi nonbangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di samping telah terealisasi dalam bentuk investasi, peningkatan impor barang modal juga masih ada yang berbentuk *inventory*. Hal ini tercermin dari tingginya pertumbuhan perubahan *inventory* triwulan laporan sebesar 244,93% (yoy), meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya (19,49%; yoy).

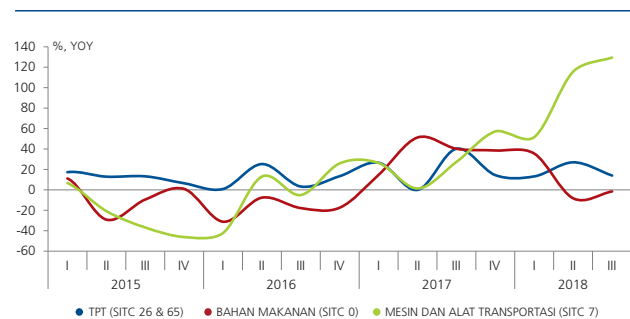


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

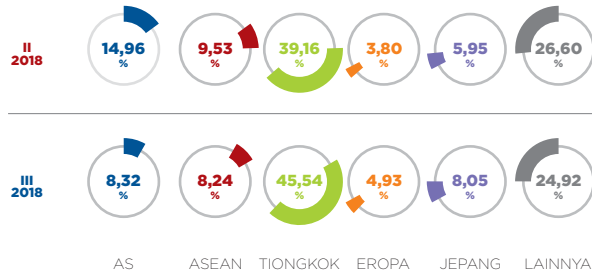
Selanjutnya, impor bahan baku yang memiliki pangsa terbesar juga mencatatkan kenaikan pertumbuhan, meskipun tidak setajam kenaikan impor barang modal. Impor bahan baku tumbuh menjadi 29,20% (yoy) pada triwulan laporan, dari 25,33% (yoy) pada triwulan II 2018. Impor bahan baku terutama meningkat untuk komoditas bahan makanan-minuman mentah dan barang mentah lainnya untuk industri. Jika ditelusuri lebih lanjut, impor bahan makanan yang mengalami peningkatan, di antaranya buah dan sayuran, pakan ternak, gula dan gula rafinasi, serta tembakau.

Sementara itu, meskipun memiliki pangsa terkecil terhadap total impor Jawa Tengah, impor barang konsumsi juga tercatat tumbuh meningkat dan berada pada level yang cukup tinggi. Pada triwulan laporan, impor barang konsumsi tercatat tumbuh 83,83% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2018 yang tumbuh 63,93% (yoy). Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan triwulan III selama lima tahun terakhir (2013-2017) yang sebesar 16,84% (yoy). Percepatan impor barang konsumsi utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya impor makanan-minuman untuk konsumsi rumah tangga; serta barang konsumsi baik yang tidak tahan lama, semi-tahan lama, maupun tahan lama. Meskipun impor barang konsumsi mengalami akselerasi, kinerja konsumsi RT pada triwulan laporan justru tercatat tumbuh melambat. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa barang



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

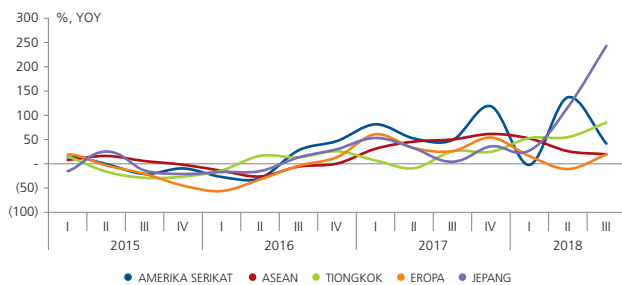


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

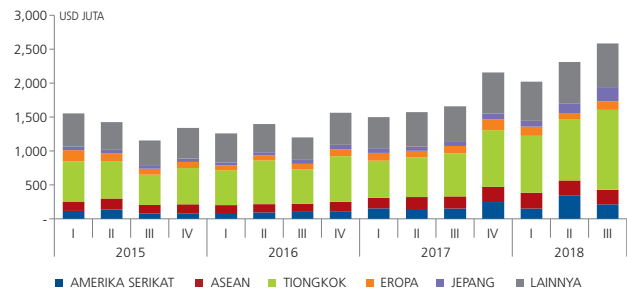
konsumsi yang diimpor tidak digunakan langsung oleh rumah tangga di Jawa Tengah, melainkan cenderung diperdagangkan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, di tengah perlambatan kinerja sektor primer dan sekunder.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 45,54%. Selain Tiongkok, negara asal impor utama lainnya yaitu Amerika Serikat (8,32%), ASEAN (8,24%), Jepang (8,05%), dan Eropa (4,93%). Mitra dagang utama ini tidak banyak berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan, impor luar negeri tercatat meningkat, terutama didorong oleh naiknya impor yang berasal dari negara Jepang, Tiongkok, dan kawasan Eropa. Sementara itu, impor dari Amerika Serikat dan ASEAN mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal



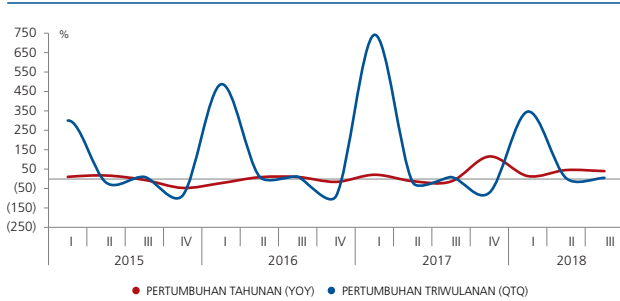
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

1.1.1.4 Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh 39,71% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan II 2018 sebesar 45,04% (yoy). Perlambatan diindikasikan berasal dari melambatnya ekspor antardaerah, di tengah perlambatan pertumbuhan impor antardaerah yang cukup dalam.

Melemahnya ekspor antardaerah terindikasi dari perlambatan arus muat barang komoditas migas dari pelabuhan Jawa Tengah untuk perdagangan dalam negeri yang tumbuh 0,02% (yoy) pada triwulan laporan; lebih rendah dibandingkan triwulan II 2018 (63,71%; yoy). Kinerja ekspor migas Jawa Tengah ke daerah lain diindikasikan menurun, seiring dengan turunnya aktivitas industri pengilangan migas akibat normalisasi permintaan. Lebih lanjut, sejalan dengan kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang melambat, ekspor barang hasil produksi ke luar provinsi menunjukkan penurunan. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional sehingga pangsa komoditas bahan makanan dalam ekspor antardaerah cukup signifikan. Sejalan dengan kinerja lapangan usaha pertanian yang melambat, ekspor komoditas bahan makanan ke luar provinsi diperkirakan menurun. Lebih lanjut, melambatnya konsumsi masyarakat diperkirakan menahan permintaan domestik dari daerah lain terhadap produk ekspor Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

Sementara itu, impor antardaerah Jawa Tengah diperkirakan tumbuh melambat cukup dalam. Hal tersebut terindikasi dari kontraksi jumlah bongkar barang komoditas nonmigas di pelabuhan Jawa Tengah yang berasal dari perdagangan antar pulau (-22,66%, yoy); lebih rendah dari jumlah bongkar triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,40% (yoy). Perlambatan impor antardaerah ditengarai dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di Jawa Tengah pada triwulan laporan.

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (33,90%); pertanian, kehutanan dan perikanan (15,31%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,30%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Pada triwulan III 2018, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dan mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mengalami perbaikan, sehingga menahan perlambatan lebih dalam.

Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2017**				2017**	2018**		
	I	II	III	IV		I	II	III
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	41.895	41.470	47.607	36.275	167.247	44.689	44.610	50.833
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7.109	7.285	7.475	8.153	30.023	7.806	8.424	8.442
C INDUSTRI PENGOLAHAN	99.537	103.515	104.787	107.150	414.989	107.508	111.708	112.524
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	269	277	285	297	1.128	299	306	317
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	173	176	180	183	711	186	187	188
F KONSTRUKSI	28.694	30.113	31.392	32.737	122.937	31.759	33.258	35.450
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	38.721	40.622	40.825	41.249	161.417	41.956	43.623	44.143
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	8.946	9.420	9.841	9.821	38.028	9.899	10.670	10.759
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9.104	9.426	9.590	9.899	38.019	10.170	10.394	10.580
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9.037	9.678	9.928	10.484	39.126	10.498	10.816	11.085
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	8.415	8.788	8.927	9.090	35.219	9.270	9.412	9.453
L REAL ESTATE	4.802	4.892	4.984	5.159	19.837	5.212	5.281	5.363
M,N JASA PERUSAHAAN	1.065	1.121	1.104	1.175	4.465	1.209	1.280	1.243
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	7.752	8.099	8.376	8.859	33.086	8.336	8.758	8.554
P JASA PENDIDIKAN	12.109	12.886	13.505	13.521	52.022	13.544	14.224	14.908
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2.440	2.602	2.626	2.692	10.360	2.734	2.835	2.942
R,S,T,U JASA LAINNYA	4.384	4.588	4.700	4.765	18.437	4.825	5.095	5.170
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	284.451	294.958	306.131	301.509	1.187.049	309.901	320.883	331.955

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2017**				2017**	2018**		
	I	II	III	IV		I	II	III
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	30.151	29.539	33.355	25.081	118.126	30.669	31.056	34.650
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4.932	5.011	5.108	5.322	20.373	5.023	5.296	5.219
C INDUSTRI PENGOLAHAN	74.951	77.627	77.720	78.524	308.821	78.583	81.032	80.814
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	237	241	245	254	977	246	253	261
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	153	156	159	161	628	164	165	165
F KONSTRUKSI	21.914	22.849	23.659	24.340	92.762	23.353	24.236	25.512
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	31.326	32.590	32.597	32.830	129.342	32.831	34.065	34.309
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7.260	7.410	7.586	7.611	29.867	7.657	8.093	8.123
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6.882	7.055	7.143	7.346	28.426	7.495	7.596	7.631
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9.377	10.024	10.244	10.841	40.486	10.864	11.210	11.429
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	5.999	6.239	6.294	6.345	24.878	6.407	6.464	6.442
L REAL ESTATE	4.119	4.178	4.240	4.320	16.857	4.346	4.391	4.438
M,N JASA PERUSAHAAN	794	829	813	862	3.297	872	920	890
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	5.621	5.731	5.813	6.139	23.305	5.851	5.976	5.966
P JASA PENDIDIKAN	8.019	8.508	8.691	8.601	33.819	8.604	9.005	9.368
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.789	1.895	1.902	1.940	7.526	1.946	2.009	2.070
R,S,T,U JASA LAINNYA	3.479	3.625	3.704	3.754	14.562	3.800	3.985	4.035
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	217.003	223.504	229.274	224.270	894.050	228.712	235.752	241.320

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% , YOY)

LAPANGAN USAHA	2017**				2017**	2018**		
	I	II	III	IV		I	II	III
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	10,06	-3,49	-0,22	0,36	1,46	1,72	5,14	3,88
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	6,70	7,77	2,06	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17
C INDUSTRI PENGOLAHAN	3,74	5,04	4,25	4,34	4,35	4,85	4,39	3,98
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,05	5,52	7,61	3,81	5,22	4,11	5,36	6,36
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,19	6,10	6,91	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05
F KONSTRUKSI	5,55	7,08	7,44	8,33	7,13	6,56	6,07	7,83
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5,40	8,07	7,18	3,84	6,10	4,81	4,53	5,25
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	6,24	8,44	6,18	4,46	6,30	5,47	9,21	7,08
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6,06	5,89	6,24	8,13	6,59	8,91	7,67	6,82
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7,08	13,15	13,80	18,81	13,27	15,86	11,83	11,56
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	4,71	7,37	5,72	3,78	5,38	6,80	3,61	2,34
L REAL ESTATE	7,22	6,77	6,27	5,76	6,49	5,51	5,09	4,67
M,N JASA PERUSAHAAN	8,08	10,03	5,51	11,23	8,72	9,88	11,04	9,48
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	-0,83	-0,10	3,65	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62
P JASA PENDIDIKAN	1,83	8,01	9,80	8,93	7,15	7,29	5,83	7,79
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	4,68	9,84	9,83	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84
R,S,T,U JASA LAINNYA	6,25	9,92	9,88	9,85	8,99	9,22	9,93	8,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,32	5,18	5,17	5,40	5,27	5,40	5,48	5,25

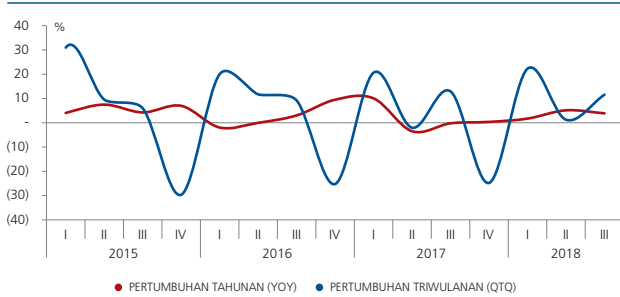
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,88% (yoy), melambat setelah mencatatkan pertumbuhan 5,14% (yoy) pada triwulan II 2018. Secara triwulanan, lapangan usaha ini menunjukkan pertumbuhan 11,57% (qtq), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 12,92% (qtq). Hasil *liaison* yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga mengkonfirmasi perlambatan kinerja sektor pertanian. *Likert scale* penjualan domestik sektor pertanian

menurun dari 0,80 menjadi -0,62. Meskipun melambat, pertumbuhan lapangan usaha pertanian sebesar 3,88% (yoy) pada triwulan laporan lebih tinggi dibanding rata-rata historis pertumbuhan triwulan III selama lima tahun terakhir (2013-2017) sebesar 2,49%.

Kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh melambat pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh subsektor tanaman bahan makanan. Berdasarkan

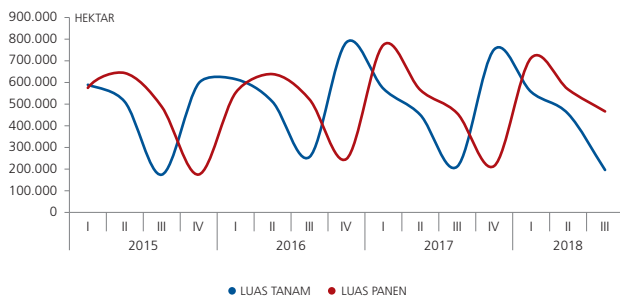


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

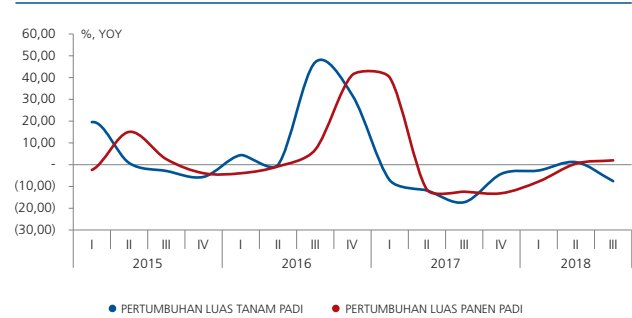
hasil FGD, perlambatan disebabkan oleh turunnya tingkat produksi padi selepas berakhirnya musim panen raya yang berlangsung di triwulan II 2018. Hasil FGD menunjukkan bahwa panen yang masih berlangsung di triwulan III merupakan sisa panen dari lahan pertanian yang musim tanamnya mundur. Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami penurunan. Luas panen pada triwulan III diperkirakan menjadi sekitar 464,8 ribu hektar, atau menurun dari triwulan sebelumnya yang seluas 566,2 ribu hektar. Berkurangnya luas panen berdampak terhadap angka produksi padi yang diperkirakan juga menurun menjadi ±2,6 juta ton GKG, lebih rendah dari triwulan II 2018 yang sekitar 3,2 juta ton GKG. Sejalan dengan penurunan pasokan produksi padi akibat berakhirnya masa panen raya, pada September 2018 komoditas beras mencatatkan inflasi, berbalik arah dari tren deflasi yang telah berlangsung sejak Maret 2018.

Lebih lanjut, musim kemarau panjang yang terjadi di triwulan laporan diperkirakan belum terlalu



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.43 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

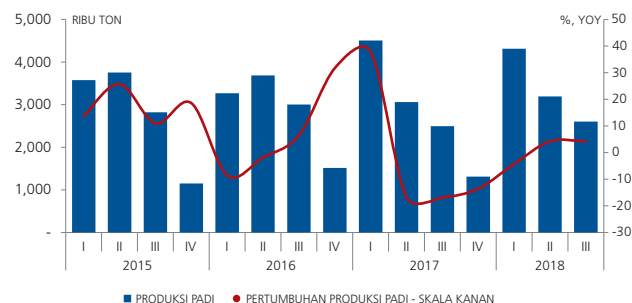


Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.44 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah

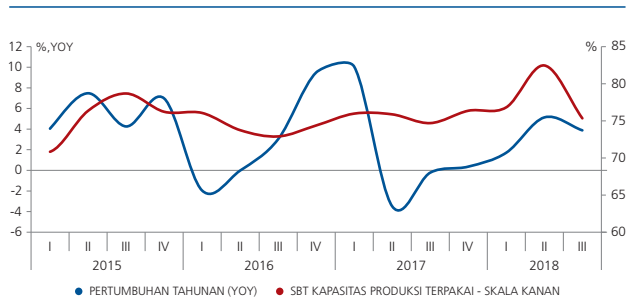
berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian, karena hasil panen periode laporan merupakan bawaan/hasil dari musim tanam sebelumnya (MT II 2018). Fenomena kekeringan diperkirakan lebih berpengaruh terhadap musim tanam selanjutnya (MT III 2018), akibat mundurnya awal musim hujan 2018/2019 dari periode normal. Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya luas tanam padi pada triwulan III 2018 menjadi sekitar 195 ribu hektar.

Berdasarkan monitoring BMKG terhadap distribusi hujan di musim kemarau, peluang turun hujan sangat kecil diperkirakan sampai dengan bulan Agustus dan September. BMKG juga mengkonfirmasi adanya fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat pada Oktober 2018 hingga Februari 2019, yang ditandai dengan mundurnya periode musim hujan selama 10-30 hari dari periode normalnya. BMKG memprakirakan awal musim hujan akan berlangsung bervariasi di Jateng antara bulan Oktober hingga awal Desember 2018, sehingga diperkirakan musim tanam selanjutnya (MT III 2018) secara umum akan mundur. Hal ini



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.45 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

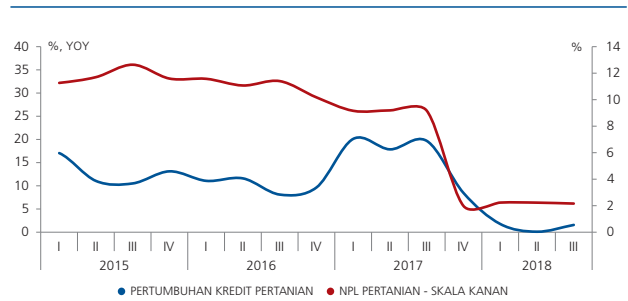


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.46 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian

mendorong potensi kekeringan lahan pertanian di beberapa daerah seperti Kab. Wonogiri, Sragen, dan Sukoharjo yang masuk kategori kekeringan ekstrim. Lain halnya dengan subsektor tanaman bahan makanan yang kurang diuntungkan dengan kondisi musim kemarau yang terlalu panjang, kinerja tanaman perkebunan semusim seperti tembakau dan tebu justru mengalami perbaikan.

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang menunjukkan adanya perlambatan kegiatan usaha dari sektor pertanian. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pertanian mengalami penurunan dari 9,75% pada triwulan II 2018 menjadi 2,87% pada periode laporan. Kapasitas produksi terpakai di sektor pertanian juga mencatatkan penurunan dari 82,47% pada triwulan II 2018 menjadi 75,34%. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kapasitas produksi di seluruh subsektor pertanian, dengan tingkat kapasitas terendah terpantau pada subsektor perikanan (SBT 71,10%), diikuti tanaman bahan makanan (SBT 71,87%) dan kehutanan (SBT 76,83%). Meskipun kinerja sektor pertanian mengalami perlambatan, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian masih tercatat meningkat. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 1,57% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (0,11%; yoy).

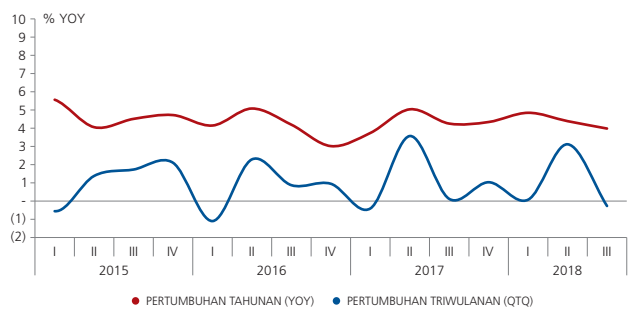


Grafik 1.47 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

1.1.2.2 Industri Pengolahan

Seiring dengan perlambatan konsumsi domestik dan terbatasnya perbaikan kinerja ekspor luar negeri, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh melambat pada periode laporan. Pada triwulan III 2018, kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh 3,98% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,39% (yoy). Sebagai lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah, melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan menjadi pendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami kontraksi 0,27% (qtq), berbalik arah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 0,12% (qtq).

Berdasarkan hasil FGD, melambatnya kinerja industri pengolahan salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi industri pengilangan migas seiring dengan normalisasi permintaan BBM masyarakat pasca



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

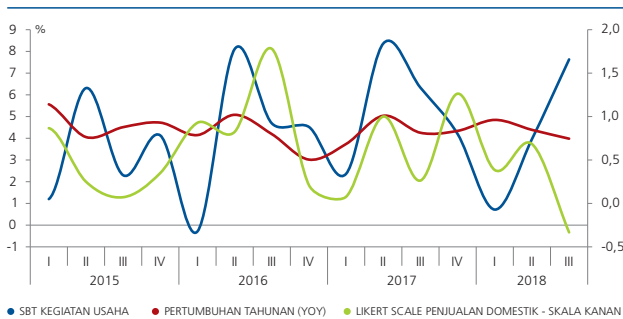
Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

mencapai puncak saat periode Lebaran di triwulan II 2018. Selain itu, sub-industri pengolahan yang juga tumbuh melambat yaitu industri pengolahan tembakau. Melemahnya kinerja industri pengolahan tembakau disebabkan karena pada triwulan laporan tengah menunggu pasokan tembakau dari petani yang sedang dalam masa panen, sehingga saat ini industri belum banyak memproduksi. Beberapa industri lain yang juga tumbuh melambat sehingga menarik pertumbuhan industri pengolahan secara keseluruhan ke bawah, antara lain industri kimia; industri karet, barang dari karet dan plastik; serta industri barang galian bukan logam. Perlambatan yang lebih parah terutama terjadi pada industri yang memiliki ketergantungan bahan baku impor tinggi, sebab pemenuhan bahan baku impor menjadi lebih mahal nilainya seiring dengan berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara itu, terdapat beberapa industri yang masih mengalami perbaikan kinerja dan menahan perlambatan lebih dalam, di antaranya industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu dan barang dari kayu; serta industri furnitur.

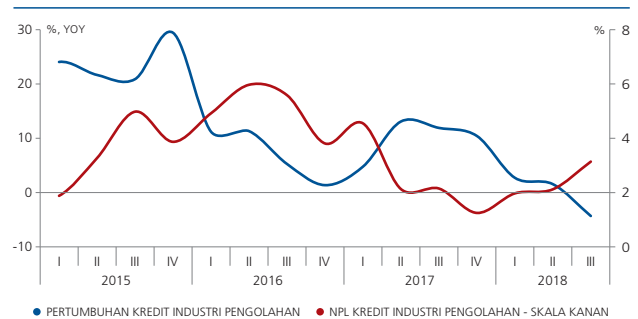
Hasil *liaison* menunjukkan bahwa kinerja industri pengolahan di pasar domestik tercatat mengalami penurunan pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) penjualan domestik pada triwulan III 2018 sebesar -0,33, turun dari LS triwulan II 2018 sebesar 0,68. Tidak sedalam penurunan penjualan domestik, kinerja penjualan ekspor juga mengalami perlambatan. Hal

tersebut tercermin dari LS penjualan ekspor sebesar 0,29, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan LS 0,38. Melambatnya kinerja industri pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, terindikasi adanya penurunan kapasitas produksi terpakai di industri pengolahan, yaitu dari 79,76% pada triwulan II 2018 menjadi 71,24% pada periode laporan. Penurunan kapasitas produksi terpakai terjadi di hampir seluruh subsektor industri pengolahan, dengan penurunan terbesar pada industri alat angkut, mesin dan peralatannya serta industri pupuk, kimia dan barang dari karet. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang dihasilkan dari SKDU juga menunjukkan penurunan menjadi 50,65%, dari triwulan II 2018 sebesar 60,55%, yang disebabkan oleh turunnya indikator volume pesanan, volume produksi, serta persediaan barang jadi.

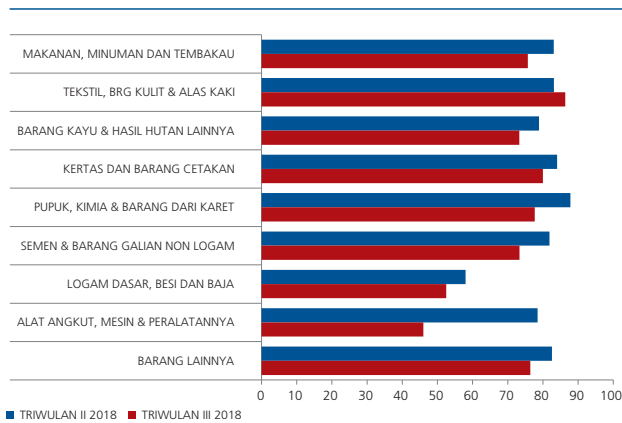
Sisi perbankan mengonfirmasi perlambatan kinerja industri pengolahan pada triwulan laporan. Penyaluran kredit pada lapangan usaha ini mengalami penurunan dari tumbuh 1,55% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi kontraksi 4,32% (yoy) pada periode laporan. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi. Kualitas kredit juga mencerminkan melambatnya kinerja tersebut. Pada triwulan III 2018, industri pengolahan mencatatkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) 3,14%; meningkat dari rasio NPL triwulan sebelumnya sebesar 2,12%.



Grafik 1.49 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan



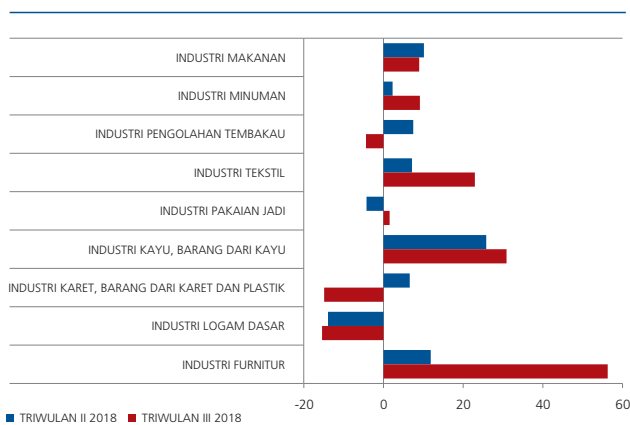
Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.51 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

Berdasarkan skalanya, pelemahan terutama terjadi pada industri besar dan sedang, sementara industri mikro dan kecil masih mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa produksi industri manufaktur besar dan sedang melambat dari pertumbuhan 7,42% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi 6% (yoy) pada triwulan III 2018. Perlambatan pertumbuhan produksi di industri besar dan sedang terutama terjadi pada subsektor industri pengolahan tembakau; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; serta industri logam dasar. Melemahnya kinerja subsektor tersebut ditengarai

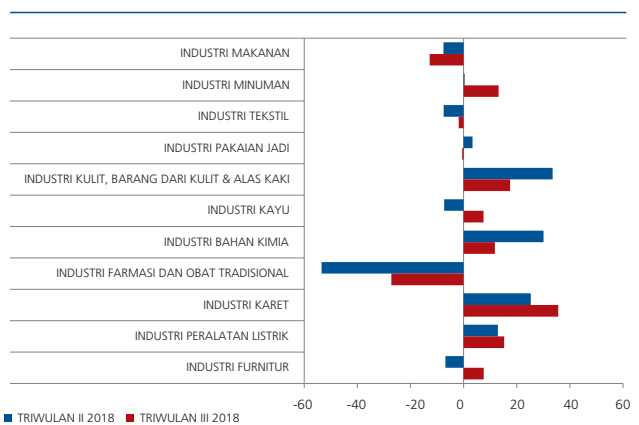


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.52 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% YOY)

dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik, mengingat industri-industri di atas memiliki orientasi pasar domestik. Di sisi lain, mampu menahan perlambatan lebih dalam, beberapa subsektor industri yang berorientasi ekspor masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan seperti industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, barang dari kayu; serta industri furnitur. Peningkatan pertumbuhan subsektor industri yang berorientasi ekspor tersebut mengindikasikan bahwa permintaan dari eksternal masih relatif baik, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut ditengarai dipengaruhi oleh menguatnya pertumbuhan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat.

Sementara itu, produksi industri manufaktur mikro dan kecil tumbuh membaik dari 0,01% (yoy) di triwulan II 2018 menjadi 5,20% (yoy) pada periode laporan. Pada industri skala mikro dan kecil, peningkatan pertumbuhan produksi tercatat pada industri minuman; kayu dan barang dari kayu; furnitur; farmasi dan obat tradisional; serta industri tekstil. Di sisi lain, beberapa subsektor mencatatkan perlambatan pertumbuhan seperti di subsektor industri makanan; kulit, barang dari kulit dan alas kaki; serta industri bahan kimia.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% YOY)

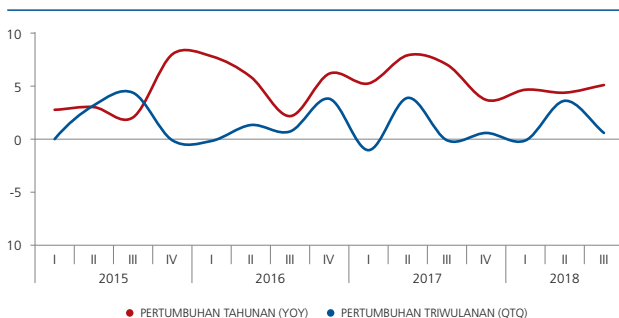
1.1.2.3 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Pada triwulan laporan, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencatatkan perbaikan pertumbuhan menjadi 5,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,53% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat tumbuh 0,72% (qtq), meningkat dibanding pertumbuhan triwulan III 2017 yang sebesar 0,02% (qtq).

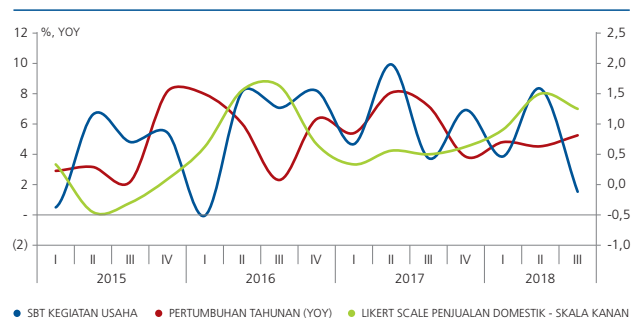
Meskipun pengeluaran konsumsi rumah tangga di triwulan III 2018 mengalami perlambatan seiring dengan normalisasi belanja pasca perayaan HBKN, kinerja lapangan usaha perdagangan masih mencatatkan peningkatan di triwulan laporan. Peningkatan perdagangan tersebut ditengarai terkait dengan kenaikan impor barang konsumsi yang tidak digunakan langsung oleh rumah tangga, melainkan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil FGD, menguatnya kinerja perdagangan besar dan eceran pada periode laporan didorong oleh peningkatan perdagangan mobil dan sepeda motor. Hal tersebut terkonfirmasi dari data pendaftaran kendaraan baru yang meningkat signifikan serta kenaikan penyaluran kredit kendaraan bermotor dari tumbuh 10,12% (yoy) menjadi 11,98% (yoy) pada triwulan III 2018.

Percepatan pertumbuhan lapangan usaha ini ditopang oleh daya beli konsumen yang masih terjaga. Stimulus fiskal pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) serta terkendalinya tingkat inflasi diperkirakan turut mendukung daya beli masyarakat. Meskipun sedikit meningkat, pada triwulan III 2018 Jawa Tengah mencatatkan inflasi yang masih terkendali sebesar 2,79% (yoy); sedikit lebih tinggi dibanding inflasi triwulan II 2018 (2,72%; yoy).

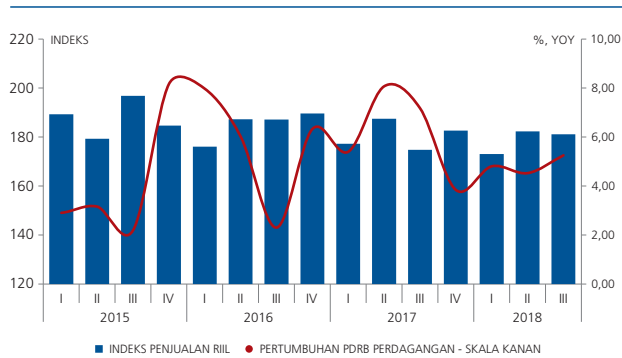
Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan sejalan dengan menguatnya penyaluran kredit di lapangan usaha ini. Pada triwulan III 2018, penyaluran kredit perdagangan tercatat tumbuh 10,35% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,65% (yoy). Perbaikan tersebut didorong oleh perbaikan kredit investasi dan kredit modal kerja. Lebih lanjut, pertumbuhan penyaluran kredit konsumsi juga meningkat dari 7,85% (yoy) di triwulan II 2018 menjadi 8,19% (yoy) pada triwulan laporan, yang salah satunya didorong oleh naiknya pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. Penyaluran kredit yang meningkat menandakan adanya peningkatan aktivitas di sektor perdagangan besar dan eceran.



Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

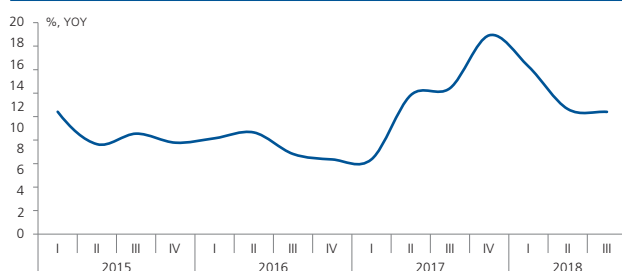


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.56 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

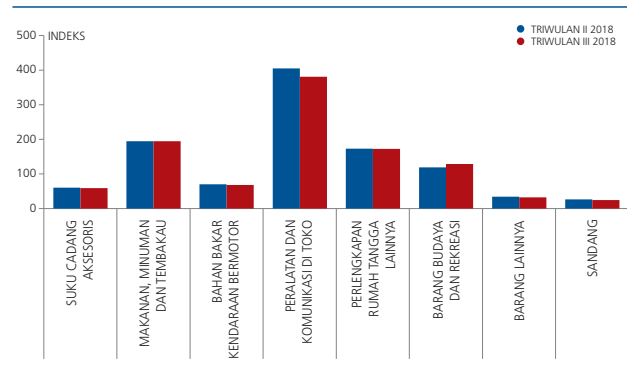
1.1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

Di luar ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi (11,56%; yoy). Seiring dengan ketergantungan terhadap teknologi informasi, lapangan usaha informasi dan komunikasi secara konsisten mencatatkan pertumbuhan tinggi dan selalu mencatatkan pertumbuhan *double digit* dalam kurun enam triwulan terakhir. Pada triwulan III 2018, kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi sedikit melambat dari tumbuh 11,83% (yoy) di triwulan lalu, yang diperkirakan lebih dipengaruhi oleh faktor musiman pasca Lebaran. Namun demikian secara umum perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi

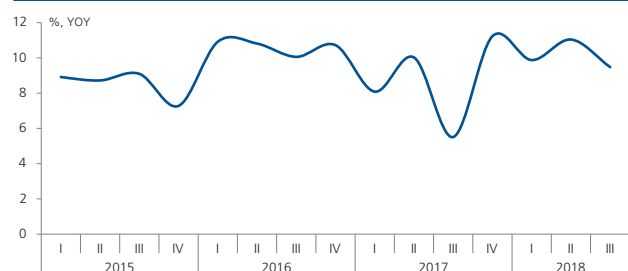


Grafik 1.57 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

kegiatan usaha semakin masif. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya perkembangan *e-commerce*, dan *start up company* yang berbasis teknologi informasi.

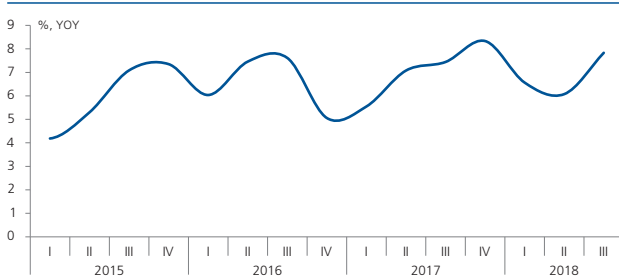
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha jasa perusahaan. Pada triwulan III 2018, lapangan usaha ini tumbuh 9,48% (yoy), melambat dari triwulan II 2018 yang tumbuh 11,04% (yoy). Perlambatan tersebut ditengarai dipengaruhi oleh kembali normalnya permintaan akan jasa penyelenggara acara (*event organizer*) untuk hajatan di periode menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, jasa persewaan seperti kendaraan mobil atau motor juga diindikasikan mengalami penurunan setelah berakhirnya musim liburan.

Sementara itu, lapangan usaha konstruksi yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan



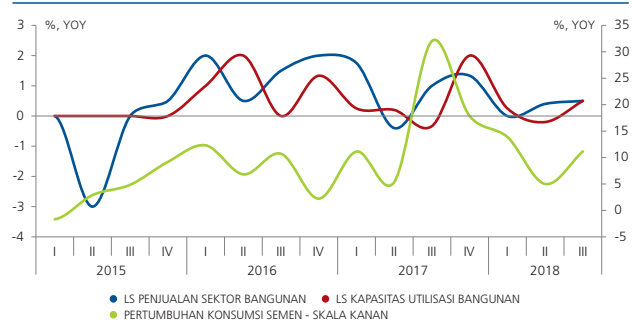
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Konstruksi

keempat di Jawa Tengah mencatatkan perbaikan kinerja pada triwulan III 2018. Pada periode laporan, lapangan usaha konstruksi tumbuh meningkat dari 6,07% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi tumbuh sebesar 7,83% (yoy). Akselerasi tersebut tercermin dari kenaikan pertumbuhan penjualan semen menjadi sebesar 11,16% (yoy), dari tumbuh 5% (yoy) di triwulan II 2018. Membaiknya kinerja lapangan usaha ini juga dikonfirmasi dari hasil *liaison*, di mana *likert scale* penjualan dan kapasitas utilisasi di sektor bangunan mengalami peningkatan dari masing-masing sebesar 0,4 dan -0,20 pada triwulan II 2018 menjadi masing-masing sebesar 0,5 pada periode laporan.

1.2. TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN IV 2018

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan kembali meningkat pada triwulan IV 2018. Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2018 didorong oleh meningkatnya komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT seiring dengan pola musiman akhir tahun. Kegiatan investasi diperkirakan masih menguat terutama didorong berlanjutnya penyelesaian investasi nonbangunan dalam rangka pembangunan PLTU. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan mengalami perbaikan dalam rangka mengejar realisasi anggaran yang masih rendah. Ekspor luar negeri diperkirakan



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah,

Grafik 1.61 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen

meningkat terbatas, di tengah masih berlanjutnya kenaikan impor luar negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal guna mendukung kegiatan investasi. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan seiring dengan peningkatan permintaan domestik pada akhir tahun. Sementara itu, lapangan usaha pertanian diperkirakan tumbuh melambat dibanding triwulan III 2018, yang disebabkan oleh mundurnya musim tanam (MT) III 2018 akibat pengaruh musim kemarau panjang. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2018 diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy).

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan IV 2018 Sisi Pengeluaran

Pada triwulan IV 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat terutama didorong oleh kenaikan konsumsi, khususnya konsumsi swasta yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan kembali meningkat dipengaruhi oleh faktor musiman pada akhir tahun. Dengan pangsa lebih dari 60%, akselerasi pada komponen pengeluaran tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih cepat pada triwulan IV 2018.

Perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru diperkirakan mendorong konsumsi masyarakat. Pada periode tersebut, konsumsi masyarakat cenderung meningkat karena adanya kegiatan perayaan maupun liburan akhir tahun. Selain itu, strategi promosi yang umumnya diberikan pusat perbelanjaan melalui program diskon untuk mengejar target penjualan akhir tahun diperkirakan turut memicu konsumsi lebih tinggi. Peningkatan ini juga didorong oleh berlanjutnya kegiatan pembangunan infrastruktur swasta dan pemerintah yang diyakini mampu mendorong tingkat mobilisasi dan konsumsi masyarakat di Jawa Tengah.

Perkiraan peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2018 sesuai dengan optimisme konsumen yang tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, keyakinan konsumen berada pada level optimis, tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan IV 2018 (s.d November 2018) tercatat 129,23; lebih tinggi dari rata-rata IKK triwulan sebelumnya sebesar 126,37. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). IKE meningkat dari 116,57 menjadi 117,52, sedangkan IEK naik dari 136,16 menjadi 140,95 pada triwulan laporan. Meningkatnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi triwulan IV 2018 terutama didorong oleh menguatnya keyakinan atas ketersediaan lapangan kerja.

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga dikonfirmasi oleh pedagang eceran. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), di mana rata-rata indeks penjualan riil meningkat dari triwulan III 2018 sebesar 181,2, menjadi 184,2 pada triwulan IV 2018 (rata-rata s.d November 2018). Peningkatan ini terjadi pada

hampir seluruh kategori komoditas, kecuali barang budaya dan rekreasi, suku cadang dan aksesori, serta kelompok sandang.

Terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terkendali. Pada Oktober 2018, inflasi Jawa Tengah masih berada pada rentang sasaran $3,5\% \pm 1\%$, yaitu sebesar 3,15% (yoy) dan 2,13% (ytd). Namun demikian, tren kenaikan harga minyak dunia yang diikuti dengan meningkatnya harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan dapat mengganggu daya beli masyarakat, meskipun hingga saat ini tingkat inflasi Jawa Tengah masih relatif terkendali.

Pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) diperkirakan kembali menguat.

Kegiatan kampanye dalam rangka pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 yang telah dimulai sejak akhir triwulan III 2018 diperkirakan mendorong aktivitas lembaga nonprofit seperti ormas dan partai politik. Perayaan hari raya Natal juga diharapkan akan meningkatkan aktivitas lembaga sosial keagamaan pada akhir triwulan IV 2018.

Pada sisi pemerintah, konsumsi diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan IV 2018.

Konsumsi pemerintah akan digenjut untuk mengejar realisasi program di akhir semester II 2018, termasuk realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang penyerapannya sampai dengan triwulan III masih tergolong rendah. Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi Dana Desa baru mencapai 65% dari total anggaran, atau lebih rendah daripada realisasi Dana Desa pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 70%. Sementara, realisasi Dana Insentif Daerah pada tahun lalu telah mencapai 100% pada triwulan III. Berbeda kondisinya dengan realisasi tahun ini, yang baru mencapai 89% sampai dengan triwulan III 2018. Lebih lanjut, realisasi Bantuan Sosial

diperkirakan juga akan meningkat. Pemerintah secara nasional melakukan perluasan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai tahap III sebanyak 2,2 juta penerima di 59 Kabupaten/Kota, yang pencairannya direncanakan akan dimulai pada Oktober 2018. Pendapatan pemerintah pada tahun 2018 diperkirakan relatif baik, sehingga realisasi belanja pemerintah dapat lebih tinggi.

Kinerja investasi diprediksi masih tumbuh meningkat pada triwulan IV 2018. Kegiatan investasi masih menguat terutama disebabkan berlanjutnya penyelesaian investasi nonbangunan, sebagai contoh proyek investasi pembangkit listrik di Batang, Cilacap, dan Jepara. Proyek pembangkit listrik tersebut diperkirakan masih terus berlanjut, karena progress saat ini baru mencapai 58% dan ditargetkan dilakukan uji coba pada April 2019 (Unit I). Investasi nonbangunan masih cukup kuat, tercermin dari tingginya impor barang modal berupa mesin. Lebih lanjut, beberapa proyek infrastruktur masih berlanjut antara lain pembangunan Tol Trans Jawa (ruas Semarang-Demak, Kartosuro-Boyolali), Bandara Wirasaba (Bandara Jenderal Soedirman), perluasan Bandara Adi Sumarmo & Kereta Api Akses Bandara, serta KRL Solo-Yogyakarta. Hingga Oktober 2018, realisasi penyerapan anggaran untuk progress fisik mencapai 76,29%, masih lebih rendah dibanding target penyerapan progress fisik periode Oktober sebesar 87,61%. Namun demikian, berlanjutnya ketidakpastian kondisi ekonomi global perlu diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap perilaku investasi oleh swasta yang akan cenderung *wait and see*.

Pertumbuhan ekspor luar negeri pada triwulan IV 2018 diperkirakan mengalami peningkatan, meskipun terbatas. Optimisme terhadap pertumbuhan ekspor didorong oleh menguatnya

pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat (AS). Perekonomian AS berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jawa Tengah, dengan pangsa ekspor mencapai 31,84%. Data ekspor Jawa Tengah yang dirilis BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor di triwulan IV 2018 (data s.d Oktober) sebesar 9,52% (yoy), sedikit melambat dari triwulan III 2018 yang tumbuh 9,75% (yoy). Berdasarkan informasi anekdotal, ekspor produk TPT yang menjadi salah satu penyumbang utama ekspor luar negeri Jateng (pangsa 48,86%), biasanya akan kembali menguat pada triwulan IV. Hal tersebut seiring dengan masuknya musim dingin, karena produk musim dingin cenderung memiliki nilai yang lebih mahal.

Namun demikian, risiko ketidakpastian ekonomi global cenderung meningkat di tengah perekonomian global yang tumbuh melandai dan tidak merata. Kondisi perekonomian negara mitra dagang utama Jawa Tengah lainnya yaitu Eropa dan Tiongkok cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, ditambah dengan risiko memburuknya ketegangan perdagangan antarnegara, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan volume ekspor Jateng. Pangsa ekspor ke Eropa dan Tiongkok masing-masing sebesar 14,79% dan 8,29%. Lebih lanjut, terdapat beberapa risiko eksternal lain yang perlu diwaspadai, yaitu: (i) berlanjutnya kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) secara gradual, yang diikuti pengetatan kebijakan moneter beberapa negara; (ii) memburuknya hubungan dagang antarnegara, terutama AS dan Tiongkok; serta (iii) pelemahan mata uang, termasuk rupiah, di tengah berlanjutnya penguatan dolar AS secara global. Meningkatnya ketidakpastian global berpotensi mendorong perlambatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Di samping

itu, ketatnya tekanan kompetisi dengan Vietnam juga masih harus diantisipasi sebagai faktor penahan pertumbuhan ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah, seperti tekstil dan produk tekstil serta barang kayu.

Impor luar negeri diperkirakan kembali menguat pada triwulan IV 2018. Impor nonmigas diperkirakan masih tumbuh kuat pada triwulan IV, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal dalam rangka mendukung kegiatan investasi. Lebih lanjut, meningkatnya ekspor luar negeri dan permintaan domestik pada akhir tahun diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kenaikan permintaan bahan baku impor. Berdasarkan data impor Jawa Tengah yang dirilis BPS, impor nonmigas pada triwulan IV 2018 (data s.d Oktober) tumbuh sebesar 56,77% (yoy), atau sedikit melambat dari triwulan III 2018 yang tumbuh 58,49% (yoy). Sementara perlambatan yang lebih dalam pada triwulan IV (data Oktober) terjadi pada impor migas, yaitu tumbuh 21,91% (yoy). Implementasi kebijakan penggunaan campuran biodiesel 20% (B20) diperkirakan mulai berdampak dalam pengendalian impor migas. Impor migas cukup signifikan terhadap impor luar negeri Jateng, mengingat komponen migas memegang pangsa $\pm 39\%$ dari total impor Jawa Tengah, yang ditujukan untuk memenuhi industri pengilangan minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

1.2.2. *Tracking* Perkembangan Ekonomi Triwulan IV 2018 Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, percepatan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 diperkirakan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Adapun penahan pertumbuhan pada triwulan IV 2018 berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan. Kinerja industri pengolahan yang memiliki pangsa terbesar, yaitu lebih dari 30%, diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2018 seiring dengan peningkatan permintaan domestik di akhir tahun. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan turut meningkat. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan mundurnya musim tanam (MT) III 2018 akibat pengaruh musim kemarau panjang. Hal tersebut diprediksi akan mendorong mundurnya musim panen menjadi berlangsung pada triwulan I 2019.

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan diprediksi meningkat pada triwulan IV 2018 seiring dengan pola musiman berupa peningkatan permintaan domestik di akhir tahun. Pelaku usaha diperkirakan akan mendorong kegiatan produksinya seiring dengan upaya pemenuhan target produksi akhir tahun, serta dalam rangka mengantisipasi permintaan ekspor sebelum memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan kegiatan usaha industri pengolahan diindikasikan oleh penyaluran kredit perbankan ke sektor ini yang tercatat membaik menjadi kontraksi 2,73% (yoy), atau tidak sedalam kontraksi 4,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat diproyeksikan mendorong permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah, sehingga akan mendukung pertumbuhan kinerja industri pengolahan. Meskipun demikian, meningkatnya risiko ketegangan perdagangan antarnegara perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan terganggunya pemulihan ekonomi dunia, yang selanjutnya dapat menghambat transaksi perdagangan global. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap daya saing produk hasil industri Jawa Tengah di pasar domestik dan luar negeri.

Berdasarkan hasil *liaison*, tantangan yang juga perlu diwaspadai menjadi penghambat pertumbuhan industri yaitu persaingan pasar yang semakin ketat khususnya dengan negara Vietnam di industri tekstil dan barang kayu. Industri mebel di Vietnam yang cenderung bersifat masal mendorong hasil produksinya memiliki harga jual yang lebih rendah. Selain itu, di industri tekstil yang bersifat padat modal, permesinan yang digunakan oleh industri tekstil di Jawa Tengah mayoritas berusia di atas 20 tahun, sehingga kalah efisien dengan teknologi permesinan yang digunakan oleh negara kompetitor. Lebih lanjut, berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh tekanan eksternal dinilai dapat memberatkan industri yang berkonten impor tinggi namun berorientasi pasar domestik, seperti industri farmasi dan obat tradisional serta industri tekstil yang banyak di Jawa Tengah.

Sejalan dengan kinerja industri pengolahan, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan juga mengalami perbaikan pada triwulan IV 2018. Permintaan masyarakat pada akhir tahun diperkirakan kembali meningkat, didorong oleh faktor musiman berupa kegiatan libur pada akhir tahun. Lebih lanjut, pemberian diskon yang secara umum diberikan oleh pusat perbelanjaan pada momen Natal dan Tahun Baru ditengarai turut menstimulasi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha ini. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia berupa indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencerminkan adanya peningkatan optimisme rumah tangga yaitu sebesar 129,23 (rata-rata triwulan IV s.d November 2018); lebih tinggi dari rata-rata IKK triwulan sebelumnya sebesar 126,37.

Pelaku usaha lapangan usaha ini pun memperkirakan adanya perbaikan pertumbuhan. Hal tersebut tercermin dari hasil SKDU untuk kegiatan usaha sektor perdagangan yang mencatatkan peningkatan.

Perkiraan SBT kegiatan usaha sektor perdagangan di triwulan IV 2018 sebesar 3,25%; lebih tinggi dibandingkan realisasi SBT triwulan III yang tercatat 1,53%. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran di Jawa Tengah juga tercatat mengalami perbaikan, dari tumbuh 10,35% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi tumbuh 11,33% (yoy) di triwulan laporan (data Oktober), yang didorong perbaikan kredit modal kerja dan investasi. Namun demikian, berlanjutnya tren kenaikan harga minyak dunia yang diikuti dengan peningkatan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan dapat mengganggu daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan. Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, antara lain: (i) peningkatan konektivitas seiring dengan telah selesainya proyek jalan tol di beberapa ruas di Jawa Tengah; (ii) inflasi yang rendah dan terkendali; serta (iii) adanya penyaluran stimulus fiskal seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa.

Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi melambat dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan IV 2018, seiring dengan berakhirnya masa panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dari musim tanam II 2018 pada bulan September 2018. Selanjutnya, fenomena musim kemarau yang berlangsung lebih panjang diperkirakan akan berpengaruh terhadap mundurnya MT III 2018, sehingga musim panen juga akan mundur menjadi berlangsung di triwulan I 2019. Curah hujan yang rendah menyebabkan lahan pertanian berpotensi bera atau tidak bisa ditanami untuk musim tanam berikutnya. Hasil survei produksi beras dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan bahwa luas panen dan hasil produksi padi di Jawa Tengah

diperkirakan akan mencapai titik terendah pada triwulan IV 2018. Perlambatan kegiatan usaha pertanian juga terindikasi dari penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian Jawa Tengah. Pada triwulan IV 2018 (data Oktober), penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian tumbuh melambat menjadi 0,13% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2018 (1,57%; yoy).

Berdasarkan monitoring BMKG terhadap distribusi hujan di musim kemarau, peluang turun hujan sangat kecil diperkirakan sampai dengan bulan Agustus dan September. BMKG juga mengkonfirmasi adanya fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat pada Oktober 2018 hingga Februari 2019, yang ditandai dengan mundurnya periode musim hujan selama 10-30 hari dari periode normalnya. BMKG memprakirakan awal musim hujan akan berlangsung bervariasi di Jateng antara bulan Oktober hingga awal Desember 2018, sehingga diperkirakan musim tanam selanjutnya (MT III 2018) secara umum akan mundur. Hal ini mendorong potensi terjadinya kekeringan lahan pertanian di beberapa daerah seperti Kab. Wonogiri, Sragen, dan Sukoharjo yang masuk kategori kekeringan ekstrim. Sementara puncak musim hujan 2018/2019 di sebagian besar wilayah Jateng diperkirakan baru akan berlangsung pada Januari 2019.

Penyusunan Roadmap Upaya Penurunan Defisit Neraca Transaksi Berjalan Di Jawa Tengah Dengan Pendekatan Growth Strategy

SUPLEMEN I

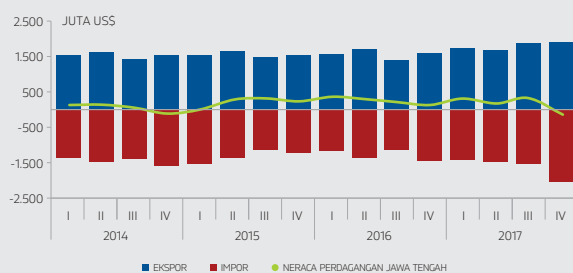
I. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sebelum krisis 1998 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Bank Dunia bahkan mengkategorikan Indonesia sebagai “*New Industrialized Economies*” (NIEs) pada tahun 1993 bersama dengan Malaysia dan Thailand. Krisis moneter 1998 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 13,1% yang diikuti pertumbuhan negatif di hampir semua lapangan usaha. Setelah krisis 1998, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di kisaran rata-rata 5% per tahun, yang terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja dan daya saing industri di hampir semua sektor. Pada saat yang sama, Indonesia justru memperoleh bonus demografi, dimana dua per tiga dari total penduduk merupakan angkatan kerja yang berusia muda. Peningkatan *middle income class* di Indonesia saat ini belum diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha sehingga peningkatan *domestic demand* tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Konsumen kelas menengah dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik akan cenderung pula meminta produk-produk yang lebih berkualitas, bernilai tambah dan terdiferensiasi tinggi. Akibatnya terjadi

impor barang konsumsi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan tersebut yang berpotensi menyebabkan *current account deficit*.

Neraca perdagangan Indonesia yang telah mengalami defisit sejak tahun 2011, tidak terlepas dari kinerja ekspor Jawa Tengah yang relatif stagnan dalam 1 (satu) dekade terakhir. Tingginya rasio ekspor nasional yang bertumpu pada komoditas alam menyebabkan tingginya kerentanan akibat fluktuasi permintaan yang sangat terpengaruh pada dinamika perekonomian global. Selain itu, rendahnya pangsa industri pengolahan di dalam negeri menjadi salah satu penyebab tingginya rasio ekspor barang primer serta tingginya impor barang sekunder untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Terkait hal tersebut, perlu disusun suatu kajian yang fokus pada upaya mendorong kinerja sektor/industri utama yang ada untuk dapat mendukung ekspor dan penyerapan tenaga kerja, sehingga secara implisit dapat dilihat dampak pada penurunan defisit transaksi berjalan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Bank Indonesia senantiasa menyusun kajian dalam mendukung rekomendasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pelaku usaha sehingga dapat mendukung pengembangan industri strategis di daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

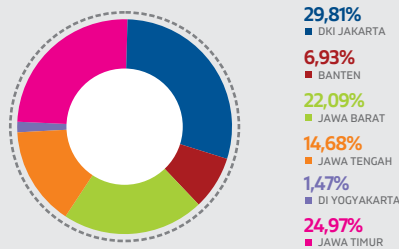


SUMBER: BPS, 2018 (DIOLAH)

Grafik 1. Perkembangan Neraca Perdagangan Jawa Tengah

SUPLEMEN I

II. Perekonomian Daerah

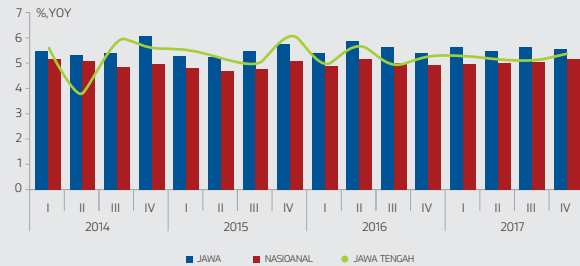


Grafik 2. Pangsa PDRB Jawa Berdasarkan Provinsi

SUMBER: BPS, DIOLAH

Dari sisi perekonomian, Jawa Tengah merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah menyumbang 8,59% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan berada di urutan keempat terbesar setelah DKI Jakarta (17,43%), Jawa Timur (14,61%), dan Jawa Barat (12,92%). Namun demikian sejak 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi tetangganya, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara tahunan, PDRB total Provinsi Jawa Tengah tumbuh melambat selama lima tahun terakhir, serta cenderung stabil pada tahun 2017. Meskipun tertahan, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,07% (yoy). Pada tahun 2017, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau sama dengan pertumbuhan pada 2016.

Industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar Provinsi Jawa Tengah dengan share sekitar 34,82%. Lebih rinci, industri pengolahan

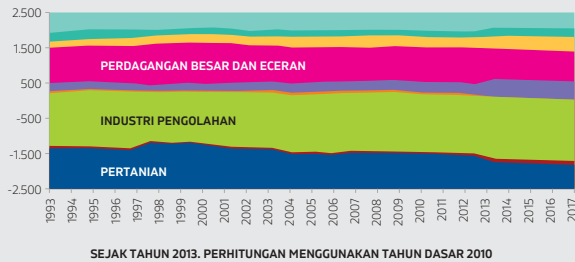


Grafik 3. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah, Pulau Jawa, dan Nasional

SUMBER: BPS, DIOLAH

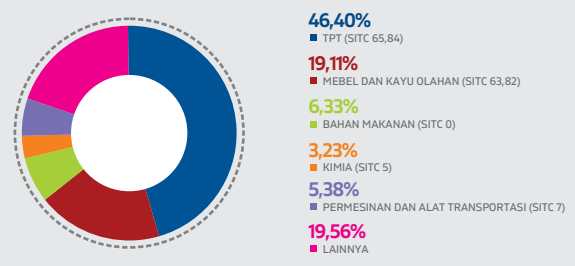
di Jawa Tengah didominasi oleh industri minyak dan gas serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Selama tahun 2017, pertumbuhan industri pengolahan tercatat 4,35% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,10% (yoy) pada tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri barang logam dan barang elektronik, industri logam dasar sebesar, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 7,01% (yoy). Sementara itu, melambatnya kinerja industri pengilangan migas, menjadi penahan laju pertumbuhan industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi pada tahun 2017. Selanjutnya, walaupun pangsa jauh lebih kecil dibandingkan kedua industri sebelumnya, industri tekstil dan pakaian jadi serta industri kayu dan barang dari kayu juga merupakan industri utama Jawa Tengah. Kedua industri tersebut merupakan penyumbang ekspor terbesar. Ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil memberikan sumbangan 45,91% terhadap keseluruhan ekspor nonmigas Jawa Tengah, sementara ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu menyumbang 22,32% pada tahun 2017.

SUPLEMEN I

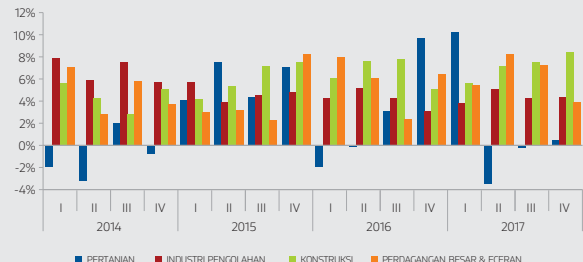


Grafik 4. Struktur Perekonomian Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil analisis potensi dan daya saing ekspor daerah (analisis *Product Space, Revealed Comparative Advantage, Ekspor-Impor, Pertumbuhan Ekspor*) dapat diambil kesimpulan bahwa industri utama di Jawa Tengah yang memiliki keunggulan komparatif dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi serta ekspor Jawa Tengah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri barang dari kayu (furnitur), serta industri makanan-minuman (khususnya produk pengolahan perikanan). Analisis yang lebih spesifik juga dilakukan dengan metode *Dynamic RCA* dan perbandingan RSCA dan TBI⁴ pada komoditas ekspor SITC 4 digit untuk melihat komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, potensi permintaan dunia yang tinggi serta memiliki neraca perdagangan yang surplus.

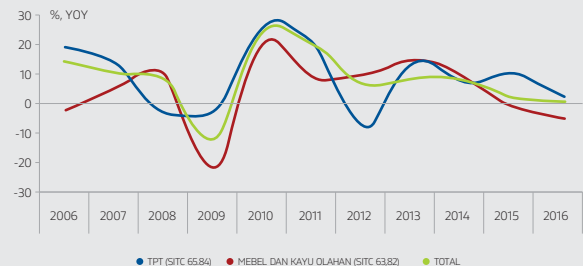


Grafik 6. Pangsa Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah berdasarkan Komoditas



Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Utama Jawa Tengah

Selanjutnya berdasarkan analisis *Dynamic RCA*, dan perbandingan RSCA dan TBI, diketahui bahwa untuk industri tekstil dan produk tekstil, komoditas unggulannya adalah kelompok produk garmen atau pakaian jadi yang sentra produksinya berada di kawasan Semarang dan Solo Raya. Selanjutnya, komoditas unggulan ekspor untuk industri barang dari kayu adalah barang-barang furnitur khususnya yang bersifat pelengkap (komplementer) pada produk-produk otomotif, kedokteran, dan elektronik. Sementara itu, komoditas unggulan untuk produk makanan dan minuman adalah produk-produk olahan perikanan seperti tepung ikan dan *nugget* ikan.



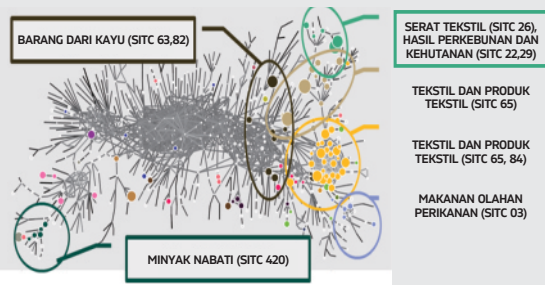
Grafik 7. Pertumbuhan Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah

4. Keterangan: RSCA : Revealed Comparative Advantage. TBI : Trade Balance Index



SUPLEMEN I

III. Hasil Analisis

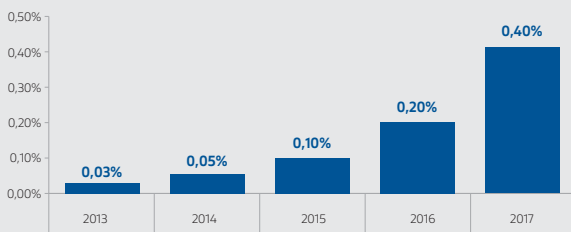


SUMBER: BEA CUKAI, COGNOS, DIOLAH

Grafik 8. Product Space Jawa Tengah tahun 2016

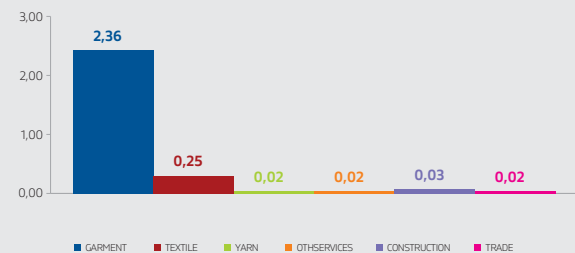
Industri unggulan di Jawa Tengah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri barang dari kayu, serta industri makanan minuman. Ketiga industri tersebut mencatatkan neraca perdagangan yang positif di Jawa Tengah, serta memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya. Mengacu pada keunggulan tersebut, diharapkan ketiga industri tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan defisit neraca pembayaran nasional.

Analisis *trade competitiveness diagnostic* berhasil mengidentifikasi kekuatan daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perdagangan dilihat dari tiga aspek utama yakni akses pasar, faktor input di sisi penawaran dan infrastruktur



Grafik 9. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil terhadap Perkembangan PDRB Jawa Tengah

pendukung promosi perdagangan. Dengan mengacu pada informasi yang dihimpun melalui FGD⁵ dan informasi anekdotal dapat disimpulkan bahwa daya saing tiga industri utama Jawa Tengah relatif baik namun mengalami peningkatan risiko kompetisi dari negara di kawasan ASEAN khususnya Vietnam. Sementara itu, di sisi infrastruktur pendukung juga dinilai baik dimana terlihat adanya dukungan pemerintah melalui pembentukan kawasan industri di kawasan Semarang dan Solo Raya yang sudah berkembang, serta kawasan industri baru yang direncanakan akan dibangun di daerah Kendal. Pembangunan kawasan industri di daerah tersebut juga didukung oleh revitalisasi infrastruktur perhubungan khususnya perluasan Pelabuhan Tanjung Mas di kota Semarang dan perluasan Pelabuhan Kendal sebagai sarana distribusi barang untuk ekspor-impor antar daerah. Tantangan daya saing terbesar terletak pada faktor input di sisi penawaran yakni terkait dukungan modal (kapital) yang masih belum kuat, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja ahli, dan masih rendahnya produktivitas industri akibat penggunaan teknologi yang masih rendah.

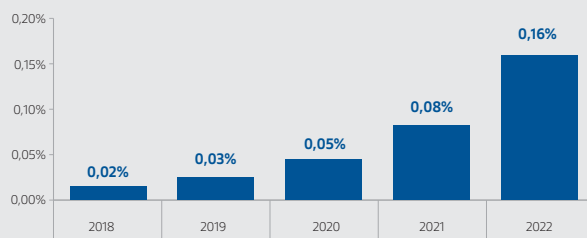


Grafik 10. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil terhadap Perkembangan Sektor PDRB

5. FGD dilakukan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, industri atau pelaku usaha utama, serta asosiasi industri-industri seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia

SUPLEMEN I

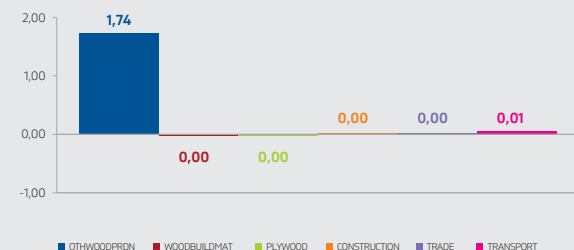
Hasil simulasi dengan menggunakan model INDOTERM CGE⁶ menunjukkan bahwa intervensi pada subsektor industri TPT memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 0,16% rata-rata per tahun di atas *baseline no policy*. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja berpotensi mengalami peningkatan sebesar 0,05% per tahun. Sementara itu, dampak terhadap volume ekspor yaitu 1,06% per tahun. Model CGE menunjukkan akselerasi *output* pada industri garmen, tekstil, dan produk benang & serat tekstil. Lapangan usaha perdagangan dan konstruksi juga mengalami peningkatan yang diperkirakan didorong oleh meningkatnya investasi lini produksi TPT serta aktivitas logistik industri TPT. Selanjutnya model juga menunjukkan peningkatan (akselerasi) ekspor di Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi semula (tanpa kebijakan), khususnya pada produk garmen sebagai produk hilir industri TPT. Sementara itu ekspor produk tekstil dan serat tekstil justru menunjukkan penurunan volume ekspornya. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh penyerapan produk tekstil dan serat tekstil untuk mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas produksi industri



Grafik 11. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Kayu dan Barang dari Kayu terhadap Perkembangan PDRB Jawa Tengah

hilir TPT yaitu produk garmen. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah lapangan usaha perdagangan, khususnya komoditas jasa ekspedisi dan pengiriman (*shipping*) yang perlu didorong untuk mendukung kegiatan ekspor, sehingga pemenuhan kebutuhan jasa tersebut tidak bergantung pada jasa ekspedisi luar negeri (impor jasa).

Hasil simulasi dengan menggunakan model INDOTERM CGE menunjukkan bahwa intervensi pada subsektor industri furnitur memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 0,07% rata-rata per tahun di atas *baseline no policy*. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja berpotensi mengalami peningkatan sebesar 0,03% per tahun. Sementara itu, dampak terhadap volume ekspor yaitu 0,07% per tahun. Hasil simulasi kebijakan subsektor Kayu dan Barang dari Kayu menunjukkan peningkatan (akselerasi) PDRB di Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi semula (tanpa kebijakan), khususnya pada lapangan usaha industri furnitur. Selanjutnya model juga menunjukkan peningkatan (akselerasi) ekspor di Jawa Tengah dibandingkan dengan



Grafik 12. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Kayu dan Barang dari Kayu terhadap Perkembangan Sektor PDRB

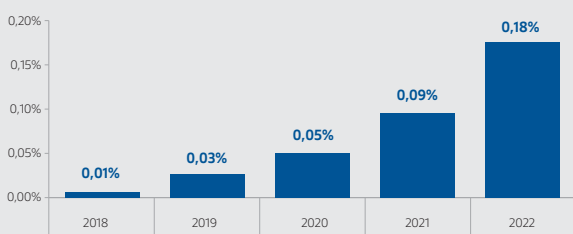
6. Model INDOTERM Multiregional Computable General Equilibrium yang dibangun oleh Bappenas, CoPS Australia, CEDS UNPAD, ADB dan USAID.

SUPLEMEN I

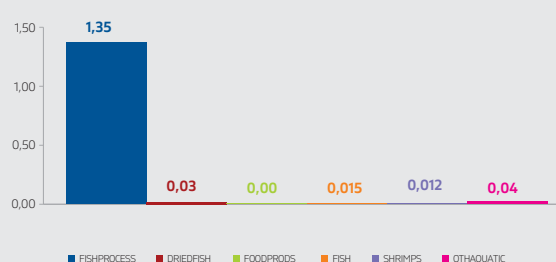
kondisi semula (tanpa kebijakan), khususnya pada produk furnitur. Sementara itu ekspor komoditas bahan material kayu (kayu papan, kayu lapis) dan bahan baku kayunya (kayu gelondong) justru menunjukkan penurunan volume ekspornya. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh penyerapan produk bahan baku kayu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas produksi industri furnitur.

Hasil simulasi dengan menggunakan model INDOTERM CGE menunjukkan bahwa intervensi pada subsektor industri makanan-minuman memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 0,09% rata-rata per tahun di atas *baseline no policy*. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja berpotensi mengalami peningkatan sebesar 0,02% per tahun. Sementara itu, dampak terhadap volume ekspor yaitu 0,05% per tahun. Hasil simulasi kebijakan subsektor Makanan Minuman menunjukkan peningkatan (akselerasi) PDRB di Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi semula (tanpa kebijakan), khususnya pada lapangan usaha Industri Pengolahan sub sektor Makanan Minuman. Model

CGE menunjukkan akselerasi *output* pada industri pengolahan produk perikanan (*fish processed*). Selanjutnya, *output* lini produksi hulu perikanan di antaranya industri penangkapan ikan, udang-udangan, kerang, rumput laut, dan lain-lain, juga mengalami peningkatan di dalam provinsi Jawa Tengah sendiri, untuk mendukung permintaan industri hilirnya. Selanjutnya model juga menunjukkan peningkatan (akselerasi) ekspor di Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi semula (tanpa kebijakan), khususnya pada produk produk olahan ikan sebagai produk hilir industri Makanan Minuman. Fenomena ini perlu menjadi perhatian, karena industri makanan minuman pengolahan perikanan merupakan industri yang termasuk kategori *resource based* dan sangat bergantung pada keunggulan komparatifnya yaitu jaminan kualitas serta jaminan kesinambungan pasokannya. Selanjutnya lini usaha ekspedisi dan pengiriman (*shipping*) juga perlu didorong untuk mendukung kegiatan ekspor, sehingga pemenuhan kebutuhan jasa tersebut tidak dipenuhi oleh jasa ekspedisi luar negeri (impor jasa).



Grafik 13. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Makanan Minuman terhadap Perkembangan PDRB Jawa Tengah



Grafik 14. Hasil Simulasi Kebijakan Subsektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil terhadap Perkembangan Sektor PDRB



KEUANGAN PEMERINTAH

Postur APBDp Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Seiring dengan peningkatan penganggaran pendapatan, belanja daerah juga dianggarkan meningkat lebih tinggi, yang menyebabkan peningkatan defisit pada tahun ini.

- Peningkatan realisasi pendapatan pada triwulan laporan utamanya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah, antara lain penerimaan pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya Pemda untuk lebih mandiri dengan meningkatkan komponen PAD dari sisi pajak daerah.
- Peningkatan realisasi belanja utamanya berasal dari meningkatnya belanja langsung pada komponen belanja barang dan jasa, sesuai dengan pola historisnya.
- Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di berbagai departemen utama sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Pada triwulan laporan, realisasi APBN utamanya untuk belanja pegawai dan penyaluran Dana Desa, mengejar target penyaluran tahap I (sebesar 60%) paling lambat pada Juli 2018.



2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2018

Anggaran pendapatan APBD⁷ Provinsi Jawa Tengah pada 2018 mengalami peningkatan 3,83% dibandingkan tahun anggaran 2017, atau meningkat dari Rp23,6 triliun menjadi Rp24,5 triliun. Peningkatan ini utamanya didorong oleh peningkatan target Pajak Daerah, seiring dengan gencarnya upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat, mengoptimalkan penerapan e-tax untuk hotel dan melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) sejak awal tahun laporan. Secara spesifik, dalam APBDp 2018, penyesuaian komponen lain-lain PAD yang sah ditargetkan meningkat Rp102 miliar.

Seiring dengan peningkatan penganggaran pendapatan, belanja daerah juga dianggarkan meningkat, dari Rp24 triliun menjadi Rp25,4 triliun atau naik 5,88%. Prioritas penggunaan ditujukan pada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor pendidikan. Secara spesifik, dalam APBDp 2018, penyesuaian belanja dilakukan untuk pengadaan tanah ruas Banjarsari – Salem yang tertimpa bencana tanah longsor dan alokasi penanganan sarana dan prasarana irigasi untuk mengatasi banjir. Selain itu, penyesuaian alokasi belanja juga ditujukan untuk pengadaan alat laboratorium bagi SMA/SMK dan pengembangan sistem Jateng Online.

Secara keseluruhan, anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan berdampak pada pelebaran defisit anggaran pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp846 miliar, dibandingkan defisit Rp342 miliar pada 2017.

2.2. REALISASI APBD TRIWULAN III 2018

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran, persentase realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III 2018 mencapai 76,93% dari APBDp 2018, meningkat dibandingkan serapan pendapatan triwulan III 2017 yang sebesar 71,69%. Sejalan, realisasi belanja hingga triwulan III 2018 naik cukup pesat sebesar 61,26% dari APBDp 2018, lebih baik dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 55,67% dari APBD 2017.

Peningkatan realisasi pendapatan bersumber dari PAD, utamanya realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tercatat melebihi target. Realisasi belanja mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 19,45% dari Rp13,0 triliun pada triwulan III 2017 menjadi Rp15,5 triliun. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan utamanya didorong oleh realisasi pada komponen belanja langsung (belanja barang dan jasa).

Biro Keuangan Pemrov Jateng pada triwulan III 2018 mencatatkan surplus sebesar Rp3,3 triliun.

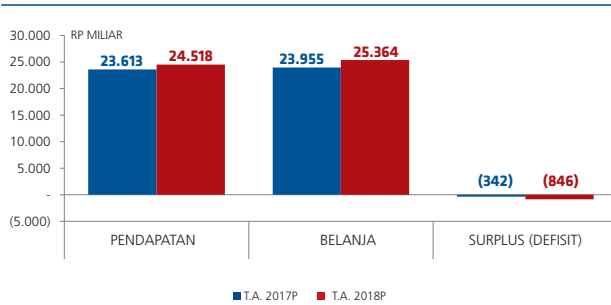
Surplus ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang mencapai Rp3,8 triliun yang disebabkan oleh pertumbuhan realisasi belanja yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan realisasi pendapatan.

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2018 (Rp Miliar)

URAIAN	APBD P 2018	REALISASI TW III 2018	% REALISASI
PENDAPATAN	24.518	18.862	76,93%
PAD	13.100	10.029	76,56%
DANA PERIMBANGAN	11.363	8.783	77,29%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	55	50	90,91%
BELANJA	25.364	15.537	61,26%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.260	11.843	64,86%
BELANJA LANGSUNG	7.104	3.694	52,00%
SURPLUS/DEFISIT	(846)	3.325	

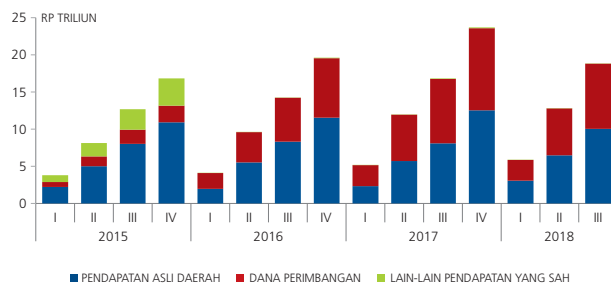
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

7. APBDp merupakan APBD Perubahan.



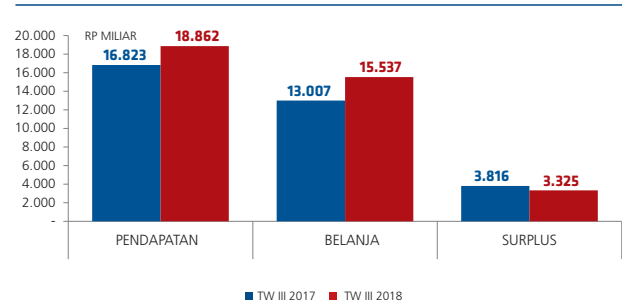
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2017 dan T.A. 2018



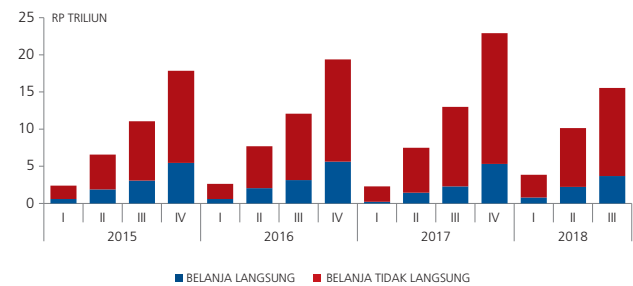
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan III 2017 & 2018



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan III 2018

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III 2018 sebesar 76,93%. Peningkatan persentase realisasi ini terjadi pada hampir seluruh komponen dalam PAD, Dana Perimbangan (Daper), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sumber utama PAD masih berasal dari komponen Pajak Daerah (81,85% dari total PAD), kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah (12,81% dari PAD) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (4,59% dari PAD). Realisasi pajak daerah mampu mencapai 75,73% dengan nominal Rp8,21 miliar, meningkat dibandingkan realisasi triwulan yang sama pada tahun lalu yaitu 73,03% dengan nominal Rp7,43 miliar.

Pencapaian realisasi pajak daerah yang baik ini searah dengan upaya Pemprov Jateng untuk memaksimalkan PAD melalui sektor pajak, antara lain: i) sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak khususnya untuk menjaring potensi penerimaan pajak dari 3,5 juta

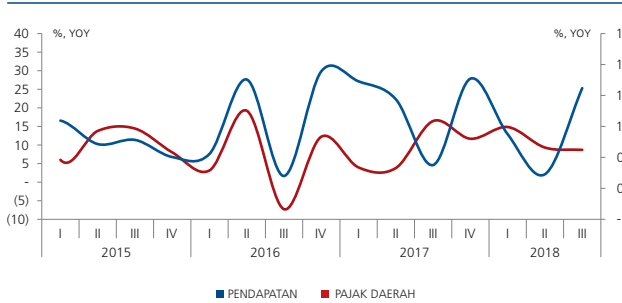
kendaraan bermotor yang belum membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya; ii) pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat, yaitu undian untuk WP yang membayar PKB.

Berdasarkan perannya terhadap total Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi pemasukan utama pajak daerah, dengan peran

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan III Tahun 2017 & 2018

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW III -2017	TW III -2018
PENDAPATAN	71,69%	76,93%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,77%	76,56%
PAJAK DAERAH	73,03%	75,73%
RETRIBUSI DAERAH	75,93%	69,44%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	101,96%	102,45%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	17,80%	75,46%
DANA PERIMBANGAN	75,74%	77,29%
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	79,17%	95,81%
DANA ALOKASI UMUM	80,72%	83,33%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	72,51%	71,42%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	78,66%	90,91%
HIBAH	48,35%	72,73%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS		
DANA INSENTIF DAERAH	100,00%	103,03%
PENDAPATAN LAINNYA		

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

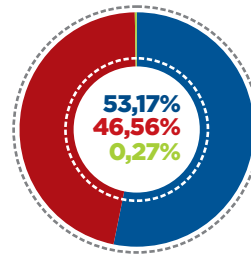
Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah

masing-masing sekitar 35% dan 30% di tiap tahunnya. Selanjutnya, Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menyumbang masing-masing 15%-20%.

Persentase realisasi komponen PAD lain seperti lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami peningkatan. Walaupun realisasi pendapatan dari lain-lain PAD yang sah memang cukup baik, persentase realisasinya naik signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya *base-year effect*.

Secara keseluruhan, peningkatan rasio pangsa PAD terhadap total pada triwulan III 2018 ini berimplikasi pada peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) menjadi sebesar 53,17% meningkat dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 48,21%. DOF yang meningkat mengindikasikan membaiknya kemandirian fiskal Pemprov Jateng, karena mayoritas pendapatan masih bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sementara itu, pangsa Dana Perimbangan (Daper) terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi 46,56% pada triwulan III 2018 dari sebelumnya 51,39% pada triwulan III 2017. Hal ini didorong oleh realisasi PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi Daper. **Berdasarkan komponen Daper, sumber pendapatan terutama berasal dari Dana Alokasi Khusus/DAK (54,94% dari total Daper), diikuti oleh Dana Alokasi**



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.6 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan III 2018

Umum/DAU (34,66%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (10,41%).

Dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, nominal realisasi komponen DAK dan DAU relatif sama. Realisasi pendapatan DAK pada triwulan laporan ini sebanyak Rp4,83 triliun, meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun 2017 yang sebesar Rp4,89 triliun. Komponen DAK ini diarahkan untuk penyaluran BOS seiring dengan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat menengah atas kepada provinsi. Selain itu, DAK ini juga dialokasikan untuk kebutuhan biaya tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah/PNSD, yang kini juga telah menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng. Realisasi DAU pada triwulan III 2018 juga relatif stabil sebesar Rp3,04 triliun dari Rp2,98 triliun di triwulan III 2017. Realisasi pendapatan DBH mengalami peningkatan menjadi Rp914 miliar di triwulan laporan dibandingkan Rp848 miliar pada triwulan yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp50 miliar atau terealisasi sebesar 90,91% karena dana insentif daerah sudah mulai dicairkan sejak triwulan lalu.

2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan III 2018

Pada triwulan III 2018, realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15,54 triliun atau 61,26% dari total anggaran belanja 2018 sebesar Rp25,36 triliun. Angka

realisasi ini meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2017 sebesar 55,67%.

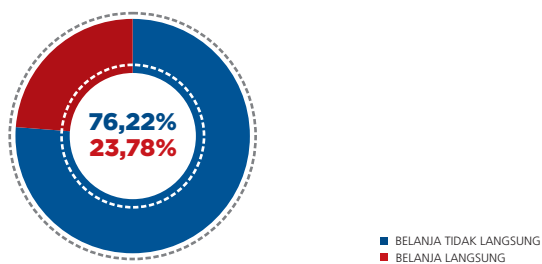
Meningkatnya realisasi belanja terutama didorong oleh komponen belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung, serta peningkatan realisasi belanja hibah pada kelompok belanja tidak langsung.

Komponen Belanja Langsung mengalami peningkatan persentase realisasi dari 38,27% di triwulan III 2017 menjadi 52,00% di triwulan III 2018. Seluruh komponen belanja langsung mencatatkan peningkatan realisasi. Pendorong realisasi belanja langsung utamanya adalah realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp2,52 triliun (56,19% dari total anggaran belanja barang dan jasa) di triwulan III 2018, dibandingkan realisasi belanja di triwulan III 2017 sebesar Rp1,53 triliun (42,32% dari total anggaran belanja barang dan jasa). Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di level pusat yang meningkat di triwulan laporan, salah satunya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Penyerapan belanja pegawai yang mencapai Rp 4,2 triliun utamanya ditujukan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dan pensiunan pada Juli 2018. Sementara itu, realisasi Belanja Modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp713 miliar, atau terserap 38,05% dari total anggaran belanja modal. Persentase

ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terserap sebesar Rp533 miliar atau 28,83%. Berdasarkan pola historisnya selama 5 tahun terakhir, sebagian besar belanja modal (>50% dari total anggaran belanja modal) baru akan terealisasi pada triwulan III dan IV tahun pelaporan, ketika vendor telah mengajukan tagihan.

Komponen Belanja Tidak Langsung juga mencatatkan penyerapan yang lebih baik dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Seluruh komponen kecuali belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota mencatatkan peningkatan realisasi.

Realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan utamanya dalam rangka penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan Program Keluarga Harapan. Hingga Agustus 2018, realisasi penerima hibah di berbagai bidang meliputi (i) bidang pendidikan Rp550 juta; (ii) bidang keagamaan Rp4,150 miliar; (iii) bidang pendidikan umum Rp2,605 miliar, (iv) bidang kebudayaan Rp730 juta; (v) kepemudaan dan olahraga nonprofesional Rp4,857 miliar, (vii) pertanian dan perkebunan Rp25,137 miliar; (viii) lingkungan hidup Rp165 juta, serta (ix) bidang peternakan Rp6,350 miliar. Sementara, bansos meliputi (i) bidang kesehatan Rp2,605 miliar; (ii) energi Rp11,333 miliar, (iii) bantuan sosial untuk siswa miskin Rp10 miliar, dan bantuan keuangan Rp603,687 miliar.



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan III 2018

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan III 2017 & 2018

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW III -2017	TW III -2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG	61,65%	64,86%
BELANJA PEGAWAI	68,11%	69,87%
BELANJA HIBAH	77,19%	77,86%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	6,42%	35,42%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	59,50%	63,04%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	18,25%	16,61%
BELANJA TDK TERDUGA	0,98%	40,00%
BELANJA LANGSUNG	38,27%	52,00%
BELANJA PEGAWAI	43,84%	61,85%
BELANJA BARANG DAN JASA	42,32%	56,19%
BELANJA MODAL	28,83%	38,05%
JUMLAH BELANJA	55,67%	61,26%

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Realisasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan menjadi Rp2,89 triliun, menunjukkan semakin baiknya kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing Kabupaten/ Kota di tahun lalu.

2.3. STRUKTUR APBN PROVINSI JAWA TENGAH 2018

Secara keseluruhan, struktur APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan di tengah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan transfer ke daerah baik melalui DAK ataupun Dana Desa. Peningkatan transfer ke daerah diharapkan berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat desa. Tercatat, terjadi kenaikan anggaran APBN sebesar 3,97% dari sebelumnya Rp47,79 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp49,69 triliun di tahun 2018. APBN Provinsi Jateng ini dialokasikan di 57 dinas/kementerian terkait.

Berdasarkan penerima utama pagu APBN, baik 2017 maupun 2018, 10 Kementerian/Lembaga (K/L) utama menyerap pagu anggaran masing-masing 90,15% pada 2017, dan menurun sedikit menjadi 88,26% pada 2018. Kenaikan pagu APBN khususnya meningkat signifikan untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkat 49,18% menjadi Rp4,44 Triliun; KPU meningkat 372,98% menjadi Rp1,49 Triliun; dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meningkat 313,17% menjadi Rp552,73 miliar. Peningkatan pagu pada instansi tersebut sejalan dengan pengerjaan berbagai proyek infrastruktur (tol, perluasan bandara) di Jawa Tengah; pelaksanaan pilkada serentak di 35 Kabupaten/Kota pada Juni 2018 yang lalu; dan arahan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.4 Pagu APBN berdasarkan Kementerian/Lembaga Penerima Utama Tahun 2017 dan 2018

NAMA DEPARTEMEN	2017		2018	
	PAGU (MILIAR RP)	PANGSA	PAGU (MILIAR RP)	PANGSA
BENDAHARA UMUM NEGARA	10.367	21,69%	10.061	20,13%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.712	16,14%	7.275	14,56%
KEMENTERIAN AGAMA	7.707	16,13%	6.754	13,52%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.978	8,32%	4.444	8,89%
KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.275	6,85%	4.169	8,34%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.979	6,23%	3.182	6,37%
KEMENTERIAN KESEHATAN	2.921	6,11%	2.933	5,87%
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.466	5,16%	2.403	4,81%
KEMENTERIAN PERTANIAN	1.048	2,19%	1.493	2,99%
KEMENTERIAN KEUANGAN	630	1,32%	1.143	2,29%
KEMENTERIAN/ DINAS LAINNYA	4.710	9,85%	6.114	12,24%
TOTAL	47.793		49.969	

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi

BERDASARKAN FUNGSI	2016		2017		2018	
	PAGU (RP M)	PANGSA	PAGU (RP M)	PANGSA	PAGU (RP M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	1.567	4,7%	11.898	24,9%	12.994	26,0%
PERTAHANAN	3.104	9,3%	3.275	6,9%	3.182	6,4%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.230	15,7%	5.222	10,9%	5.456	10,9%
EKONOMI	7.858	23,6%	11.344	23,7%	12.236	24,5%
LINGKUNGAN HIDUP	552	1,7%	661	1,4%	891	1,8%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	791	2,4%	1.039	2,2%	1.342	2,7%
KESEHATAN	3.270	9,8%	2.955	6,2%	3.407	6,8%
PARIWISATA DAN BUDAYA	8	0,0%	2	0,0%	15	0,0%
AGAMA	793	2,4%	772	1,6%	761	1,5%
PENDIDIKAN	10.015	30,1%	10.517	22,0%	9.571	19,2%
PERLINDUNGAN SOSIAL	115	0,3%	108	0,2%	114	0,2%
TOTAL	33.303		47.793		49.969	

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2016		2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA PEGAWAI	13.642	41,0%	14.693	30,7%	14.506	29,0%
BELANJA BARANG	11.562	34,7%	11.885	24,9%	14.403	28,8%
BELANJA MODAL	7.861	23,6%	10.607	22,2%	10.954	21,9%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	238	0,7%	241	0,5%	45	0,1%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	0,0%	3.983	8,3%	3.326	6,7%
DANA DESA	-	0,0%	6.384	13,4%	6.735	13,5%
TOTAL	33.303		47.793		49.969	

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah

Fokus alokasi pagu APBN 2018 telah sejalan dengan prioritas capaian Provinsi Jawa Tengah, antara lain untuk:

- Mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, antara lain melalui:
 - Penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Jateng yang meningkat menjadi Rp6,74 triliun di 2018, dibandingkan Rp6,3 triliun di 2017. Dana itu akan dialokasikan kepada 7.809 desa dimana setiap desa akan mendapatkan Rp863 juta.
 - Pemberian jaminan kesehatan nonkuota untuk 327.000 jiwa masyarakat miskin.
 - Perlindungan sosial melalui Kartu Jateng Sehat untuk 12,76 juta jiwa masyarakat.
 - Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan mencapai 30.000 unit.
- Memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk peningkatan akses dan pemberian tunjangan profesi guru melalui BOS, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
- Meneruskan berbagai pembangunan infrastruktur, khususnya untuk penguatan ketahanan pangan dan energi di Jawa Tengah, seperti bendungan Godang, bendungan Pidekso, bendungan Logung.
- Perbaiki aparatur negara dan pelayanan pemerintah, khususnya peningkatan pertahanan keamanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi (Pilkada serentak) di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, realisasi APBN triwulan III 2018 mencapai Rp30,38 triliun (60,80% dari pagu APBN 2018), lebih tinggi dibandingkan realisasi di triwulan yang sama di tahun sebelumnya yaitu Rp28,38 triliun (59,29% dari pagu APBN 2017). Ditinjau dari fungsinya, realisasi belanja pada triwulan II 2018 mengikuti pola historisnya, yang didominasi oleh belanja pada fungsi pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan. Realisasi APBN pada triwulan III telah sejalan dengan target penyaluran dana desa tahap I sebesar 60%, (paling lambat pada Juli 2018).

Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan III 2017 dan 2018

BERDASARKAN FUNGSI	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	7.223	60,7%	7.738	59,6%
PERTAHANAN	2.391	73,0%	2.517	79,1%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	3.717	71,2%	3.971	72,8%
EKONOMI	5.470	48,2%	6.138	50,2%
LINGKUNGAN HIDUP	391	59,2%	568	63,7%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	565	54,4%	835	62,2%
KESEHATAN	1.635	55,3%	1.968	57,8%
PARIWISATA DAN BUDAYA	1	50,0%	6	40,0%
AGAMA	494	64,0%	516	67,8%
PENDIDIKAN	6.383	60,7%	6.051	63,2%
PERLINDUNGAN SOSIAL	68	63,0%	73	64,0%
TOTAL	28.338	59,3%	30.381	60,8%

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah

Tabel 2.8 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan III 2017 dan 2018

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA PEGAWAI	10.098	68,7%	10.314	71,1%
BELANJA BARANG	7.066	59,5%	8.745	60,7%
BELANJA MODAL	4.699	44,3%	5.084	46,4%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	126	52,3%	28	62,2%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1.877	47,1%	765	23,0%
DANA DESA	4.472	70,1%	5.445	80,8%
TOTAL	28.338	59,3%	30.381	60,8%

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah



PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan III 2018 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2018.

- Berdasarkan disagregasi kelompoknya, peningkatan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi kelompok komoditas Bahan Makanan serta kelompok komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Normalisasi permintaan mobilisasi masyarakat pasca hari raya keagamaan serta peningkatan harga yang terjaga moderat pada biaya pendidikan menjadi faktor penahan peningkatan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan III 2018.
- Pada triwulan IV 2018, tekanan inflasi tahunan diperkirakan meningkat seiring dengan berkurangnya pasokan produksi komoditas hortikultura serta peningkatan konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun. Namun demikian peningkatan inflasi tersebut diperkirakan masih akan terjaga di rentang bawah target sasaran inflasi nasional sebesar $3,5 \pm 1\%$.



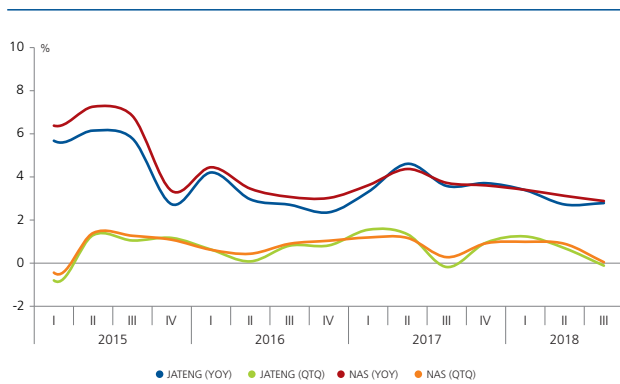
3.1. INFLASI SECARA UMUM

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 2,79% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,12% (qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan II 2018 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,69 % (qtq).

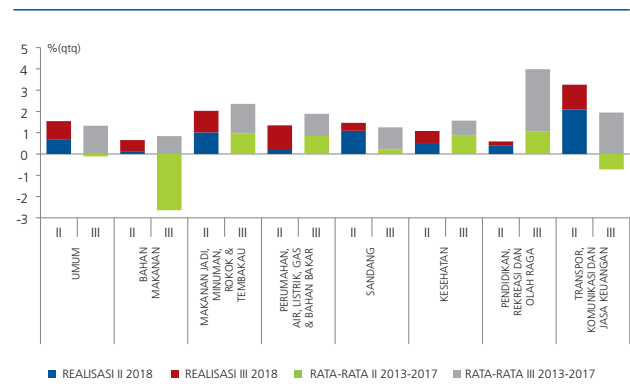
Laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan tersebut tercatat lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,88% (yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi Kawasan Jawa yang tercatat sebesar 2,98% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kawasan Jawa, pada triwulan III 2018 Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi dengan inflasi terendah ketiga setelah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat masing-masing sebesar 2,76% (yoy) dan 2,77%(yoy). Sejak tahun

2017, inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada periode triwulan III secara konsisten mencatatkan nilai di bawah realisasi inflasi tahunan kawasan Jawa. Selanjutnya, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Jawa Tengah sepanjang bulan Juli-September 2018 mencatatkan tren deflasi yang berlangsung lebih awal dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Jawa.

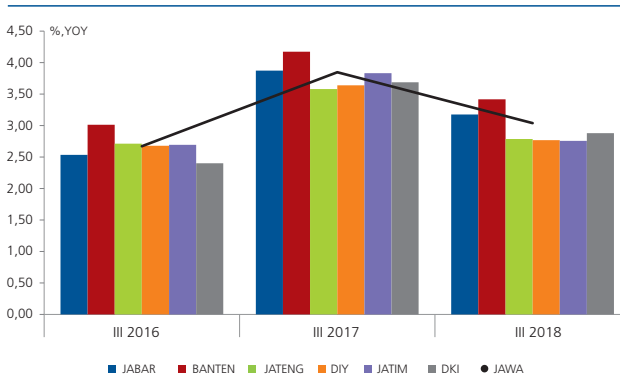
Peningkatan tekanan inflasi tahunan tersebut terutama disumbangkan oleh kelompok Bahan Makanan serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Penurunan inflasi bulanan kedua kelompok tersebut pada triwulan laporan terpantau lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Dengan pergeseran periode hari raya keagamaan Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni 2018, secara otomatis puncak inflasi Jawa Tengah dan



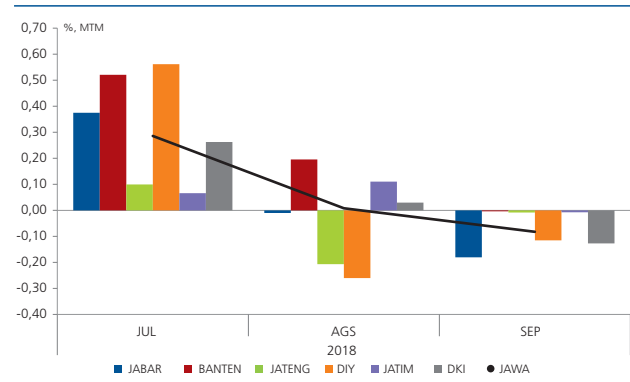
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan Jawa Tengah dan Nasional
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
TELUR AYAM RAS	0,105%	KUE KERING BERMINYAK	0,014%	SEKOLAH MENENGAH ATAS	0,025%
BENSIN	0,080%	KAYU BALOKAN	0,012%	TUKANG BUKAN MANDOR	0,024%
CABAI RAWIT	0,029%	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0,012%	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,020%
MIE	0,025%	SALAK	0,012%	SEMEN	0,015%
UPAH PEMBANTU RT	0,024%	UPAH PEMBANTU RT	0,009%	JERUK	0,013%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Angkutan Antar Kota	-0,122%	Telur Ayam Ras	-0,128%	Daging Ayam Ras	-0,095%
Bawang Merah	-0,107%	Angkutan Udara	-0,079%	Bawang Merah	-0,063%
Cabai Merah	-0,035%	Bawang Merah	-0,051%	Telur Ayam Ras	-0,030%
Daging Ayam Ras	-0,024%	Cabai Rawit	-0,039%	Cabai Rawit	-0,025%
Bawang Putih	-0,015%	Beras	-0,026%	Cabai Merah	-0,022%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

nasional telah bergeser pada akhir triwulan II 2018. Didorong oleh penurunan permintaan masyarakat pasca hari raya, laju inflasi bulanan sepanjang triwulan III 2018 menunjukkan tren penurunan dengan titik terendahnya pada bulan Agustus 2018. Capaian deflasi terendah pada bulan Agustus 2018 juga didukung oleh panen raya komoditas pangan utama beras masa tanam April-September 2018.

Walaupun secara umum Jawa Tengah mencatatkan tren deflasi bulanan, namun apabila ditinjau berdasarkan perbandingan tahunan (*year-on-year*), pada triwulan III 2018 sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah justru mencatatkan peningkatan inflasi tahunan dibandingkan triwulan lalu. Hal ini menandakan penurunan harga barang dan jasa pada triwulan III 2018 ini lebih lambat atau tidak sedalam penurunan harga pada periode yang sama pada tahun 2018.

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KOTA	INFLASI TW II 2018 (% ,YOY)	INFLASI TW III 2018 (% ,YOY)
1.	SURAKARTA	2,37	2,68
2.	SEMARANG	2,82	2,74
3.	TEGAL	3,12	2,98
4.	PURWOKERTO	2,59	2,83
5.	CILACAP	2,77	3,03
6.	KUDUS	2,57	2,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan III 2018 berlangsung hanya di kota Tegal dan kota Semarang, dengan penurunan terbesar di kota Tegal dari sebelumnya sebesar 3,12% (yoy) pada triwulan II 2018, menjadi sebesar 2,98% (yoy) pada triwulan ini, atau turun sebesar 0,14%. Sementara 4 (empat) kota pantauan inflasi lainnya justru mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan ini dibandingkan triwulan II 2018 lalu. Akselerasi inflasi tahunan tertinggi sepanjang triwulan III 2018 ini dicatatkan oleh kota Kudus yang mencatatkan peningkatan sebesar 0,33% dari triwulan II 2018 lalu yang tercatat sebesar 2,57% (yoy).

3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Ditinjau kelompoknya, penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan III 2018 dicatatkan oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; serta kelompok Sandang. Sementara itu 4 (empat) kelompok lainnya pada triwulan laporan mencatatkan peningkatan laju inflasi dibandingkan triwulan II 2018. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga mengalami penurunan laju inflasi tahunan terbesar, dengan mencatatkan inflasi sebesar 1,73% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

KOMODITAS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	III	III	III	III	III	II	III
UMUM	7,20	5,00	5,78	2,71	3,58	2,72	2,79
BAHAN MAKANAN	12,66	4,79	8,49	6,53	-0,78	3,48	4,52
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	6,94	5,61	5,71	4,41	2,82	3,18	3,33
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	4,91	6,68	4,61	1,44	6,01	1,47	1,87
SANDANG	2,40	1,87	3,26	1,57	1,25	2,44	2,16
KESEHATAN	2,41	3,87	3,73	2,80	3,53	2,91	3,28
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	1,75	6,12	5,17	3,34	4,02	4,19	1,73
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	11,68	2,58	6,39	-2,25	7,08	2,47	1,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan

KOMODITAS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	III	III	III	III	III	II	III
UMUM	7,20	5,00	5,78	2,71	3,58	2,72	2,79
BAHAN MAKANAN	2,68	1,00	1,79	1,42	-0,16	0,74	0,96
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	1,36	1,12	1,15	0,91	0,58	0,65	0,68
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	1,17	1,62	1,11	0,34	1,45	0,35	0,45
SANDANG	0,13	0,10	0,17	0,08	0,07	0,13	0,11
KESEHATAN	0,14	0,23	0,22	0,17	0,21	0,17	0,19
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	0,15	0,52	0,44	0,28	0,34	0,35	0,15
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	1,79	0,39	0,96	-0,32	1,04	0,36	0,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; QTQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	III	III	III	III	III	II	III
UMUM	3,58	1,40	1,05	0,81	-0,18	0,69	-0,12
BAHAN MAKANAN	4,62	0,94	1,65	0,62	-3,63	0,10	-2,65
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	3,49	1,40	0,92	0,36	0,81	1,01	0,96
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	2,04	1,62	0,37	0,75	0,44	0,19	0,85
SANDANG	2,87	0,62	0,74	0,52	0,49	1,09	0,21
KESEHATAN	0,75	1,10	0,52	0,50	0,53	0,52	0,89
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	1,14	4,29	3,43	2,35	3,50	0,39	1,05
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	7,88	0,54	0,55	1,03	-0,25	2,10	-0,73

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

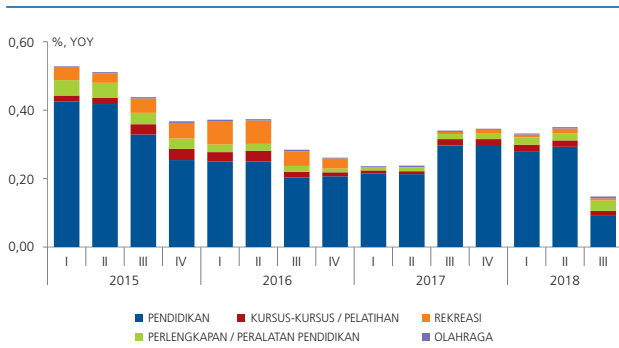
triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 4,19% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga mencatatkan andil penurunan inflasi tahunan terbesar dibandingkan kelompok komoditas lainnya, dengan kontribusi inflasi sebesar 0,15% pada triwulan III 2018, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan andil inflasi sebesar 0,35%.

Sementara itu, walaupun perkembangan indeks harga konsumen mencatatkan penurunan harga pada kelompok bahan makanan, baik secara tren bulanan (mtm) maupun tren triwulanan (qtq), namun kelompok ini tetap mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan III 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa penurunan

harga komoditas kelompok bahan makanan pada triwulan III 2018 ini tidak sebesar penurunan pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini juga tercermin dari andil inflasi tahunannya yang menunjukkan posisi dan peningkatan nilai terbesar dibandingkan 6 (enam) kelompok komoditas lainnya.

3.2.1. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga.

Pada triwulan III 2018, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga mengalami penurunan laju inflasi terbesar pada triwulan laporan. Penurunan laju inflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan tekanan harga dari subkelompok Pendidikan. Walaupun secara bulanan (*month-to-month*) maupun triwulanan (*quarter-to-quarter*),



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

perkembangan harga di triwulan laporan ini menunjukkan akselerasi dibandingkan triwulan II 2018, namun peningkatannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

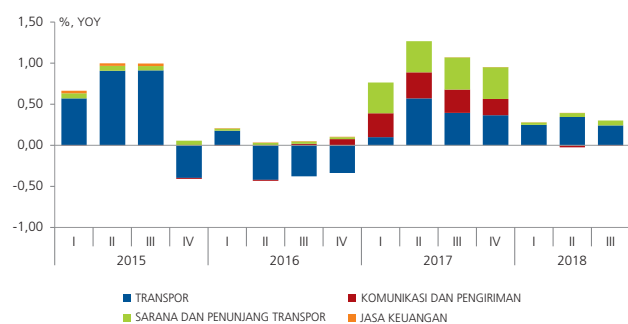
Sesuai dengan karakteristik permintaan dan penawarannya, subkelompok komoditas jasa pendidikan relatif hanya mengalami tekanan harga pada bulan Juni-September, atau bersamaan dengan periode tahun ajaran baru. Inflasi tahunan subkelompok Pendidikan pada triwulan III 2018 terpantau sebesar 1,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terpantau sebesar 5,64% (yoy). Penurunan inflasi subkelompok pendidikan ini berdampak signifikan, karena bobot konsumsinya yang cukup besar di Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak pada penurunan andil inflasinya pada triwulan III 2018 menjadi sebesar 0,09% terhadap keseluruhan inflasi tahunan Jawa Tengah. Peningkatan inflasi yang lebih rendah tersebut terpantau terjadi hampir pada seluruh komoditas jasa pendidikan, khususnya jasa Sekolah Menengah Atas yang meningkat sebesar 1,41% (yoy) pada triwulan III 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 14,27% (yoy).

Sementara itu, subkelompok Perlengkapan/Peralatan Pendidikan menjadi salah satu faktor penahan penurunan inflasi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Tekanan inflasi subkelompok Perlengkapan/Peralatan Pendidikan tercatat

mengalami peningkatan inflasi menjadi sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan III 2018, dari triwulan sebelumnya yang terpantau sebesar 2,07% (yoy). Namun peningkatan tekanan inflasi tersebut berdampak terbatas karena bobotnya yang relatif kecil terhadap konsumsi masyarakat Jawa Tengah. Walaupun permintaan akan komoditas perlengkapan/peralatan pendidikan relatif merata sepanjang tahun, namun kenaikan Laptop dan Buku Tulis Bergaris mengalami akselerasi harga yang tinggi pada triwulan laporan, yang diperkirakan didorong oleh peningkatan permintaan oleh siswa tingkat Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi pada tahun ajaran baru.

3.2.2. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Penurunan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 juga disumbang oleh kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Perlambatan laju inflasi tahunan terbesar dicatatkan oleh subkelompok Transportasi diikuti oleh subkelompok Jasa Keuangan. Subkelompok Transportasi mencatatkan penurunan laju inflasi menjadi sebesar 2,53% (yoy) pada triwulan III 2018, dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,59% (yoy). Selanjutnya, bobot konsumsi masyarakat di Jawa Tengah terhadap aktivitas transportasi yang relatif besar, turut menarik laju inflasi tahunan Jawa Tengah secara keseluruhan ke tingkat yang lebih rendah. Hal ini tercermin dari andil inflasi subkelompok Transportasi terhadap inflasi tahunan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

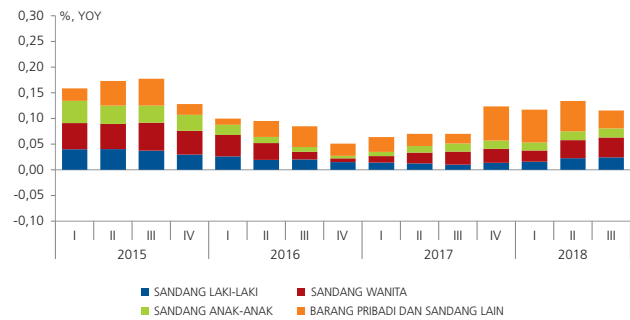
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Jawa Tengah yang menurun drastis dari sebelumnya sebesar 0,35% pada triwulan II 2018, menjadi sebesar 0,24% pada triwulan laporan ini. Perlambatan laju inflasi pada subkelompok Transportasi utamanya disebabkan oleh penurunan tekanan harga pada komoditas jasa Angkutan Antar Kota dan jasa Angkutan Udara yang mengalami deflasi cukup besar akibat penurunan permintaan mobilisasi masyarakat pasca hari raya keagamaan Idul Fitri.

Sementara itu, subkelompok Komunikasi dan Pengiriman serta subkelompok Sarana dan Penunjang Transpor justru mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan. Peningkatan terbesar dicatatkan oleh subkelompok Sarana dan Penunjang Transpor yang meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 2,79% (yoy), menjadi sebesar 3,37% (yoy). Peningkatan tekanan harga ini utamanya disumbang oleh komoditas jasa Tarif Pulsa Ponsel dan jasa Pemeliharaan Kendaraan. Namun demikian peningkatan inflasi ini relatif berdampak sangat kecil, karena bobot konsumsinya yang relatif kecil di Jawa Tengah.

3.2.3. Kelompok Sandang

Kelompok Sandang juga mendorong penurunan inflasi tahunan di Jawa Tengah pada triwulan III 2018, dengan penurunan inflasi terbesar tercatat pada subkelompok Barang Pribadi dan Sandang Lain. Subkelompok ini mencatatkan penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,63% (yoy), menjadi sebesar 2,77% (yoy) pada triwulan III 2018. Dengan bobotnya yang moderat terhadap konsumsi masyarakat Jawa Tengah, perlambatan inflasi subkelompok Barang Pribadi dan Sandang Lain menyumbang penurunan andil sebesar 0,02% terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah triwulan III 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya. Komoditas utama yang menjadi penyebab penurunan inflasi pada subkelompok ini adalah komoditas Emas Perhiasan yang mengalami deflasi bulanan sepanjang periode Juli-Agustus 2018.



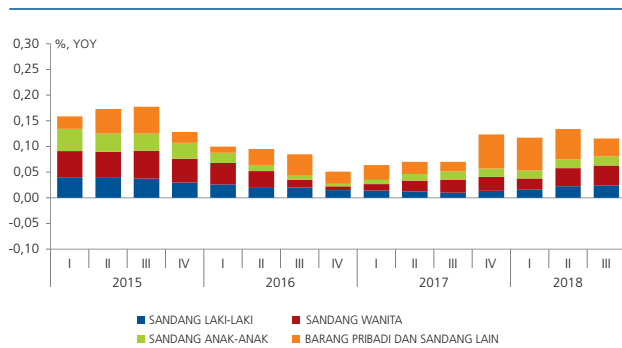
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Sandang

Sementara itu terdapat peningkatan yang relatif terbatas pada inflasi tahunan subkelompok Sandang Laki-Laki dan Sandang Wanita. Sejalan dengan pola historisnya dimana komoditas sandang akan mengalami perlambatan tekanan harga pasca hari raya, perkembangan inflasi bulanan (*month-to-month*) dan triwulanan (*quarter-to-quarter*) pada periode Juli-September 2018 mengalami perlambatan dibandingkan periode April-Juni 2018. Namun demikian, perlambatan kenaikan harga pada periode Juli-September tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Hal ini terutama terjadi pada komoditas Kemeja Batik, Celana Panjang Katun, Blus, dan berbagai komoditas sandang lain yang berbahan dasar katun. Hal ini diperkirakan dampak lanjutan peningkatan biaya produksi komoditas sandang berbahan dasar kapas impor yang mengalami peningkatan tekanan harga akibat pelemahan nilai tukar Rupiah.

3.2.4. Kelompok Bahan Makanan

Sementara itu, peningkatan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 didorong oleh peningkatan inflasi tahunan kelompok Bahan Makanan. Walaupun secara bulanan Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok Bahan Makanan mencatatkan deflasi sepanjang periode Juli-September 2018, namun kinerja deflasi tersebut masih lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017, sehingga mendorong inflasi tahunannya.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan

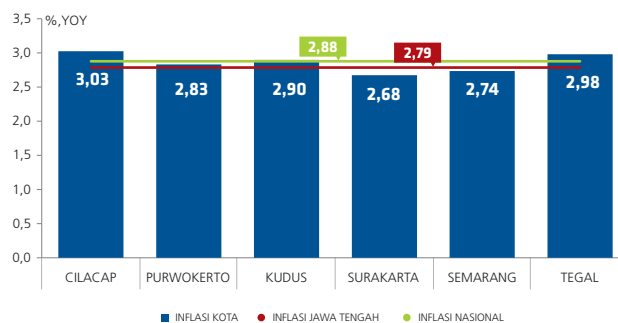
Peningkatan laju inflasi tahunan tertinggi pada kelompok ini dicatatkan oleh subkelompok Bumbu-bumbuan. Dengan bobotnya yang besar pada pola konsumsi masyarakat Jawa Tengah, subkelompok menjadi kontributor terbesar pada penurunan laju inflasi kelompok bahan makanan. Komoditas strategis subkelompok ini yang memiliki bobot konsumsi besar terhadap inflasi Provinsi Jawa Tengah adalah Bawang Putih dan Cabai Rawit. Walaupun komoditas Bawang Putih masih mencatatkan deflasi tahunan pada triwulan III 2018, namun tren deflasi bulannya yang telah berlangsung sejak bulan September 2018 mengalami perlambatan, hingga mencatatkan inflasi bulanan pada bulan September 2018. Hal ini diperkirakan efek normalisasi dimana harga bawang putih telah mencapai titik terendah optimalnya setelah kebijakan relaksasi impor bawang putih ditetapkan pada April 2018.

Sementara itu, kontributor utama penurunan laju inflasi tahunan terbesar kelompok Bahan Makanan disumbang oleh subkelompok Padi-padian, Umbi-umbian dan hasilnya. Sesuai dengan pola historisnya, periode panen padi masa tanam April-September 2018 menjamin tingginya pasokan beras yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga komoditas beras. Namun demikian, pasokan beras musim panen April-September 2018 tersebut mengalami penurunan secara gradual, seiring dengan mulainya masa tanam Oktober 2018 – Maret 2019, sehingga harga beras mengalami inflasi pada periode bulan September 2018.

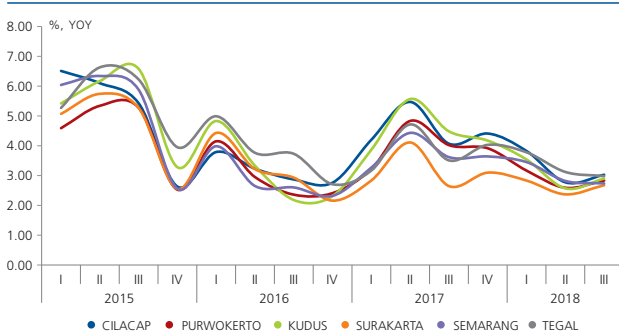
3.3. INFLASI KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kota-kota pantauan inflasi yang disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan perkembangan inflasi tahunan yang beragam. Dibandingkan triwulan lalu, inflasi triwulan III 2018 di kota Semarang dan kota Tegal mencatatkan penurunan, sementara 4 (empat) kota pantauan lainnya, yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus dan Surakarta justru mencatatkan peningkatan inflasi. Penurunan laju inflasi tahunan terbesar dialami oleh kota Tegal yang mengalami penurunan inflasi sebesar dari sebesar 3,12% (yoy) pada triwulan II 2018, menjadi sebesar 2,98% (yoy) pada triwulan laporan. Selanjutnya Kota Semarang dengan bobotnya sebesar 51,31% terhadap pembentukan inflasi Provinsi Jawa Tengah, menahan peningkatan inflasi Jawa Tengah sebesar 0,04% (yoy).

Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah pada triwulan laporan kembali melanjutkan tren penurunan. Pada triwulan II 2018, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah adalah sebesar 0,75%. Sementara pada triwulan III 2018, disparitas inflasi antar kota tersebut menurun menjadi sebesar 0,35%, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 3,03% (yoy), serta inflasi terendah berada di Kota Surakarta sebesar 2,68% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah
Grafik 3.9 Inflasi Tahunan Triwulan III 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah

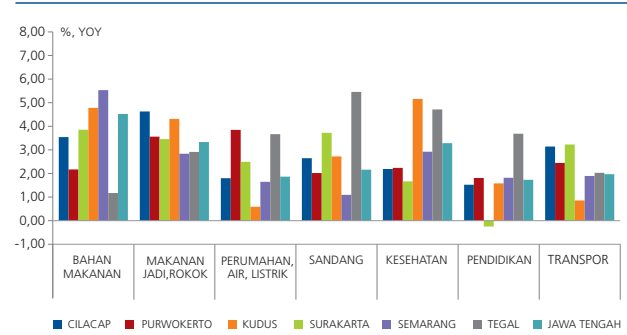


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah

Ditinjau dari kelompoknya, sebagian besar dari enam kota pantauan di Jawa Tengah mengalami inflasi tertinggi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau serta kelompok Bahan Makanan. Selain menunjukkan inflasi yang tinggi, kelompok Bahan Makanan juga menunjukkan tren peningkatan pada triwulan III 2018 ini dibandingkan triwulan lalu, dengan mencatatkan peningkatan rata-rata inflasi di enam kota pantauan dari sebelumnya sebesar 2,79% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi sebesar 3,51% (yoy) pada triwulan III 2018. Peningkatan laju inflasi tertinggi kelompok ini dialami oleh Kota Kudus yang mencatatkan inflasi sebesar 3,86% (yoy) pada triwulan III 2018, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,54% (yoy). Selanjutnya, inflasi tahunan kelompok Bahan Makanan di seluruh kota pantauan di Jawa Tengah juga memiliki disparitas yang besar, dengan capaian inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Surakarta sebesar 5,53% (yoy), sementara capaian terendah terjadi di Kota Tegal sebesar 1,17% (yoy).

Keseluruhan 6 (enam) kota pantauan inflasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang seragam dengan mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga serta kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Penurunan inflasi terbesar pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga terjadi di Kota Kudus yang mencatatkan deflasi sebesar 0,24% (yoy) pada triwulan III 2018, menurun dibandingkan triwulan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

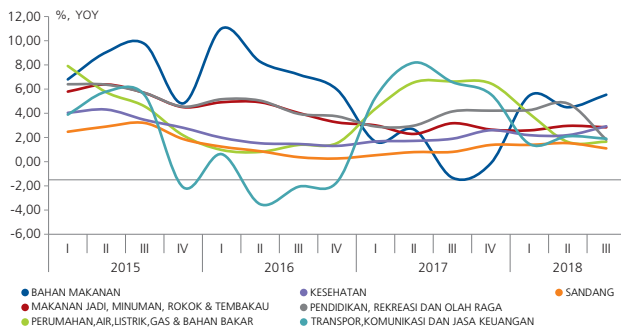
Grafik 3.11 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw III 2018

sebelumnya yang tercatat sebesar 7,65% (yoy). Sementara itu Kota Surakarta mencatatkan penurunan terbesar untuk inflasi tahunan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan mencatatkan penurunan dari sebesar 2,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,85% (yoy) pada triwulan laporan.

3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Pada triwulan III 2018, Kota Semarang memberikan andil terbesar bagi penurunan inflasi Provinsi Jawa Tengah. Walaupun mencatatkan penurunan inflasi, sumbangan kota Semarang terhadap inflasi tahunan provinsi Jawa Tengah masih menjadi yang terbesar dibandingkan 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Inflasi Kota Semarang pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 2,74% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,82% (yoy). Penurunan laju inflasi tahunan tertinggi di Kota Semarang tercatat pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Sementara itu, sejalan dengan karakteristik inflasi provinsi Jawa Tengah, peningkatan laju inflasi tahunan di kota Semarang tercatat pada kelompok Bahan Makanan serta kelompok Kesehatan.

Inflasi tahunan kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Kota Semarang pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 1,82% (yoy) atau mengalami penurunan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,81% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

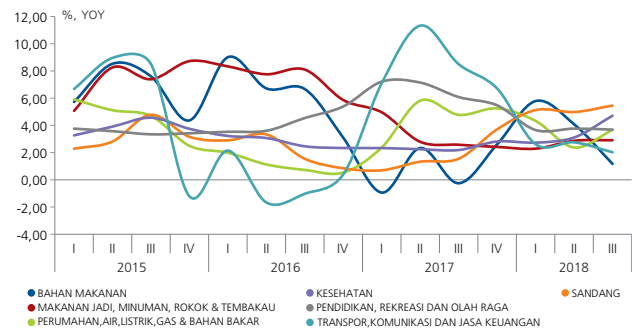
Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Kota Semarang Berdasarkan Kelompok

Penurunan laju inflasi tahunan kelompok ini utamanya disebabkan oleh perlambatan kenaikan biaya jasa pendidikan, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas dan Akademi/Perguruan Tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 lalu. Dengan capaian tersebut, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga menyumbang andil terbesar terhadap penurunan inflasi di Kota Semarang.

Sementara itu, peningkatan laju inflasi tahunan kelompok Bahan Makanan menjadi faktor pendorong inflasi tahunan Jawa Tengah meningkat lebih tinggi. Pada triwulan III 2018, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 5,53% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,50% (yoy). Peningkatan laju inflasi kelompok ini didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura khususnya bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, akibat penurunan pasokan produksinya.

3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Tegal

Selanjutnya, kota Tegal adalah salah satu dari 2 (dua) kota pantauan di Jawa Tengah yang mengalami penurunan inflasi tahunan. Pada triwulan III 2018, inflasi tahunan Kota Surakarta tercatat sebesar 2,98% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,12% (yoy). Anomali dicatatkan oleh kota Tegal dibandingkan kondisi 5 (lima) kota pantauan lainnya maupun Jawa Tengah secara keseluruhan. Penurunan inflasi tahunan di kota Tegal justru disumbang oleh kelompok Bahan Makanan, sementara



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok

perkembangan kelompok Bahan Makanan di keseluruhan Jawa Tengah justru mencatatkan peningkatan. Penurunan inflasi kelompok Bahan Makanan di kota Tegal didorong oleh fenomena normalisasi harga komoditas Beras dan Daging Ayam Ras yang kembali tingkat fundamentalnya setelah sempat meningkat tinggi pada periode hari raya keagamaan di bulan Juni 2018.

Penurunan inflasi tahunan di kota Tegal juga dicatatkan oleh kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tahunan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di kota Tegal pada triwulan III 2018 adalah sebesar 2,02% (yoy), atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 2,76% (yoy). Sesuai dengan kondisi umum di Jawa Tengah, perlambatan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat akan jasa mobilisasi, khususnya jasa Angkutan Antar Kota dan Tarif Kereta Api.

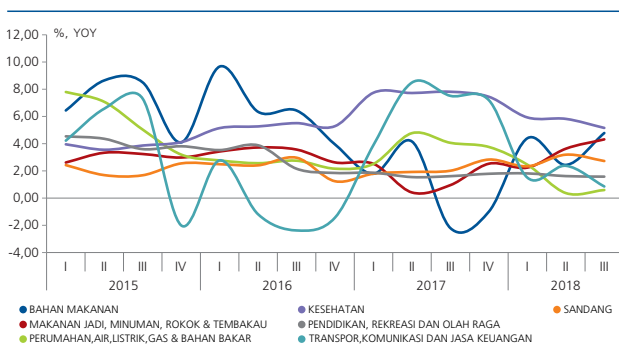
3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

Sementara itu, kota Surakarta adalah salah satu dari 4 (empat) kota pantauan yang mengalami peningkatan inflasi Provinsi Jawa Tengah. Pada triwulan III 2018, inflasi tahunan Kota Surakarta tercatat sebesar 2,68% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,37% (yoy). Dengan capaian tersebut, kota Surakarta memberikan andil peningkatan inflasi tahunan terbesar terhadap provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2018.

Sama halnya dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, peningkatan inflasi pada kota Surakarta terutama terjadi pada kelompok Bahan Makanan serta kelompok Perumahan, Air, dan Listrik, namun dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata akselerasi inflasi kota-kota pantauan lainnya, maupun Jawa Tengah secara umum. Penurunan inflasi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga, serta kelompok Sandang juga lebih moderat dibandingkan rata-rata deselerasi inflasi kota-kota pantauan lainnya, maupun Jawa Tengah secara umum.

Inflasi tahunan kelompok Bahan Makanan di kota Surakarta mengalami peningkatan tertinggi kedua setelah kota Kudus, yaitu sebesar 4,78% (yoy) pada triwulan III 2018, meningkat tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,44% (yoy). Peningkatan ini terutama disumbang oleh komoditas Bawang Merah, Cabai Rawit, dan Kacang Panjang yang mengalami peningkatan tertinggi pada bulan September 2018.

Sementara itu, penurunan inflasi tahunan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga juga tidak sebesar deselerasi kota-kota pantauan lainnya di Jawa Tengah, khususnya disebabkan oleh subkelompok Pendidikan, khususnya jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan jasa pendidikan Taman Kanak-kanak. Penurunan komponen komoditas Peralatan/Perlengkapan Pendidikan juga relatif



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Kota Kudus Berdasarkan Kelompok

terbatas, khususnya pada komoditas Laptop dan Buku Bergaris yang tercatat tidak mengalami penurunan pada bulan September 2018.

3.4. TRACKING INFLASI

3.4.1. Inflasi Oktober 2018

Sesuai dengan pola historisnya, Inflasi bulanan Provinsi Jawa Tengah pada periode Oktober 2018 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Inflasi bulan Oktober tercatat sebesar 0,30% (mtm) atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm). Peningkatan laju inflasi ini sejalan dengan proyeksi dan telah diperkirakan sebelumnya sesuai dengan fenomena berkurangnya pasokan komoditas pangan dan hortikultura serta penyesuaian harga bahan bakar dan angkutan akibat peningkatan harga minyak dunia dan pelemahan nilai mata uang Rupiah. Capaian inflasi bulanan Jawa Tengah pada bulan Oktober 2018 ini relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm). Walaupun mengalami inflasi bulanan yang tinggi, capaian inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender Jawa Tengah tercatat sebesar 3,15% (yoy) dan 2,13% (ytd); masih lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 3,47% (yoy) dan 2,68% (ytd).

Peningkatan laju inflasi terjadi pada kelompok Bahan Makanan serta kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Peningkatan laju inflasi terbesar berlangsung pada kelompok Bahan Makanan dari deflasi sebesar 1,12% (mtm) pada bulan September menjadi inflasi sebesar 0,36% (mtm) pada Oktober 2018. Inflasi pada kelompok Bahan Makanan terutama disebabkan peningkatan harga komoditas subkelompok Bumbu-bumbuan, khususnya komoditas Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Bawang Merah yang mengalami penurunan produksi akibatnya musim kemarau yang berkepanjangan.

Peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan mencatatkan inflasi sebesar 0,66% (mtm) pada Oktober 2018, meningkat dari sebesar 0,07% (mtm) pada bulan September 2018. Peningkatan tekanan harga pada kelompok ini utamanya disumbang oleh subkelompok Transpor khususnya pada komoditas jasa Angkutan Udara, bahan bakar Bensin, dan bahan bakar Solar. Penyesuaian harga bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM mendorong inflasi pada komoditas bahan bakar Bensin, Solar, dan jasa angkutan yang menjadi produk turunannya.

Kondisi sebaliknya berlangsung pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga yang justru mencatatkan penurunan laju inflasi dari sebesar 0,86% (mtm) pada bulan September 2018 menjadi sebesar 0,13% (mtm) pada Oktober 2018. Penurunan laju inflasi terjadi pada sebagian besar komponen jasa pendidikan, yaitu biaya SMA, Akademi/Perguruan Tinggi, dan Kelompok Bermain, yang mengalami normalisasi setelah meningkat tinggi pada periode awal tahun ajaran baru yang jatuh pada bulan Agustus-September 2018 lalu. Dampak lanjutannya juga tercermin pada penurunan harga komponen barang-barang subkelompok Perlengkapan/Peralatan Pendidikan sebagai dampak normalisasi setelah sempat meningkat tinggi pada bulan September 2018 akibat permintaan kebutuhan tahun ajar baru.

3.4.2. Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tw IV 2018

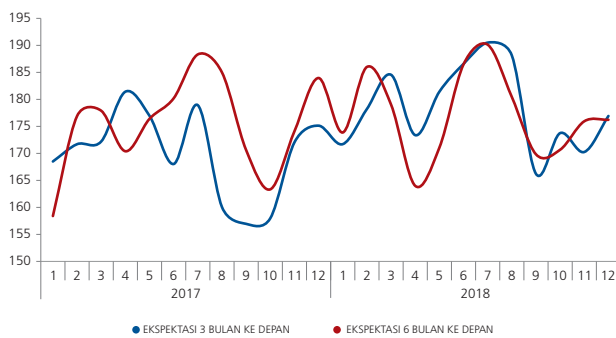
Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018. Sesuai dengan pola historisnya inflasi bulanan dan triwulanan pada periode triwulan IV

2018 akan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan masyarakat menjelang libur akhir tahun dan periode hari raya. Tekanan inflasi juga diperkirakan akan meningkat yang disebabkan oleh menurunnya pasokan produksi komoditas pangan dan hortikultura.

Sesuai pola historisnya, perkembangan harga kelompok bahan makanan diperkirakan akan meningkat tinggi, yang tercermin baik pada inflasi bulanan serta inflasi triwulanan. Permintaan masyarakat akan meningkat secara gradual menjelang libur akhir tahun dan hari raya keagamaan. Selanjutnya, pasokan produksi komoditas pangan dan hortikultura yang masih terbatas sebelum masa puncak panennya pada bulan Februari-April 2019 akan semakin mendorong risiko peningkatan inflasi pada kelompok Bahan Makanan.

Terkait hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya memperbaiki distribusi logistik dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan sehingga inflasi tahun 2018 terjaga pada rentang bawah sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1\%$. Pemerintah secara jangka panjang telah mendorong pembangunan infrastruktur pertanian serta program subsidi pertanian menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan produksi pangan. Selanjutnya, tren perbaikan nilai tukar petani sepanjang tahun 2018 diperkirakan juga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi petani.

Lebih jauh, peningkatan tingkat inflasi juga tercermin dari ekspektasi harga di tingkat konsumen dan pedagang. Hasil Survei Konsumen dan Survei Pedagang Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi harga pada triwulan III 2018. Berdasarkan hasil survei tersebut, baik konsumen maupun pedagang eceran



Sumber: Bank Indonesia

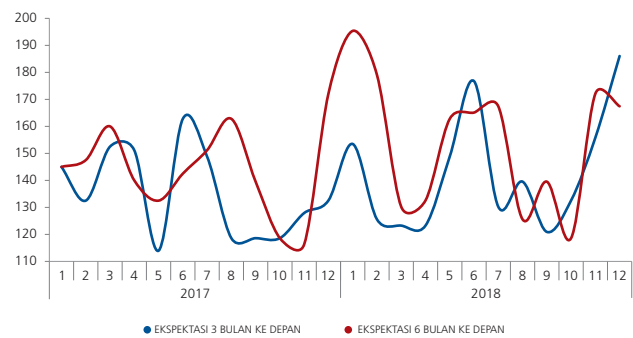
Grafik 3.15 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

memperkirakan tren peningkatan harga yang berlangsung gradual sejak bulan Oktober hingga Desember 2018.

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sampai dengan Oktober 2018, antara lain sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Program Pandawa ke-1: Pemenuhan Ketersediaan Pasokan
 - *Deep interview* dengan petani *champion* cabai tanggal 29 Agustus 2018 agar dapat memperoleh informasi tentang strategi penyelamatan harga pada tingkat petani karena harga cabai menurun drastis.
 - Rapat dengan BULOG, Dinas Pertanian dan Asosiasi Penggilingan Jawa Tengah tanggal 28 dan 29 Agustus 2018 mengenai antisipasi kenaikan harga beras triwulan akhir 2018.
 - *Monitoring* perkembangan harga, ketersediaan pasokan, monitoring penjualan Operasi Pasar, Gerakan Stabilisasi Pangan, dan Toko Tani Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.16 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran

- b) Pelaksanaan Program Pandawa ke-2: Pembentukan Harga Terjangkau
 - Operasi Pasar dan Gerakan Stabilisasi Harga Pangan se-Jateng oleh BULOG dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beras sesuai dengan pola musimannya.
 - Penyaluran RASTRA menggunakan prinsip 6T.
 - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- c) Pelaksanaan Program Pandawa ke-3: Pendistribusian Pasokan yang Aman dan Lancar
 - Koordinasi dengan satgas pangan terkait pengamanan distribusi bahan pokok & barang strategis.
 - Perluasan jaringan Toko Tani Indonesia, Toko Tani Indonesia Center & Rumah Pangan Kita untuk menghadirkan pasokan bahan pangan strategis dengan harga terjangkau dengan memotong rantai distribusi dari petani ke konsumen akhir.
- d) Pelaksanaan Program Pandawa ke-4: Perluasan Akses Informasi
 - Sosialisasi Sadar & Kelola Inflasi kepada siswa-siswi SMA 3 Semarang.
 - Optimalisasi pemanfaatan SIHATI Masyarakat.

- e) Pelaksanaan Program Pandawa ke-5: Protokol Manajemen Lonjakan Harga
- Optimalisasi Pemanfaatan SIHATI *Mobile Application* oleh Para Pejabat Daerah dengan terus melakukan diskusi pada *virtual meeting* Sihati.
 - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ozone untuk memperpanjang masa simpan.
 - Diskusi dan peninjauan secara kontinyu dengan asosiasi penggilingan, Bank Jateng, BULOG dan BUMD tentang finalisasi pengembangan konsep *Rice Market Center*.
 - Menindaklanjuti hasil High Level Meeting TPID Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2018, TPID Jawa Tengah melakukan survei lokasi terhadap Bumi Laras Hijau dan mitra pemasok sarana produksinya.



STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

Di tengah kinerja perekonomian yang tumbuh melambat, stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tetap terjaga.

- Penyaluran kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman.
- Normalisasi permintaan pasca HBKN dan pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang menahan kinerja penjualan dan profitabilitas korporasi pada triwulan laporan. Namun, likuiditas korporasi masih terjaga.
- Kinerja perbankan secara umum masih bertumbuh, walaupun aset dan DPK mencatatkan perlambatan pertumbuhan, seiring dengan penurunan kualitas kredit.
- Secara historis, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten menunjukkan perbaikan. Saat ini, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah melebihi 40%, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.



4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN JAWA TENGAH

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tetap terjaga, di tengah kinerja RT yang terbatas dan melambatnya kinerja sektor korporasi. Kinerja korporasi Jawa Tengah masih tumbuh positif, meskipun tidak setinggi periode sebelumnya; yang disebabkan oleh normalisasi permintaan RT pasca HBKN dan peningkatan beban biaya bunga ULN karena pelemahan nilai tukar Rupiah. Meskipun kinerja korporasi tidak sekuat periode sebelumnya, likuiditas korporasi masih terpantau baik.

Sementara itu, walaupun sektor RT tumbuh melambat pada triwulan laporan, penyaluran kredit pada sektor RT masih tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Tujuan penggunaan kredit RT masih didominasi KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko kredit masing-masing terjaga di bawah *threshold*.

Lebih lanjut, penyaluran kredit pada lapangan usaha utama Jateng masih bertumbuh, khususnya pada sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi; merespon kebutuhan pembayaran vendor dan peningkatan konektivitas pasca penyelesaian proyek berbagai ruas jalan tol; dan sektor pertanian.

Di tengah normalisasi perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan, penyaluran kredit di Jawa Tengah tercatat bertumbuh lebih tinggi (7,14%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (3,37%; yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit terlihat pada sektor utama, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, merespon kenaikan konsumsi RT; dan pada sektor konstruksi, untuk kebutuhan pembayaran vendor pasca penyelesaian proyek. Secara keseluruhan, kualitas kredit stabil terjaga pada level 2,29% (yoy).

Berdasarkan lokasi bank, kinerja perbankan di Jawa Tengah triwulan III 2018 mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Indikator utama perbankan berupa

pertumbuhan aset dan pertumbuhan DPK mencatatkan perlambatan pertumbuhan, seiring dengan penurunan kualitas kredit. Di sisi lain, penyaluran kredit menikmati perbaikan pertumbuhan, sehingga LDR tercatat lebih tinggi.

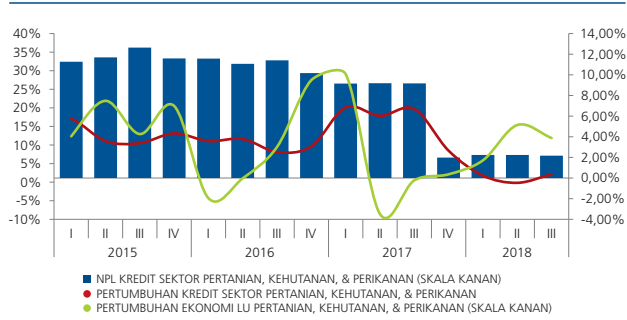
Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah mencapai 40,77%, mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan lalu. Pangsa ini sudah memenuhi ketentuan penyaluran kredit UMKM berdasarkan PBI No. 17/12/PBI/2015, yang mewajibkan pangsa minimum di tahun 2018 adalah 20%. Lebih lanjut, selama 3 tahun terakhir, kualitas kredit UMKM relatif terjaga, di bawah *threshold* NPL sebesar 5%. Salah satu kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Jawa Tengah merupakan provinsi tertinggi dalam menyalurkan KUR.

4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan III 2018

4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan III 2018

Seiring dengan normalisasi kinerja perekonomian pada triwulan III 2018, kinerja perbankan di Jawa Tengah terpantau cukup baik. Secara keseluruhan, penyaluran pertumbuhan kredit di Jawa Tengah⁸ mencapai Rp 313,4 triliun, atau bertumbuh lebih tinggi (8,09%; yoy) dari triwulan lalu (7,14%; yoy). Penyaluran kredit masih didominasi sektor lapangan usaha utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 29,0%); sektor industri pengolahan (pangsa 21,6%) dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (pangsa 2,7%). Kinerja kredit sektor utama tersebut beragam dengan kualitas kredit yang relatif terjaga (NPL 2,53%; yoy), dibandingkan triwulan lalu (2,32%; yoy).

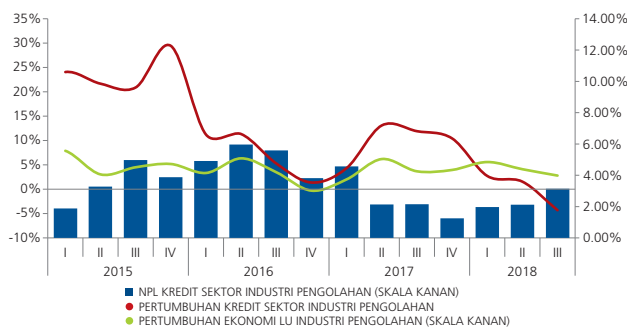
8. Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

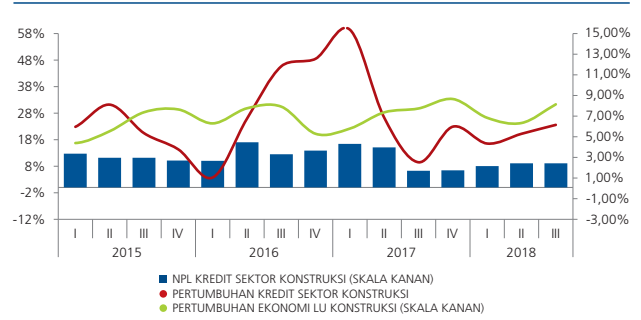
Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian

Sejalan dengan arah pertumbuhan pada triwulan laporan, kinerja kredit sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi mengalami akselerasi. Hal ini utamanya ditengarai penyelesaian proyek jalan tol di beberapa ruas di Jawa Tengah sehingga mendorong kebutuhan pada sektor konstruksi untuk membayar vendor pasca penyelesaian proyek. Selanjutnya, penyelesaian proyek jalan tol meningkatkan konektivitas sehingga berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran di Jateng tercatat mengalami perbaikan, dari tumbuh 6,65% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi tumbuh 10,35% (yoy) di triwulan laporan, yang didorong perbaikan kredit modal kerja dan investasi. NPL kredit sektor ini tercatat konsisten tinggi pada level 3,70%, walaupun masih di dalam batas aman. Penyaluran kredit ke sektor konstruksi terus terakselerasi, dari tumbuh 20,22% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi tumbuh 23,59% (yoy) di triwulan laporan. Kualitas kredit sektor ini terjaga stabil pada level 2,28%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

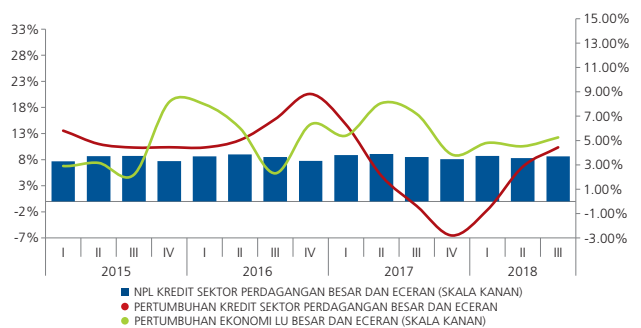


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi

Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan mengalami kontraksi 4,32% (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada triwulan lalu (1,55%; yoy). Kontraksi ini terjadi karena turunnya penyaluran kredit pada kelompok modal kerja (pangsa 79,02% dari total kredit industri pengolahan), seiring dengan menurunnya kebutuhan modal kerja industri, merespon normalisasi permintaan RT pasca HBKN.

Sementara itu, walaupun pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh melambat dibandingkan triwulan lalu, kinerja kredit lapangan usaha ini mengalami peningkatan pertumbuhan dari kontraksi 0,17% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi bertumbuh 2,11% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan pertumbuhan ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan seiring dengan masa panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diperkirakan mulai panen sejak akhir triwulan II 2018.



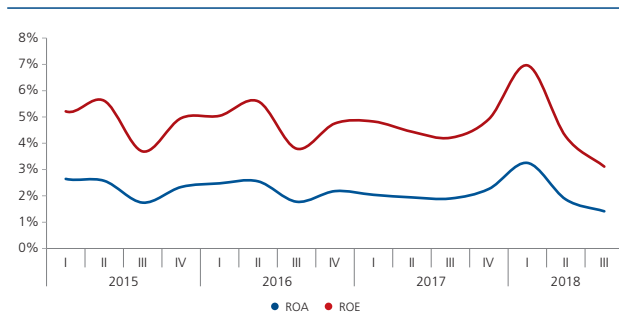
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan III 2018

Secara umum, disparitas pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih terus berlanjut pada 2018. Ketidakpastian global akan semakin tinggi, kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) telah memicu aliran modal keluar dari negara *emerging market*, termasuk Indonesia dan pada gilirannya berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Pulihnya perekonomian Amerika Serikat (AS) berpengaruh besar terhadap kinerja korporasi Jawa Tengah, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jawa Tengah. Namun demikian, komoditas bahan baku yang masih tinggi konten impornya diperkirakan menjadi faktor penahan pertumbuhan korporasi, khususnya untuk komoditas unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil, serta barang kayu. Risiko terkait lainnya yang perlu diwaspadai di sektor korporasi adalah struktur pembiayaan korporasi (termasuk utang luar negeri), kepatuhan dalam melaksanakan *hedging*, hingga daya tahan korporasi yang tercermin dari rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas.

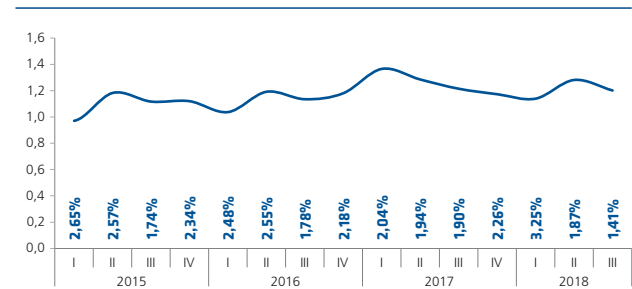
Menghadapi berbagai risiko dimaksud, termasuk peningkatan biaya UMR 2018, biaya volatilitas kurs, dan beban bunga hutang, menyebabkan profitabilitas korporasi tergerus. Hasil SKDU memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan laporan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. SBT triwulan III 2018 tercatat sebesar 20,94%; lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 31,60%.



Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah

Selain itu, kemampuan perusahaan untuk mencetak laba (rentabilitas) dirasa menurun sebagaimana ditunjukkan oleh persentase Saldo Bersih (SB) kondisi rentabilitas sebesar 23,05%, lebih rendah dibandingkan dengan 40,54% pada triwulan sebelumnya. Hasil survey tersebut terkonfirmasi dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) yang mengalami penurunan, masing-masing tercatat sebesar 1,41% dan 3,11%, dibandingkan triwulan lalu sebesar 1,87% dan 4,26%. Hal ini disumbang karena turunnya penjualan korporasi pada triwulan laporan dibandingkan triwulan lalu, mengingat adanya normalisasi permintaan pasca HBKN; serta adanya peningkatan biaya keuangan (seperti bunga utang) yang cukup signifikan.

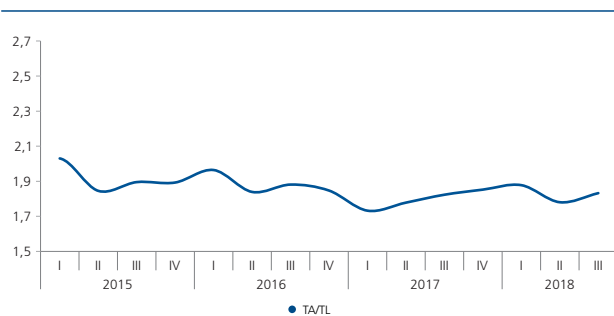
Lebih lanjut, *Debt Equity Ratio* (DER) mengalami penurunan menjadi 1,20 pada triwulan III 2018; dari 1,28 pada triwulan lalu. Rasio ini mengindikasikan penurunan peran utang dalam struktur pembiayaan perusahaan, karena korporasi memilih menggunakan ekuitas (*retained earning*). Selanjutnya, relatif lebih tingginya inventori karena penjualan yang lebih rendah pada triwulan laporan dan persiapan korporasi untuk menggenjot produksi untuk permintaan akhir tahun, meningkatkan nilai aset lancar, sehingga likuiditas perusahaan dalam jangka pendek menjadi lebih baik, tercermin dari *current ratio* yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu.



Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah

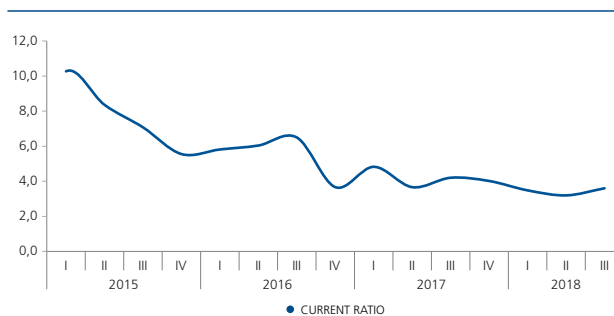
Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan III 2018

4.1.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

RT memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang 60% dari total PDRB di Jawa Tengah. Lebih lanjut di sisi perbankan, DPK RT menyumbang 73,4% dari total DPK; sementara kredit RT menyumbang 30,0% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah.

Pada triwulan laporan, di tengah normalisasi konsumsi RT pasca HBKN, kredit konsumsi masih menunjukkan peningkatan pertumbuhan, menjadi sebesar 8,19% (yoy). Kredit RT masih dominan digunakan untuk membiayai multiguna (26,4%), KPR (24,5%), dan kredit kendaraan bermotor (12,0%). Risiko kredit yang diukur melalui NPL tergolong rendah, masing-masing 1,87%; 2,30%; dan 1,40%.

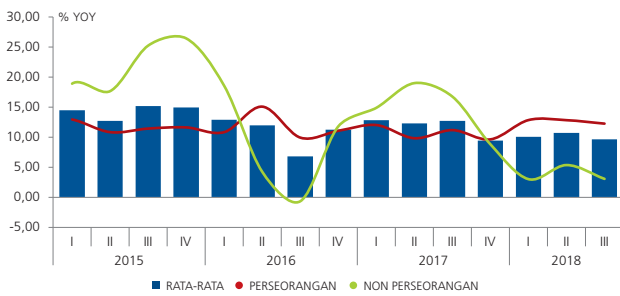
Sementara dari sisi DPK, komposisi tabungan masih mendominasi (65,03% dari total DPK). Ditilik lebih lanjut, sekitar 0,03% deponan besar (dengan tabungan >Rp1M) menguasai 17,17% dari total DPK. Walaupun dalam beberapa triwulan ke belakang, tidak terlihat perubahan signifikan dari struktur kepemilikan tabungan, perbankan perlu mewaspadaikan dan terus memperluas basis deposannya.

4.1.3.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

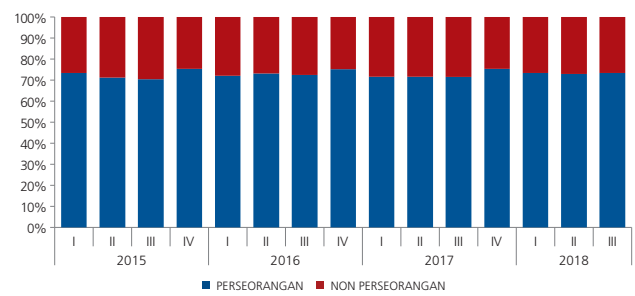
DPK di Jawa Tengah yang berhasil dihimpun pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp282,0 Triliun, didominasi oleh DPK RT sebesar Rp206,5 Triliun (**pangsa 73,2%**). Adapun, DPK RT mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat (12,22%; yoy) dibandingkan triwulan II 2018 (12,79%; yoy).

Komposisi DPK RT triwulan III 2018 masih didominasi oleh tabungan (65,03%), deposito (31,73%), dan giro (3,24%). Berdasarkan komponennya, hanya deposito RT yang mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 11,94% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (11,80%; yoy). Sementara, komponen giro dan tabungan RT mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi masing-masing 16,25% (yoy) dan 12,16% (yoy) pada triwulan laporan. Tingginya pangsa tabungan RT terhadap total DPK perbankan menunjukkan preferensi RT yang menginginkan likuiditas tinggi. Di sisi lain, hal ini membuat perbankan terekspos risiko likuiditas, apabila terdapat penarikan dana RT sewaktu-waktu dalam jumlah besar.

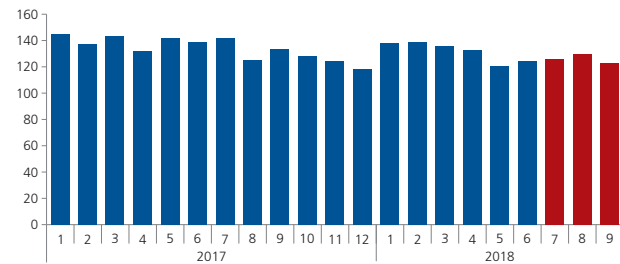
Perlambatan pertumbuhan DPK terkonfirmasi oleh hasil pengolahan SK yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap masyarakat di kota Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal. Salah satu indeks yang



Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah



Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah



Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen

menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap perkiraan jumlah tabungan untuk periode triwulan III 2018 menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 122,9 pada September 2018; lebih rendah dibandingkan periode Juni 2018 (124,5).

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap deposito nilai besar perseorangan masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan III 2018, sebanyak 0,03% dari jumlah deposito perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai 17,17% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PENGELOMPOKAN NOMINAL TABUNGAN	PANGSA NOMINAL	PANGSA DEPOSITAN
0-100 JUTA	48,29%	99,31%
100-500 JUTA	28,27%	0,63%
500 JUTA - 1M	6,27%	0,04%
>1M	17,17%	0,03%

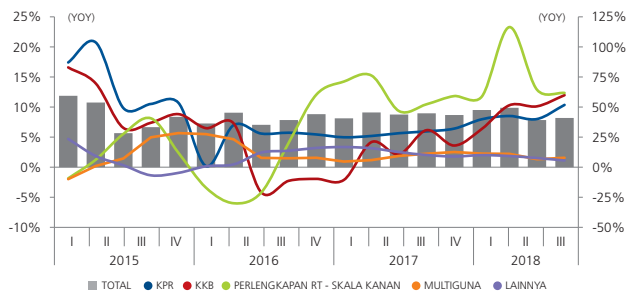
Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.1.3.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

Perlambatan pertumbuhan konsumsi RT di Jawa Tengah pada triwulan laporan (4,30%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (5,15%; yoy) tidak sejalan dengan penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) triwulan laporan yang mengalami peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 8,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (7,85%; yoy).

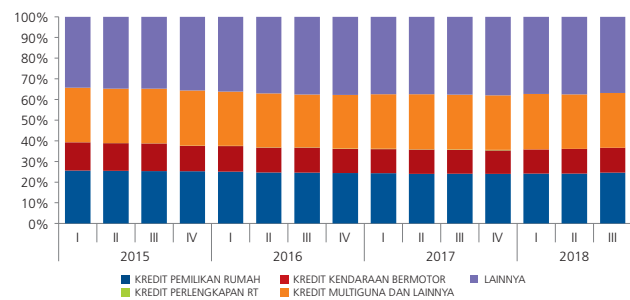
Kredit RT sebagian besar digunakan untuk membiayai multiguna (26,4%), KPR (24,5%), dan kredit kendaraan bermotor (12,0%). Berdasarkan andilnya, pertumbuhan kredit RT pada triwulan III 2018 ditopang oleh kelompok KPR dan multiguna. Dengan pangsa sebesar 24,54% serta pertumbuhan sebesar 10,36% (yoy) pada triwulan III 2018, KPR menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit RT. Selanjutnya, kredit multiguna mendorong peningkatan yang lebih tinggi pada kredit RT, dengan pangsa sebesar 26,43% dan pertumbuhan sebesar 7,83% (yoy). NPL KPR dan multiguna masing-masing 2,30% dan 1,87%.

Risiko kerentanan RT terpantau masih stabil rendah dengan rasio NPL 1,22% pada triwulan laporan. Ditilik lebih lanjut berdasarkan jenis kreditnya, NPL tertinggi dicatatkan oleh kredit pemilihan flat atau apartemen s.d tipe 21 (NPL 37,08%) dan kredit pemilikan komputer dan alat komunikasi (NPL 7,49%), namun karena pangasanya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

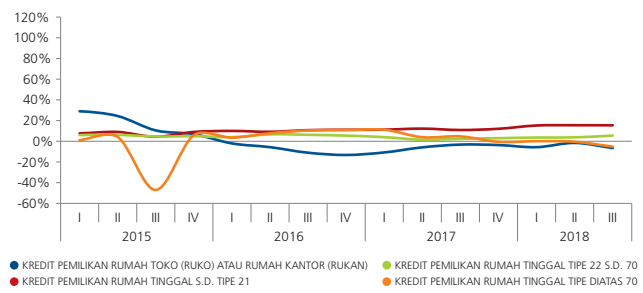
KATEGORI	2016				2017				2018		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
KREDIT RUMAH TANGGA	1,20%	1,18%	1,23%	1,06%	1,17%	1,21%	1,26%	1,09%	1,23%	1,26%	1,22%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	1,95%	2,08%	2,56%	2,23%	2,68%	2,80%	2,90%	2,64%	2,69%	3,02%	3,18%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70	1,91%	1,83%	1,85%	1,52%	1,70%	1,84%	1,80%	1,37%	1,46%	1,54%	1,51%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	2,76%	2,83%	2,98%	2,50%	2,97%	3,05%	3,36%	2,89%	3,58%	2,76%	2,78%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	0,29%	5,31%	1,92%	0,04%	1,63%	4,25%	3,43%	9,56%	8,45%	8,81%	37,08%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70	3,50%	2,27%	2,04%	3,00%	2,43%	2,45%	2,87%	2,01%	1,89%	1,91%	1,89%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	6,73%	4,64%	6,81%	3,94%	3,37%	3,36%	3,60%	2,23%	2,09%	1,81%	2,29%
PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	4,29%	3,77%	3,95%	4,33%	4,59%	4,19%	3,36%	2,75%	3,17%	3,54%	3,48%
PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	0,73%	0,63%	0,78%	0,77%	0,75%	0,83%	1,13%	1,02%	0,98%	1,31%	1,25%
PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	1,88%	2,38%	2,17%	1,89%	1,92%	2,02%	1,73%	1,58%	1,86%	1,82%	1,75%
PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH	1,16%	0,70%	1,04%	1,80%	1,30%	1,36%	1,77%	2,55%	1,19%	2,65%	2,72%
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	2,27%	2,10%	2,23%	0,40%	0,37%	1,71%	3,94%	2,54%	1,04%	1,26%	2,16%
PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6,75%	6,48%	2,59%	1,76%	1,09%	1,24%	0,84%	0,42%	0,28%	0,31%	0,50%
PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	0,23%	0,27%	0,90%	0,31%	0,95%	1,79%	2,10%	1,46%	1,83%	1,96%	2,52%
PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	5,52%	2,08%	2,97%	3,09%	4,29%	2,97%	8,29%	3,45%	2,71%	4,39%	7,49%
PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	1,28%	1,10%	1,05%	1,02%	0,85%	0,60%	0,68%	0,70%	0,50%	0,75%	0,98%
KEPERLUAN MULTIGUNA	1,04%	1,04%	1,05%	0,89%	1,02%	1,03%	1,09%	1,01%	1,15%	1,20%	1,12%
KEPERLUAN LAINNYA	0,53%	0,51%	0,55%	0,47%	0,51%	0,57%	0,57%	0,52%	0,61%	0,67%	0,59%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

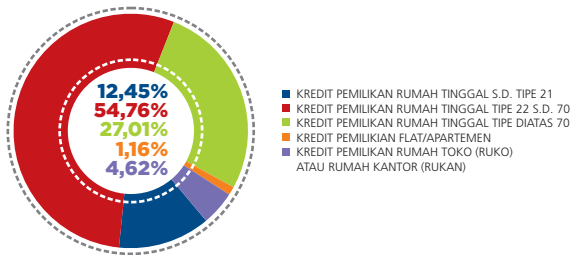
sangat kecil (masing-masing 0,02% dan 0,04% dari total kredit konsumsi), kenaikan NPL pada komponen ini tidak signifikan mempengaruhi NPL secara keseluruhan.

Pada triwulan III 2018, kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh sebesar 10,36% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan lalu (8,01%; yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit terjadi untuk seluruh tipe rumah tinggal (rumah tinggal s.d. tipe 21, tipe 22 s.d. 70, dan tipe diatas 70). Rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 masih menjadi kontributor utama KPR (pangsa 54,76%) tumbuh sebesar 19,40% (yoy). Rumah tinggal tipe diatas 70 (pangsa 27,01%) mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 9,15% (yoy). Walaupun penyaluran kredit pada rumah

tinggal s.d. tipe 21 masih mengalami kontraksi sebesar 4,77% (yoy), tapi kontraksinya tidak sedalam triwulan lalu. Naiknya kebutuhan pembiayaan pada berbagai jenis rumah tinggal sejalan dengan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang menunjukkan adanya peningkatan harga untuk seluruh tipe properti residensial.



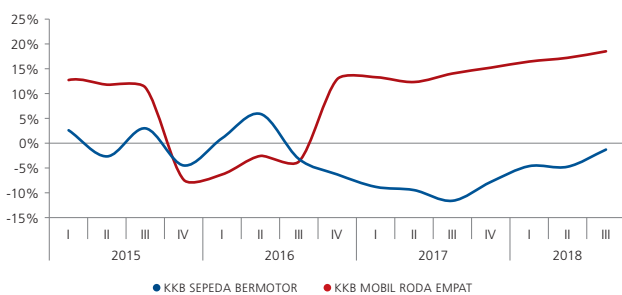
Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah



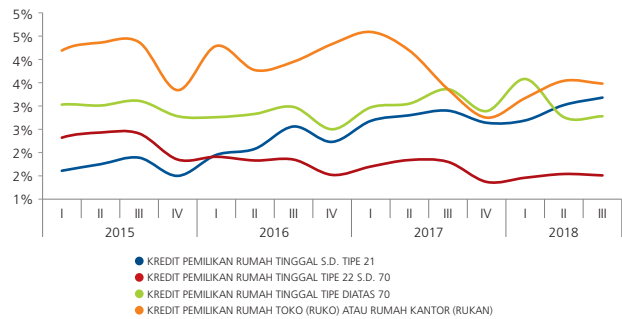
Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami pertumbuhan sebesar **11,98% (yoy)**, lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (**10,12%; yoy**). Penyaluran KKB mayoritas ditujukan untuk membiayai kepemilikan mobil roda empat (73,47%) dan sepeda bermotor (24,53%). Oleh sebab itu, akselerasi pertumbuhan kredit untuk mobil roda empat (18,52%; yoy), dan kontraksi kredit sepeda bermotor yang tidak lebih dalam (1,29%; yoy) dibandingkan triwulan lalu menjadi penopang pertumbuhan KKB yang lebih tinggi. Tren penurunan pertumbuhan KKB untuk kepemilikan kendaraan roda dua pada perbankan di Jawa Tengah telah berlangsung sejak tahun 2014, hingga akhirnya mengalami kontraksi dan tren ini diperkirakan akan berlanjut seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan sebagai sumber pembiayaan alternatif.



Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

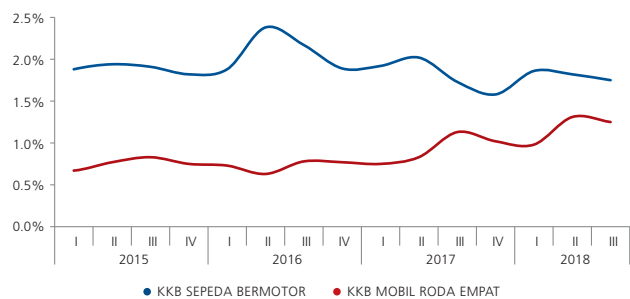


Sumber: Bank Indonesia, diolah

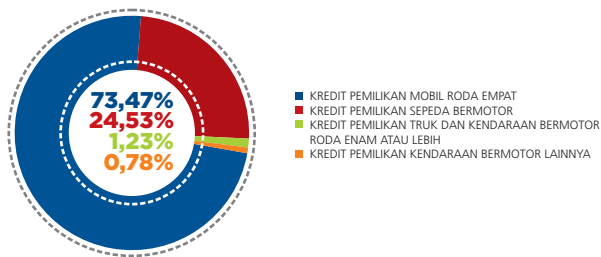
Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

Selanjutnya, kredit kepemilikan truk dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih mencatatkan akselerasi pertumbuhan hingga 151,85% (yoy) pada triwulan ini. Namun, mengingat nominalnya yang relatif kecil, volatilitas kinerja kredit untuk kepemilikan truk dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih, tidak berdampak signifikan terhadap kinerja KKB perbankan di Jawa Tengah.

Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) pada triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan, dengan penurunan rasio NPL menjadi 1,40%. Peningkatan kualitas KKB ini disumbang oleh penurunan NPL kredit pemilikan mobil roda empat dan sepeda bermotor yang cukup signifikan menjadi 1,25% dan 1,75% dibandingkan 1,31% dan 1,82% pada triwulan sebelumnya.

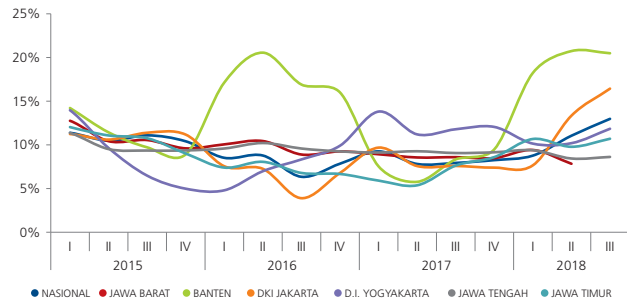


Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa

4.2. KONDISI UMUM PERBANKAN⁹ JAWA TENGAH

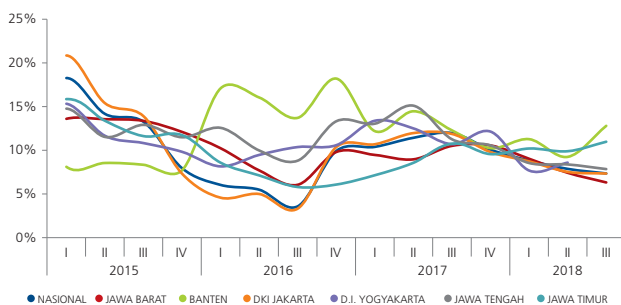
Pada triwulan III 2018, kinerja perbankan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cenderung melambat. Dibandingkan triwulan II 2018, indikator utama perbankan berupa pertumbuhan aset dan pertumbuhan DPK mencatatkan perlambatan pertumbuhan, seiring dengan penurunan kualitas kredit. Di sisi lain, penyaluran kredit mencatatkan perbaikan sehingga rasio intermediasi (LDR) pada triwulan laporan meningkat.

Pada triwulan laporan, aset perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp371,95 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,85% (yoy); tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (8,38%; yoy). Adapun, pangsa aset perbankan Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 3,84%. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan aset Jawa Tengah

ini sejalan dengan tren nasional. Hampir seluruh provinsi, kecuali Banten dan Jawa Timur mencatatkan peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan.

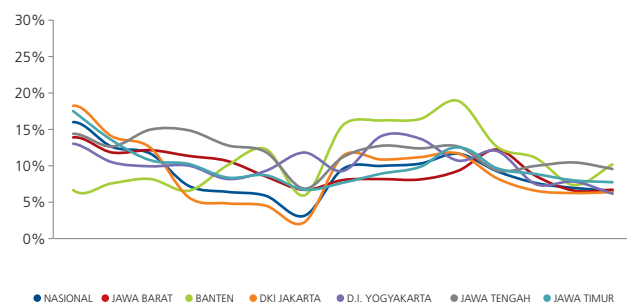
Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp272,37 Triliun, menunjukkan peningkatan pertumbuhan (8,62%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (8,44%; yoy). Dengan perkembangan tersebut, pangsa kredit perbankan Jawa Tengah terhadap nasional adalah sebesar 5,26%. Secara spasial, tren peningkatan pertumbuhan kredit terjadi di seluruh provinsi Jawa, kecuali Banten.

Sedangkan, kinerja penghimpunan DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 menunjukkan perlambatan pertumbuhan. DPK tercatat sebesar Rp 282,0 Triliun atau tumbuh sebesar 9,60% (yoy) dibandingkan triwulan lalu (10,49%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

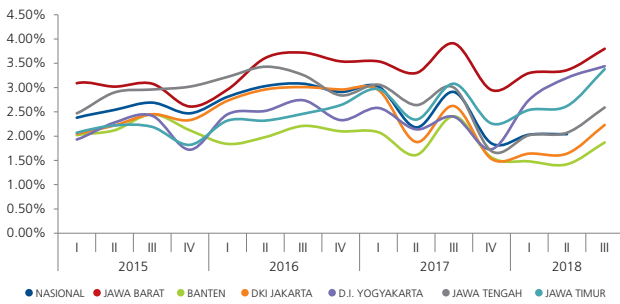
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

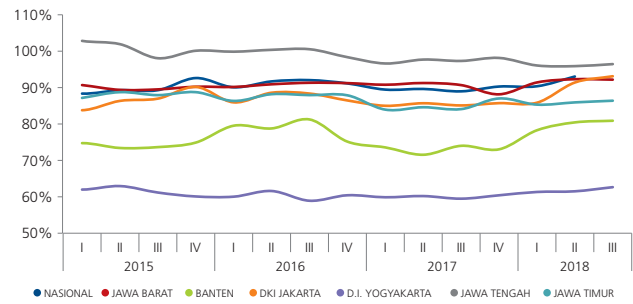
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah

9. Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank



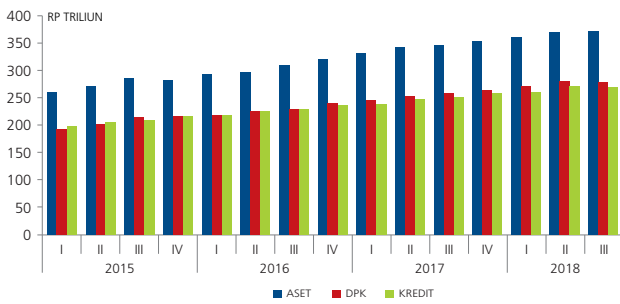
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah



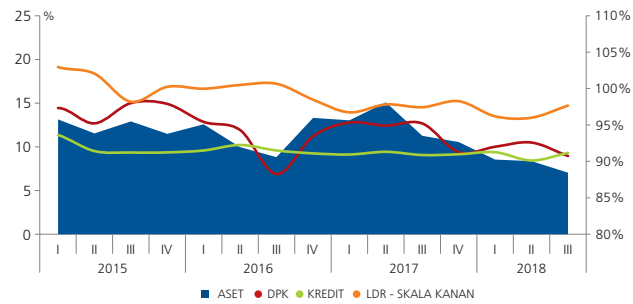
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah

Di tengah kinerja kredit yang mengalami peningkatan pertumbuhan, kualitas kredit perbankan Jawa Tengah tercatat mengalami penurunan kualitas pada triwulan III 2018, walaupun masih terjaga di bawah 5,00%. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada triwulan III 2018 berada pada level 2,59%, meningkat dibandingkan triwulan lalu sebesar 2,07%. Peningkatan NPL pada triwulan III 2018 dialami oleh seluruh perbankan di Jawa.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di tengah perlambatan pertumbuhan DPK, LDR Jawa Tengah meningkat menjadi 96,57%, sejalan dengan tren nasional dan tren Jawa, kecuali Jawa Barat.

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

Jumlah jaringan kantor bank umum di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah tercatat sebesar 3.062 kantor atau menurun dibanding triwulan II 2018 yang tercatat sebanyak 3.071 kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kantor cabang pembantu (KCP) kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Asing dan Bank Campuran, masing-masing 4 kantor, 3 kantor, dan 2 kantor. Tren penurunan jaringan kantor bank tersebut umumnya didasari alasan efisiensi biaya operasional sekaligus mengoptimalkan agen Layanan Keuangan Digital yang telah berjalan di masyarakat.

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah

KOMODITAS	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018
					I	II	III
BANK KONVENSIONAL							
JUMLAH BANK UMUM	53	54	55	52	51	51	51
JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH KANTOR BANK UMUM	3.479	3.333	3.318	3.185	3.122	3.173	3.062
JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT							
BANK PEMERINTAH							
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	80	80	89	92	92	92	89
KANTOR CABANG PEMBANTU	1.784	1.652	1.664	1.610	1.609	1.628	1.715
KANTOR KAS	188	209	221	232	190	243	239
BANK PEMERINTAH DAERAH	305	313	359	340	341	344	327
KANTOR PUSAT	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR CABANG	44	45	49	49	47	47	43
KANTOR CABANG PEMBANTU	114	120	149	130	132	134	127
KANTOR KAS	146	147	160	160	161	162	156
BANK SWASTA NASIONAL							
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	192	193	186	186	186	187	136
KANTOR CABANG PEMBANTU	828	774	671	604	578	553	451
KANTOR KAS	81	91	107	94	98	98	79
BANK ASING DAN BANK CAMPURAN							
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	14	14	14	19	19	19	19
KANTOR CABANG PEMBANTU	6	7	7	8	9	9	7
KANTOR KAS	1	-	-	-	-	-	-

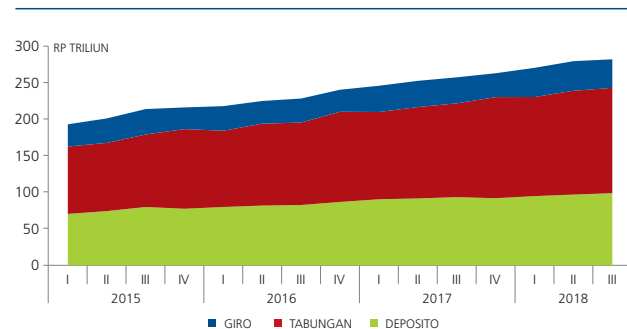
Sumber: Bank Indonesia, diolah

*Termasuk BRI Unit

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan DPK pada triwulan III 2018 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, utamanya disebabkan perlambatan pada komponen tabungan dan giro. Berdasarkan pangasanya, tabungan masih mendominasi DPK (51,2%); diikuti deposito (35,0%); dan giro (13,8%).

Pada triwulan laporan, komponen tabungan tumbuh melambat sebesar 12,40% (yoy); dari 13,49% (yoy) pada triwulan II 2018. Komponen tabungan didominasi oleh pemilik nilai tabungan >Rp10-100 juta (pangsa 36,7%) dan pemilik nilai tabungan >Rp 100-500 juta (pangsa 28,3%). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan tabungan perbankan Jawa Tengah disumbang oleh kedua pemilik nilai tabungan tersebut dengan masing-masing pertumbuhan tabungan dengan nilai >Rp10-100 juta (13,13%; yoy) dan tabungan dengan nilai >Rp100-500 juta (17,40%; yoy).

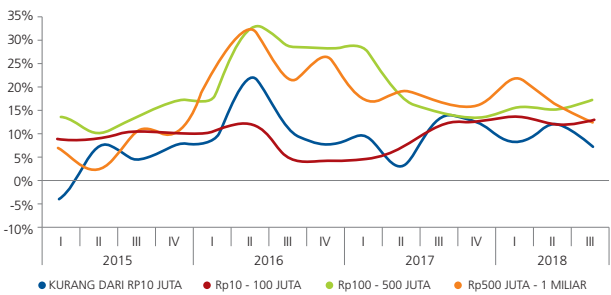


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah

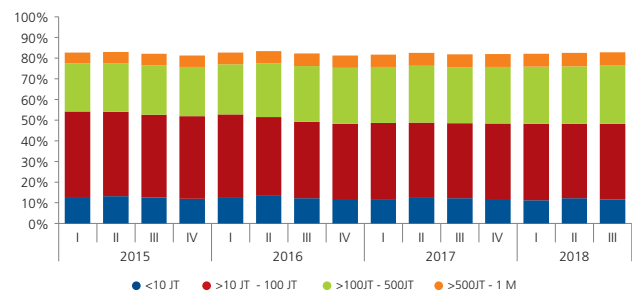
Pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 terpantau mencatatkan pertumbuhan stabil sebesar 5,75% (yoy).

Komponen deposito didominasi oleh deposan dengan nilai deposito >Rp20M (pangsa 25,1%), deposan dengan nilai deposito >Rp 100-500 juta (pangsa 19,2%), dan deposan dengan nilai deposito >Rp2M-5M (pangsa 13,6%).



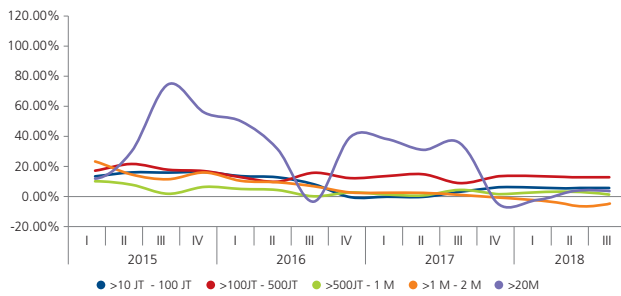
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



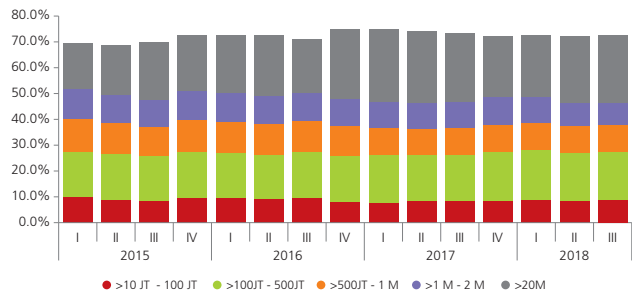
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

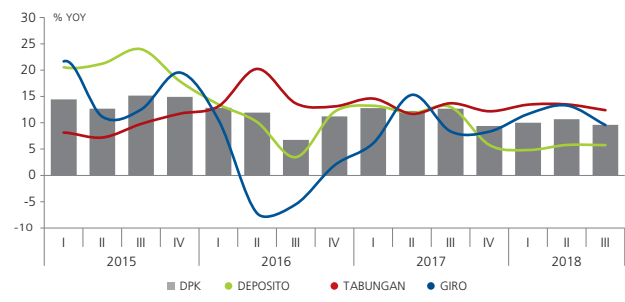


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sementara, kinerja giro perbankan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan, menjadi sebesar 9,57% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (13,29%; yoy). Komponen giro didominasi oleh depositan dengan nilai giro > Rp20M (pangsa 41,9%) dan depositan dengan nilai giro > Rp2M-5M (pangsa 14,9%).

Ketertarikan perbankan Jawa Tengah terhadap depositan besar pada triwulan laporan masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokan DPK berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,07% penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 41,42% dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.



Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah

Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai

DPK	Nominal DPK (Rp Miliar)	Jumlah Rekening	Persentase Nominal	Persentase Rekening
0-100 JUTA	79.818	34.984.389	28,30%	98,95%
100-500 JUTA	64.551	316.938	22,89%	0,90%
500 JT - 1 M	20.839	27.834	7,39%	0,08%
>1 M	116.832	24.680	41,42%	0,07%
TOTAL	282.040	35.353.841	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

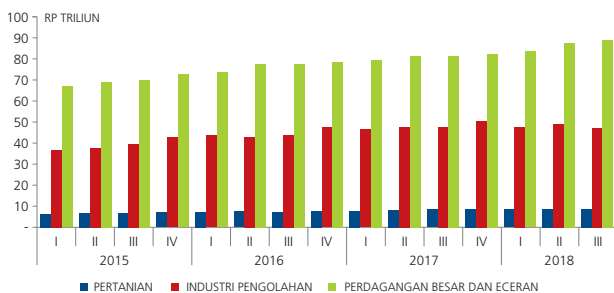
4.2.1.3. Penyaluran Kredit

Kinerja kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 menunjukkan peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp272,37 triliun atau mengalami pertumbuhan yang stabil sebesar 8,62% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (8,59%; yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih berfokus pada sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 32,59% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit sebesar 17,06% diikuti oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa 2,85%. Rasio penyaluran kredit pada sektor pertanian tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah pada triwulan III 2018. Hal ini menunjukkan pembiayaan pada lapangan usaha pertanian masih sangat rendah dan berpotensi untuk diperluas.

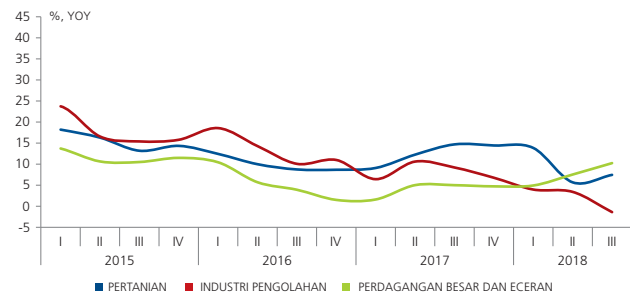
Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 54,94%. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing sebesar 29,79% dan 15,27% dari total kredit perbankan Jawa Tengah. **Pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan III 2018 didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit modal kerja menjadi 11,24% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (10,08%; yoy) dan pertumbuhan kredit investasi menjadi 7,72% (yoy).** Sementara, kredit investasi mencatatkan perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 1,65% (yoy), dibandingkan triwulan lalu sebesar 6,37% (yoy). Berdasarkan pengelompokan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 49,29% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat dari 1,31% debitur dengan realisasi kredit di atas Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 50,71% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan III 2018, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta non lembaga keuangan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.33 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Penggunaan

Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai

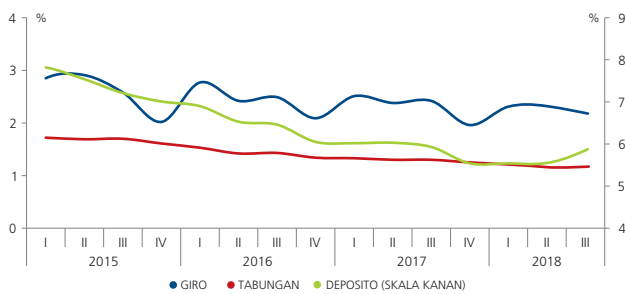
KREDIT	Nominal (Rp Miliar)	Jumlah Rekening	Persentase Nominal	Persentase Rekening
0-100 JUTA	63.126	3.130.843	23,18%	86,90%
100-500 JUTA	71.126	424.906	26,11%	11,79%
500 JT - 1 M	12.903	21.621	4,74%	0,60%
>1 M	125.217	25.577	45,97%	0,71%
TOTAL	272.372	3.602.947	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

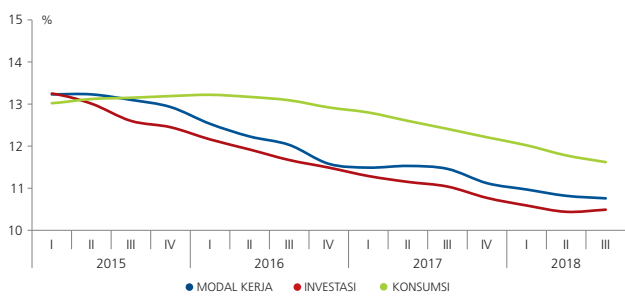
Pada triwulan III 2018, perkembangan suku bunga simpanan perbankan relatif beragam dibandingkan triwulan sebelumnya. Suku bunga simpanan dalam bentuk giro tercatat menurun menjadi 2,19%; dari 2,32% pada triwulan lalu. Suku bunga tabungan tercatat stabil di 1,15%. Sementara, suku bunga deposito meningkat menjadi 5,85% (yoy), dari 5,55% pada triwulan sebelumnya.

Berbeda dengan suku bunga simpanan perbankan yang relatif beragam, suku bunga kredit pada triwulan III 2018 masih melanjutkan tren penurunan dari triwulan I 2018. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan laporan terjadi pada kelompok kredit modal kerja dan konsumsi.



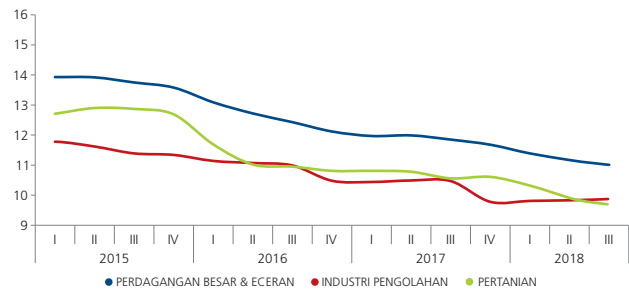
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah

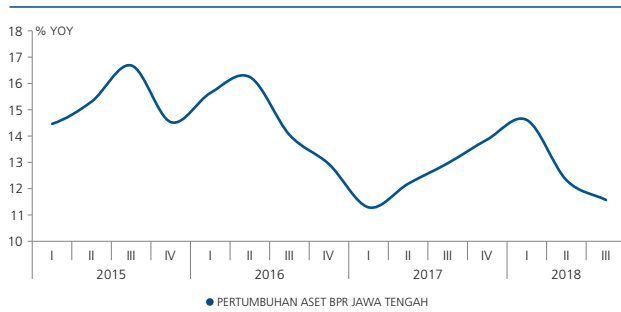
Sementara, suku bunga pinjaman untuk jenis penggunaan investasi meningkat 5 bps dari 10,44% menjadi 10,49% pada triwulan laporan.

Tren relatif lebih stabilnya suku bunga simpanan perbankan, sementara suku bunga kredit yang perlahan-lahan menurun diakibatkan dampak penurunan BI rate secara historis yang langsung direspon dengan penurunan suku bunga pada simpanan, sementara dampaknya pada suku bunga kredit cenderung disesuaikan perlahan-lahan.

Tren penurunan suku bunga kredit juga terjadi pada sektor lapangan usaha utama di Jawa Tengah. Pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan besar dan eceran, suku bunga kredit tercatat mengalami penurunan. Sementara, suku bunga pinjaman lapangan usaha industri pengolahan tercatat mengalami sedikit peningkatan.

4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAH

Sejalan dengan pola kinerja perbankan secara umum, BPR di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan di aset dan penghimpunan DPK, namun mencatatkan peningkatan pertumbuhan di penyaluran kredit. Pada triwulan laporan, aset BPR Jawa Tengah tercatat Rp 30,37 Triliun, bertumbuh 11,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (12,33%; yoy).

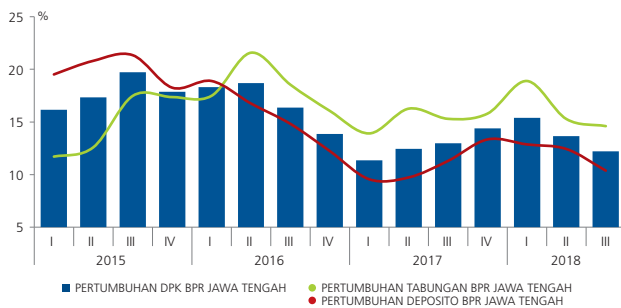


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

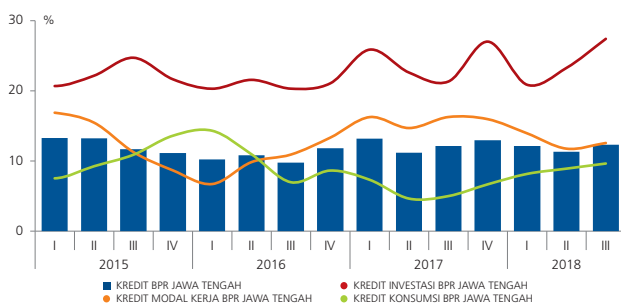
Pertumbuhan DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan III 2018 mengalami perlambatan di seluruh komponen, baik tabungan maupun deposito. DPK BPR Jawa Tengah tercatat Rp22,87 Triliun atau bertumbuh 12,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sebesar 13,65% (yoy). Berbeda dengan bank secara umum, DPK BPR Jawa Tengah didominasi oleh deposito (pangsa 55,99%), kemudian tabungan (pangsa 44,01%).

Meski kinerja aset mengalami perlambatan pertumbuhan, posisi kredit BPR Jawa Tengah pada



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

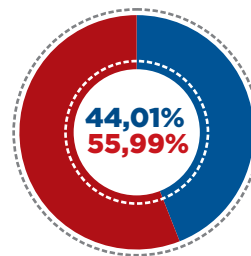


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah

triwulan III 2018 tercatat Rp22,99 Triliun, bertumbuh 12,31% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan III 2018 terutama didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi dan investasi, sementara kredit modal kerja mengalami sedikit perlambatan.

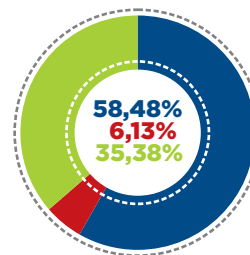
Tujuan penyaluran kredit BPR Jawa Tengah terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (34,87%), kemudian merata dengan pangsa kecil ke berbagai sektor lainnya (49,82%), pertanian (7,61%), dan RT (3,75%). NPL sektor perdagangan besar dan eceran harus diwaspadai karena tinggi pada level 10,28% pada triwulan laporan, sementara NPL RT sebesar 5,77%. Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, akselerasi pertumbuhan kredit terutama disumbang oleh pertumbuhan kredit sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor RT, masing-masing sebesar 13,19% (yoy) dan 23,27% (yoy).



■ PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH ■ PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Sumber: Bank Indonesia, diolah

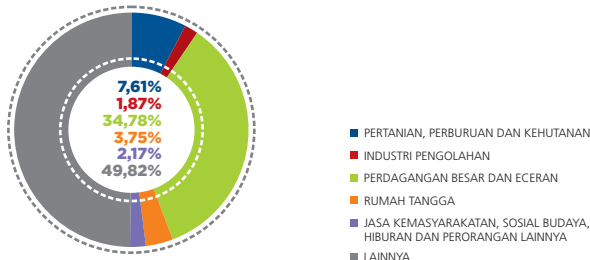
Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah



■ KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH ■ KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH ■ KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

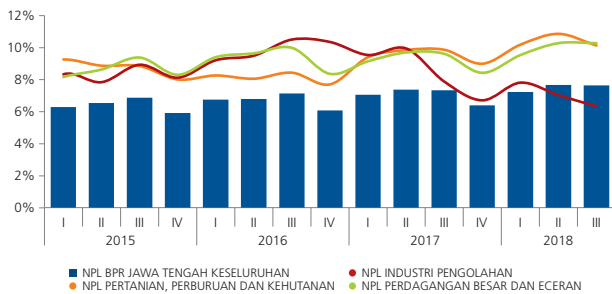
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

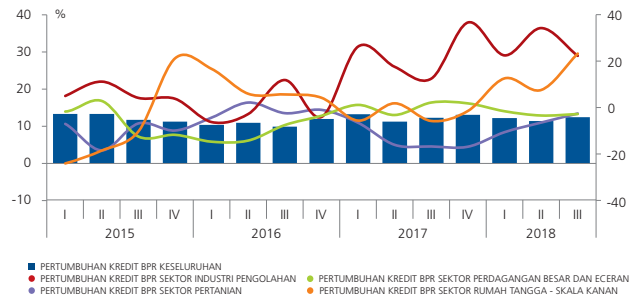
Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah

Kualitas kredit BPR di Jawa Tengah perlu terus perhatian, mengingat tingkat NPL BPR Jawa Tengah stabil tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. NPL pada triwulan laporan tercatat stabil 7,64%.

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 100,50%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 102,65%.

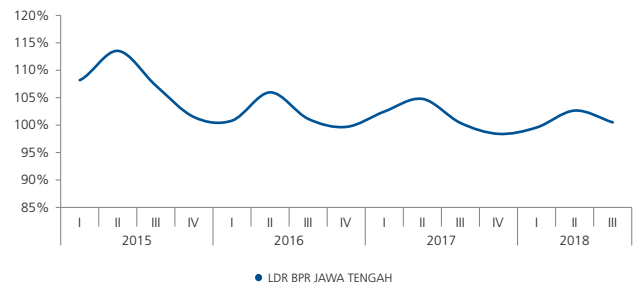
4.4. PERKEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

Upaya perbankan dalam peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM di Jawa Tengah semakin baik. Pada triwulan laporan, sebesar 40,77% dari total kredit disalurkan kepada UMKM, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan lalu sebesar 40,41%. Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 11,50% (yoy) pada triwulan III 2018, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (11,15%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah

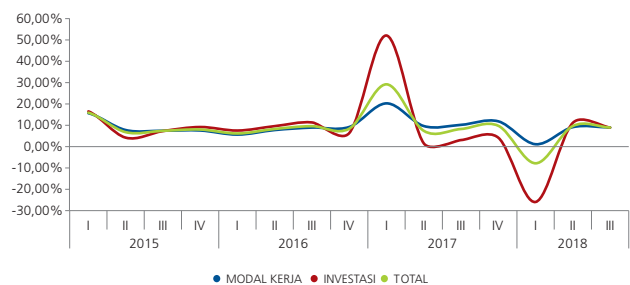


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan provinsi yang tertinggi dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Oktober 2018, kuota KUR Jateng telah terserap 80% atau sebesar Rp17 Triliun. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan KUR yang cepat ini adalah penurunan suku bunga.

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan III 2018 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian. Kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan

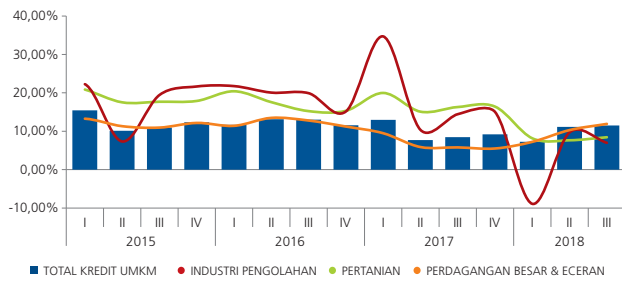
11,92%, terakselerasi dibandingkan triwulan lalu (10,31%; yoy). Kredit UMKM sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 12,37% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,30% (yoy).

Sementara, sektor industri pengolahan mencatatkan perlambatan pertumbuhan sebesar 7,00% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan lalu (9,72%; yoy). Sektor perdagangan besar dan eceran juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan kredit menjadi 23,70% (yoy). Untuk KUR, karena penyaluran Penyaluran KUR Jawa Tengah terbesar saat ini masih

didominasi sektor perdagangan besar. Ke depan, Pemerintah memprioritaskan penyaluran KUR pada sektor pertanian dan kehutanan guna mendorong ketahanan pangan nasional.

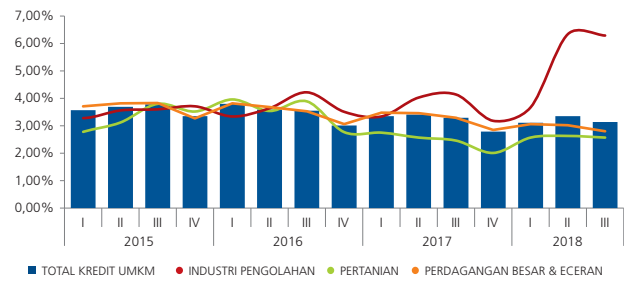
Kualitas kredit UMKM pada triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan, yang dikontribusikan oleh peningkatan kualitas kredit di sektor utama.

Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan besar masing-masing mencatatkan NPL yang menurun pada triwulan laporan menjadi 2,57%, 6,29%, dan 2,80%.



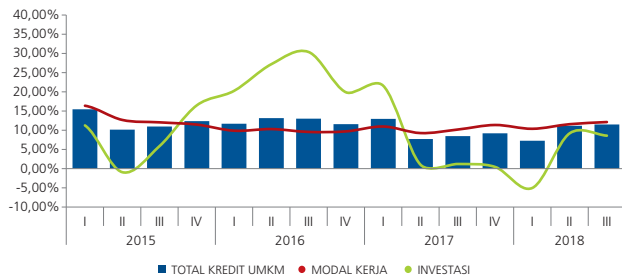
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah



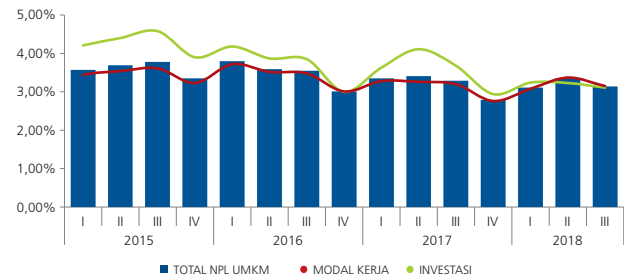
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah

Analisis Indikator Financial Imbalances Jawa Tengah berdasarkan Regional Financial Account and Balance Sheet (RFABS) Triwulan II 2018

SUPLEMEN II

Regional *Financial Account and Balance Sheet* (RFABS) adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui aliran dana dan likuiditas antar sektor institusi; menyusun *interconnectedness* antarsektor institusi; serta mengetahui perilaku aktivitas ekonomi sektor institusi dan sebagai input data penyusunan financial *imbalances*. Regional *Financial Accounts* (RFA) mencatat transaksi aset dan kewajiban finansial, sementara *Regional Balance Sheet* (RBS) mencatat posisi aset dan kewajiban yang dimiliki oleh sektor institusi di regional tertentu pada periode tertentu.

Lebih lanjut, *Regional Account and Balance Sheet* Indonesia digunakan untuk melihat transaksi keuangan antarsektor, baik secara *flows/transaksi* yang terjadi di triwulan tertentu dan posisi akhir aset keuangan dan kewajiban antarsektor, terutama sektor domestik terhadap eksternal.

Berdasarkan analisis statistik RFABS Provinsi Jawa Tengah, posisi keuangan Jawa Tengah pada triwulan II 2018 relatif terjaga di tengah

Tabel 1 Posisi *Net Financial Position*¹⁰ Sektor-sektor di Jawa Tengah Triwulan I dan II 2018

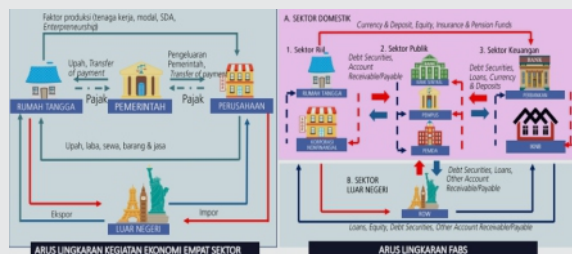
SEKTOR	PRESENTASE THD PDRB	
	2018Q1	2018Q2
KORPORASI (NHC)	-15,04%	-15,98%
RUMAH TANGGA (HH)	16,91%	17,57%
PERBANKAN (DOC)	-0,31%	-0,55%
IKNB (OFC)	0,37%	0,61%
PEMERINTAH DAERAH (LG)	3,06%	4,54%
TOTAL	5,00%	6,20%

Ket.: Nilai Negatif Menunjukkan Net Kewajiban dan Nilai Positif Menunjukkan Net Aset Finansial
Sumber: RFABS Triwulan II 2018

meningkatnya tekanan dari eksternal. Pada triwulan II 2018, Jawa Tengah masih mencatatkan neto aset finansial sebesar 6,20% terhadap PDRB, atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat neto aset finansial 5% terhadap PDRB. Kondisi neto aset finansial tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan region lain, meskipun terdapat peningkatan kebutuhan pembiayaan dari eksternal (*rest of the world*). Peningkatan neto aset finansial tersebut sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan yang tumbuh 11,09% (yoy), lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya (10,16%; yoy).



Gambar 1. Konsep *Regional Financial Account and Balance Sheet* (RFABS)



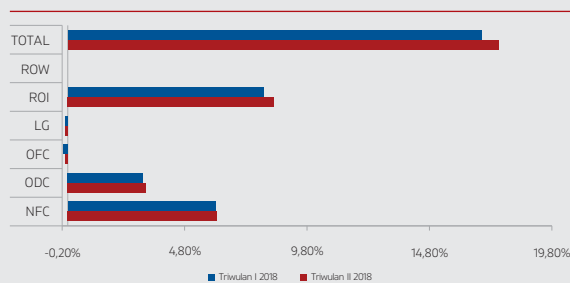
Gambar 2. Gambaran Posisi Keuangan Nasional

10. Selisih antara aset keuangan dan kewajiban

SUPLEMEN II

Pada triwulan II 2018, neto aset finansial Jawa Tengah terutama berasal dari neto aset finansial di sektor rumah tangga (17,57% terhadap PDRB), pemerintah daerah (4,54% terhadap PDRB), serta institusi keuangan nonbank atau IKNB (0,61% terhadap PDRB). Secara sektoral, sektor rumah tangga menjadi sumber utama pembiayaan di Jawa Tengah, yang tercermin dari tingginya neto aset finansial di sektor ini, yaitu sebesar 17,57% terhadap PDRB. Aset finansial sektor rumah tangga sebagian besar disalurkan ke sektor lain berupa penempatan simpanan (*currency and deposits*) dan kepemilikan surat berharga di region lain/*rest of Indonesia*; penyertaan modal di korporasi; serta penempatan simpanan di perbankan.

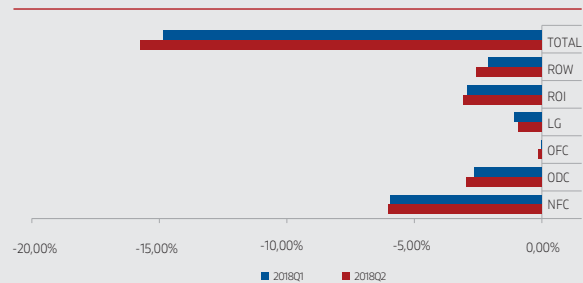
Sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan II 2018 masih terjaga, namun tetap perlu diwaspadai adanya eksposur risiko, terutama yang berasal dari sektor korporasi nonfinansial. Sektor korporasi nonfinansial memiliki net kewajiban terbesar dibandingkan sektor lainnya, yaitu 15,98% terhadap PDRB. Pada triwulan laporan, net kewajiban sektor korporasi mayoritas berasal dari net kewajiban terhadap sektor rumah tangga (6,12% terhadap PDRB), regional lain (3,13%



Gambar 1. Net Financial Position Sektor Rumah Tangga (% PDRB)

terhadap PDRB), dan perbankan (2,97% terhadap PDRB). Berdasarkan *Balance Sheet Approach (BSA)* matriks¹¹, pembiayaan korporasi di Jawa Tengah mayoritas berupa penyertaan ekuitas dari rumah tangga dan dari regional lain. Ketergantungan pembiayaan yang tinggi antara sektor korporasi dengan sektor rumah tangga, regional lain, dan perbankan dapat menimbulkan risiko *interconnectedness*, karena penurunan kinerja keuangan korporasi dapat berdampak pada sektor-sektor tersebut melalui jalur *balance sheet*.

Net kewajiban korporasi cenderung lebih besar dibanding triwulan sebelumnya, sebesar 15,04% terhadap PDRB. Kenaikan net kewajiban mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pendanaan korporasi untuk membiayai aktivitas operasionalnya (modal kerja) maupun ekspansi usaha. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang meningkat menjadi 5,48% (yoy) pada triwulan II 2018, dari triwulan I 2018 yang tumbuh 5,40% (yoy). Lebih lanjut, penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi pada periode laporan juga mengkonfirmasi adanya percepatan aktivitas ekonomi. Penyaluran kredit modal kerja dan kredit



Gambar 2. Net Financial Position Sektor Korporasi (% PDRB)

11. Matriks yang menggambarkan posisi keuangan suatu sektor relatif terhadap sektor lain

SUPLEMEN II

investasi pada triwulan II 2018 tercatat 6,93% (yoy) dan 6,53% (yoy); atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,34% (yoy) dan -7,09% (yoy).

Jawa Tengah juga mendapat eksposur risiko yang berasal dari regional lain atau rest of Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena besarnya penempatan aset oleh rumah tangga Jawa Tengah ke region lain (Rp104 triliun) dan penempatan aset oleh perbankan Jawa Tengah ke region lain (Rp44 triliun). Penempatan aset rumah tangga ke region lain dapat berupa penempatan simpanan dan kepemilikan surat berharga di region lain. Sementara itu, penempatan aset perbankan ke region lain berupa penyaluran kredit oleh perbankan Jawa Tengah kepada *rest of Indonesia*. Relatif besarnya penempatan aset finansial di region lain dapat menimbulkan risiko *spillover effect* bagi rumah tangga dan perbankan Jawa Tengah apabila terjadi guncangan ekonomi di region lain, misal apabila terjadi penurunan harga komoditas.

Meskipun secara umum masih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Jawa Tengah, terdapat tendensi meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan dari eksternal. Hal tersebut terindikasi dari posisi kewajiban keuangan Jawa Tengah kepada eksternal yang sedikit meningkat. Pada triwulan II 2018, nilai net kewajiban sektor ekonomi Jateng terhadap eksternal mencapai 2,66% (terhadap PDRB), atau meningkat dari

Tabel 2 Posisi Net Financial Position Sektor-sektor di Jawa Tengah terhadap Eksternal (% PDRB)

SEKTOR	PRESENTASE THD PDRB	
	2018Q1	2018Q2
KORPORASI (NHC)	-2,16%	-2,63%
RUMAH TANGGA (HH)	0,00%	0,00%
PERBANKAN (DOC)	-0,01%	-0,02%
IKNB (OFC)	0,00%	0,00%
PEMERINTAH DAERAH (LG)	0,00%	0,00%
TOTAL	-2,20%	-2,66%

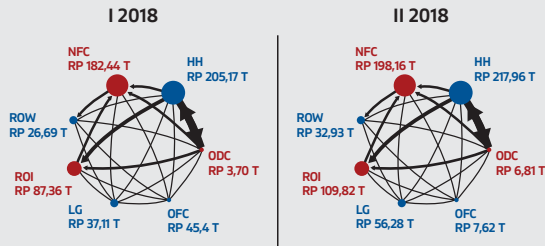
KET: NILAI NEGATIF MENUNJUKKAN NET KEWAJIBAN DAN NILAI POSITIF MENUNJUKKAN NET ASET FINANSIAL
SUMBER: RFABS TRIWULAN II 2018

triwulan I yang sebesar 2,20% terhadap PDRB. Kenaikan ini terutama bersumber dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal oleh sektor korporasi, yaitu berupa peningkatan penyertaan ekuitas dari luar negeri terhadap korporasi di Jawa Tengah. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari data penanaman modal asing di Jawa Tengah. Pada triwulan II 2018, penanaman modal asing di Jawa Tengah adalah sebesar USD 506,30 juta; atau tumbuh 17,20% (yoy), berbalik arah setelah triwulan I 2018 berkontraksi 15,74% (yoy).

Selanjutnya berdasarkan hasil *network analysis*¹², secara umum struktur keuangan antar sektor Provinsi Jawa Tengah masih terjaga, tercermin dari *network* posisi keuangan yang relatif stabil. Interkoneksi tertinggi terdapat antara sektor rumah tangga dengan korporasi, perbankan, dan *Rest of Indonesia* (ROI). Hal ini tercermin dari penyertaan sektor rumah tangga ke korporasi dengan share sebesar 6,12%, ke perbankan sebesar 3,22%, dan ROI sebesar 8,41%. Penyertaan sektor rumah tangga ke korporasi mayoritas dalam bentuk kepemilikan saham, sementara ke perbankan dan ROI dalam bentuk simpanan rumah tangga.

12. *Network* adalah grafik yang menunjukkan posisi suatu sektor yang digambarkan sebagai nodes dan dihubungkan oleh edges yang merupakan ukuran (size) eksposur yang saling terkoneksi.

SUPLEMEN II

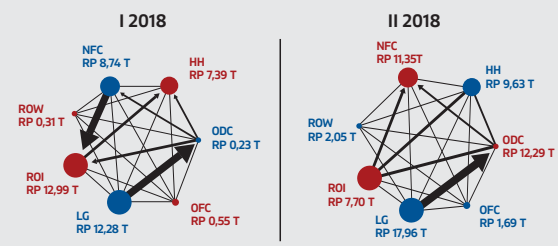


Gambar 3. Perbandingan Matriks Posisi Keuangan Sektoral

Selain itu, penyertaan dana ke korporasi Jawa Tengah juga berasal dari ROI dengan share sebesar 3,13%, perbankan sebesar 2,97%, serta dari *Rest of The World* (ROW) sebesar 2,63%. Meningkatnya pendanaan sektor korporasi dari sektor perbankan berupa pinjaman masih diimbangi oleh kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajiban. Hal ini tercermin dari tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang masih terjaga pada triwulan I dan II 2018, yaitu di bawah 3% (dari threshold rasio NPL 5%).

Dukungan dana dari sektor rumah tangga di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan II 2018, tercermin dari meningkatnya neto aset keuangan rumah tangga pada periode laporan. Namun demikian, meningkatnya penempatan dana dari sektor rumah tangga ke perbankan dalam bentuk simpanan perlu diwaspadai karena berpotensi terjadinya penarikan simpanan rumah tangga secara tiba-tiba dari perbankan.

Dukungan sektor keuangan terhadap sektor rill pada triwulan II 2018 menunjukkan peningkatan, tercermin dari meningkatnya neto aset perbankan



Gambar 4. Perbandingan Matriks Transaksi Keuangan Sektoral

terhadap korporasi. Namun demikian, interkoneksi sektor korporasi Jawa Tengah yang tinggi ke luar Jawa Tengah perlu diwaspadai, khususnya dalam bentuk pinjaman, jika sewaktu-waktu terjadi *shocks* pembiayaan di domestik. Lebih lanjut, peningkatan kewajiban korporasi ke eksternal yang meningkat pada triwulan II 2018 juga perlu diwaspadai seiring dengan dinamika perekonomian global. Ketidakpastian kondisi global yang berdampak pada nilai tukar rupiah perlu diwaspadai mengingat kinerja korporasi Jawa Tengah masih banyak bergantung pada bahan baku impor.

Selanjutnya, dilihat dari *network* transaksi keuangan, Provinsi Jawa Tengah mengalami *net outflow*¹³, terutama berasal dari sektor publik (pemerintah daerah). Pada triwulan II 2018, penempatan dana pemda mayoritas berupa simpanan dan ekuitas di perbankan, ekuitas di sektor korporasi, serta penempatan simpanan di luar Jawa Tengah. Adapun *net outflow* sektor publik pada triwulan II 2018 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018.

13. Selisih penyaluran dana dan penerimaan dana bernilai positif

SUPLEMEN II

Sektor rumah tangga dan IKNB Jawa Tengah pada triwulan II 2018 mengalami *net outflow*, berbanding terbalik dengan triwulan I yang mengalami *net inflow*¹⁴. Meningkatnya penyaluran dana dari sektor rumah tangga antara lain berupa pemberian pinjaman ke sektor korporasi, diikuti oleh simpanan ke perbankan. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan sektor korporasi terhadap pendanaan yang berasal dari sektor rumah tangga.

Di sisi lain, sektor korporasi pada triwulan II 2018 mengalami *net inflow*, setelah periode sebelumnya mengalami *net outflow*. Mayoritas pendanaan sektor korporasi berasal dari sektor rumah tangga dan juga perbankan. Meningkatnya pendanaan sektor korporasi pada triwulan II 2018 menunjukkan semakin meningkat dan optimisnya kegiatan sektor riil dalam mendukung perekonomian Jawa Tengah.

14. Selisih penyaluran dana dan penerimaan dana bernilai negatif





PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan indikator sistem pembayaran tunai dan non tunai di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 menunjukkan kinerja perekonomian daerah yang membaik, secara triwulanan maupun tahunan.

- Pertumbuhan nilai transaksi melalui SKNBI mengalami perbaikan 10,92% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan tahunan yang mengalami kontraksi sebesar 3,21% (yoy).
- Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp13,36 triliun seiring dengan kembali masuknya aliran uang ke BI akibat normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Idul Fitri.
- Penerapan elektronifikasi pembayaran jalan tol dan penyaluran bantuan sosial non tunai dapat terselenggara dengan baik. Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 98%. Mulai akhir triwulan III 2018 akan dilakukan perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah.



5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

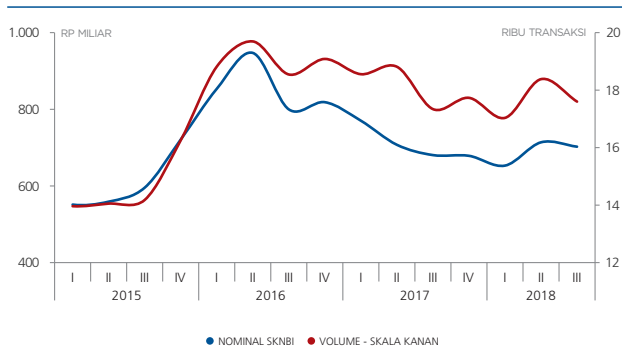
Pertumbuhan nilai transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan III 2018 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh meningkatnya transaksi sektor perdagangan besar-eceran pada triwulan laporan. Selama triwulan III 2018, SKNBI memproses 1.091.261 DKE (3,18% pangsa volume kliring nasional), dengan nilai nominal mencapai Rp43,55 triliun (4,75% pangsa nominal kliring nasional).

Perputaran volume kliring pada triwulan laporan tercatat tumbuh 7,94% (qtq) dibandingkan penyelesaian pada triwulan II 2018 sebesar 1.011.019 DKE yang kontraksi 4,28% (qtq). Sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi, nilai transaksi perputaran kliring pada triwulan III 2018 tercatat tumbuh sebesar 10,92% (qtq) menjadi sebesar Rp43,55 triliun dari sebesar Rp39,26 triliun pada triwulan II 2018 yang kontraksi 3,03% (qtq). Pertumbuhan perputaran kliring pada triwulan III 2018 searah dengan pertumbuhan kliring nasional.

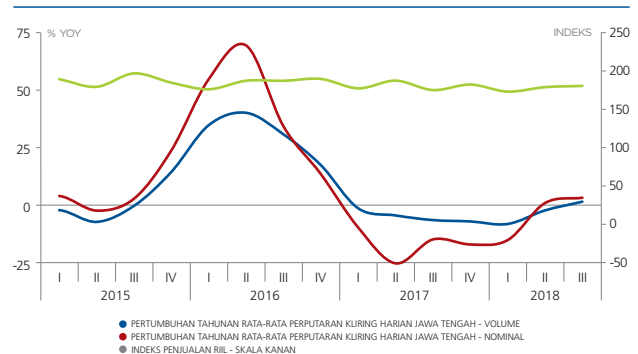
Secara tahunan, penyelesaian nilai transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,21% (yoy), dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun

sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 12,07% (yoy) dengan nilai Rp42,19 triliun. Dari sisi volume, perputaran kliring tercatat tumbuh sebesar 1,51% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang kontraksi sebesar 3,38% (yoy) dengan memproses 1.075.059 DKE.

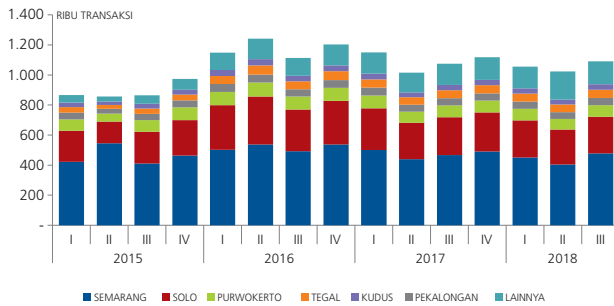
Rata-rata harian transaksi kliring tercatat mengalami perbaikan baik dari sisi volume maupun nominal. Perputaran kliring di Jawa Tengah memproses rata-rata 17.600 DKE per hari, atau lebih rendah 4,25% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 18.382 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp702,42 miliar, tercatat lebih rendah 1,61% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi dengan nilai Rp713,88 miliar miliar per hari. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nominal rata-rata harian perputaran kliring tumbuh 3,21% (yoy), sementara itu volume rata-rata harian perputaran kliring tumbuh sebesar 1,51% (yoy). Perbaikan transaksi kliring pada triwulan III 2018 sejalan dengan penguatan kinerja lapangan usaha perdagangan. Hal ini dikonfirmasi oleh indikator Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang meningkat 1,60 poin menjadi 180,50.



Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah



Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE

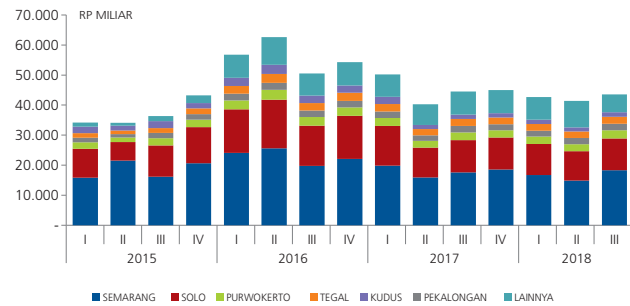


Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD BI (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan, dan Cilacap). Pada triwulan III 2018, KPWD selain BI memproses 244.350 DKE dengan nilai Rp9,79 triliun. Dengan jumlah tersebut, pangsa volume transaksi KPWD selain BI sebesar 22,39% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 22,49% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah.

Diantara KPWD tersebut, kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 43,75% dan 42,09%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah kota Solo dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 22,33% dan 24,33%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 8%.

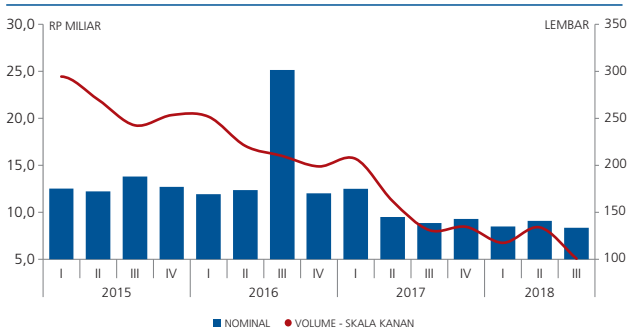
Pada triwulan III 2018 jumlah perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan PWD melalui KPWD selain BI di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30 bank peserta. Jumlah pertukaran warkat tertinggi terdapat di KPWD Kudus dengan rata-rata harian kliring penyerahan mencapai 249 warkat, sementara pertukaran warkat terendah terdapat di KPWD Purworejo dengan rata-rata harian 22 warkat. Kegiatan



Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

operasional PWD yang dilaksanakan oleh KPWD selain BI dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Selama periode pelaporan tidak terdapat kendala serta permasalahan yang dihadapi termasuk keadaan tidak normal dan/atau kondisi darurat.

Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami penurunan, baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan lebih rendah 24,89% (qtq) menjadi 100 lembar per hari dari triwulan sebelumnya sebesar 133 lembar per hari. Dari sisi volume, pangsa penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan sebesar 1,77% dari jumlah cek dan BG yang dikliringkan di Jawa Tengah. Sementara itu, pangsa nilai penarikan cek dan BG kosong sebesar 1,65% dari jumlah cek dan BG yang dikliringkan di Jawa Tengah. Sejalan dengan penurunan volume penarikan cek dan BG kosong, rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong lebih rendah 17,89% (qtq) menjadi sebesar Rp4,02 miliar per hari pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan II 2018 sebesar Rp4,89 miliar per hari. Sementara itu, pertumbuhan tahunan volume dan nominal rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan III 2018 mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan penurunan rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong masing-masing sebesar 23,19% (yoy) dan 13,41% (yoy).

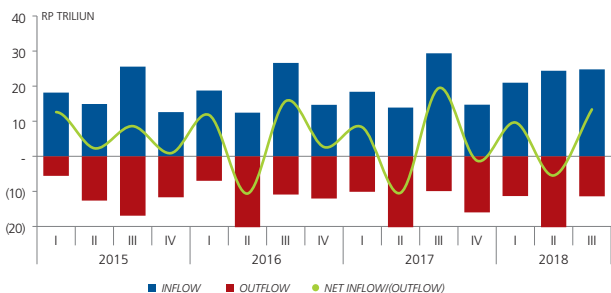


Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan III 2018 mencatatkan posisi *net inflow*, berbalik arah dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang mencatat *net outflow*. Uang yang masuk ke BI (*inflow*) lebih tinggi dibandingkan aliran uang keluar dari BI (*outflow*) seiring dengan kembalinya masuknya uang kartal ke perbankan setelah normalisasi konsumsi masyarakat pada periode Idul Fitri.

Posisi *net inflow* tercatat sebesar Rp13,36 triliun, dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp5,46 triliun atau periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp19,45 triliun. Pada triwulan laporan, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) lebih rendah 61,78% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp29,84 triliun menjadi Rp11,41 triliun. Pada periode yang sama, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan

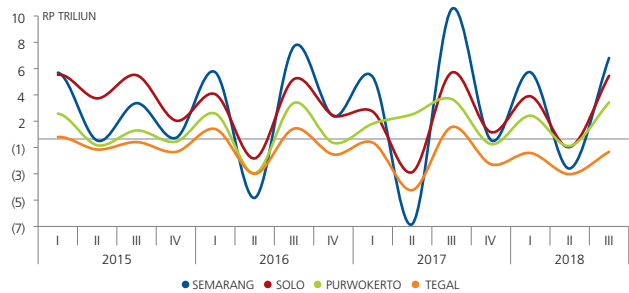


Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

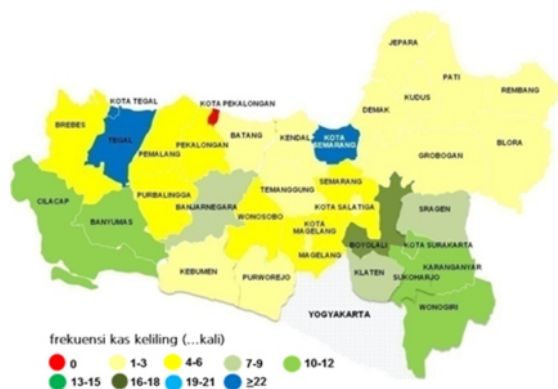
masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) pada triwulan III 2018 meningkat 1,61% (qtq) menjadi sebesar Rp24,77 triliun. *Outflow* pada triwulan II 2018 tercatat tumbuh sebesar 14,95% (yoy), berbalik arah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang kontraksi sebesar 8,82% (yoy). Posisi *inflow* tercatat kontraksi 15,67% (yoy), berbalik arah dibandingkan *inflow* pada triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 10,33% (yoy).

Sebagaimana pola historisnya, uang kartal setelah periode Ramadhan-Idul Fitri cenderung berada pada posisi net inflow. Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang, Solo, dan Purwokerto mencatat net inflow. Sementara aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Tegal mencatat *net outflow*. Peningkatan posisi *net inflow* pada periode laporan seiring dengan kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan jumlah simpanan setelah berbelanja kebutuhan Lebaran.

Dalam rangka penerapan *clean money policy*, Bank Indonesia melakukan layanan kas, baik yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling dan kas titipan. Kas keliling rutin dilaksanakan di dalam kota lokasi BI hingga menjangkau daerah terpencil. Kas keliling dapat melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil



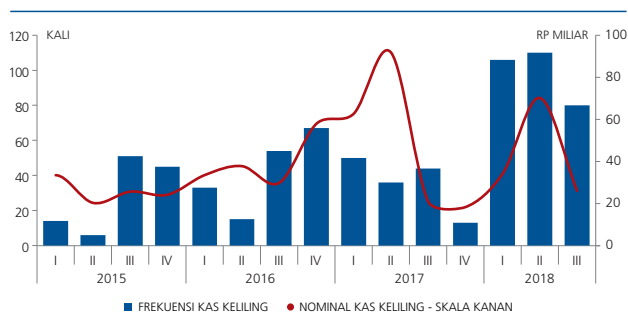
Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah



Gambar 5.1 Peta Jangkauan Layanan Kas Keliling di Jawa Tengah

serta uang layak edar. Pada triwulan III 2018, kantor BI di Jawa Tengah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 80 kali, lebih rendah 3,77% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 110 kali. Sampai dengan triwulan III 2018, kas keliling telah dilaksanakan sebanyak 296 kali. Selama kegiatan kas keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan uang Rupiah sebesar Rp25,98 miliar, lebih rendah 62,96% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp70,15 miliar.

Bank Indonesia di Jawa Tengah secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, untuk selanjutnya disortir dan diganti dengan uang rupiah layak edar. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 35,33% dari inflow. Rasio tingkat pemusnahan uang tidak layak

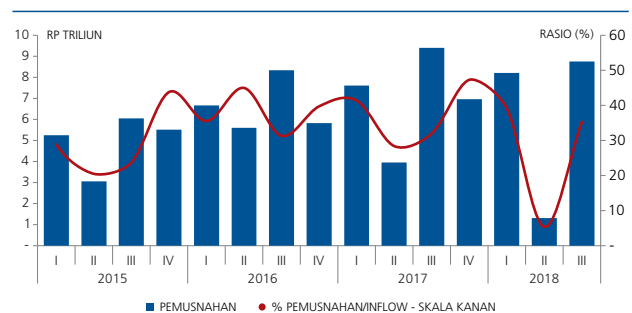


Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

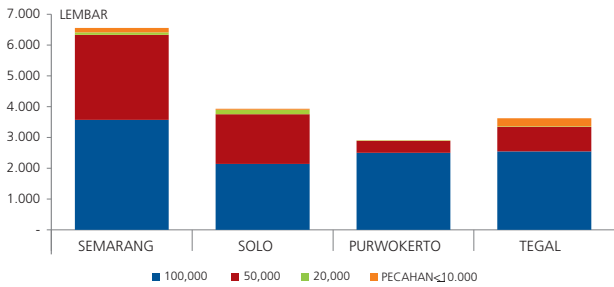
edar lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada di level 5,40%, yang mengindikasikan tingkat kelusuhan uang yang lebih rendah pada triwulan laporan.

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah hingga September 2018 sebanyak 17.019 lembar. Jumlah ini mengalami peningkatan 8,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu sebanyak 15.690 lembar. Jumlah temuan uang palsu ini memiliki pangsa 0,0018% dibandingkan *outflow* dari Bank Indonesia sebesar 952.667.672 lembar. Apabila dibedakan menurut pecahannya, pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 10.763 lembar (63,24%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 5.559 lembar (32,66%). Sedangkan pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing pecahan kurang dari 3%.

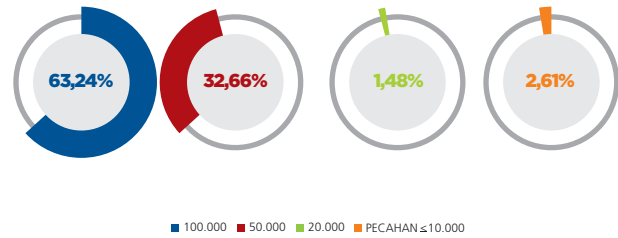
Apabila dibedakan berdasarkan daerahnya, uang palsu paling banyak ditemukan di Semarang (38,52%). Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo (23,10%), Tegal (21,29%), dan Purwokerto (17,09%). Penemuan tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke BI (87,56%), klarifikasi kepolisian ke BI (7,95%), setoran masyarakat melalui loket penukaran (3,17%), serta hasil setoran bank (0,89%). Penemuan uang palsu paling banyak berasal dari klarifikasi perbankan yang mengindikasikan bahwa pemahaman pegawai perbankan mengenai Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) telah cukup baik.



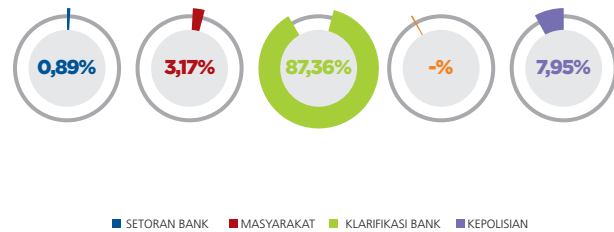
Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar



Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah



Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan



Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

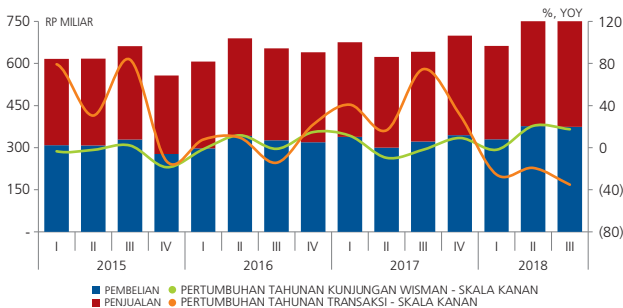
5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

Transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB Berizin meningkat pada triwulan III 2018. Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan laporan mencapai Rp753,06 miliar, lebih tinggi 0,13% (qtq) dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp752,49 miliar. Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi, transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan Bank mencapai Rp374,46 miliar, lebih rendah 0,71% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp377,14 miliar. Sementara itu,

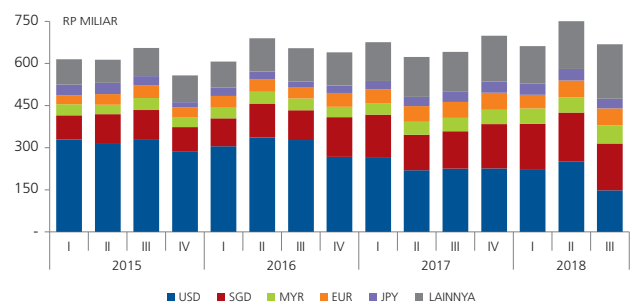
transaksi penjualan tercatat tumbuh sebesar 0,98% (qtq) menjadi Rp379,03 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan, pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta asing juga tercatat lebih tinggi 17,47% (yoy). Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan penjualan mengalami kontraksi sebesar masing-masing 16,44% (yoy) dan 18,52% (yoy). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Singapura (SGD) mendominasi transaksi pada triwulan III 2018 (22,13%) yang diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) (19,64%), Ringgit Malaysia (MYR, 8,67%), Euro (EUR, 7,92%), dan Yen Jepang (JPY, 4,62%). Sementara transaksi mata uang lainnya untuk 44 jenis valuta asing memiliki pangsa 25,77%.

Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik. Di Jawa Tengah terdapat 44 penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang memiliki izin



Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah



Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25 KUPVA (56,82%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 10 KUPVA BB (22,73%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (13,64%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 3 KUPVA BB (6,82%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal.

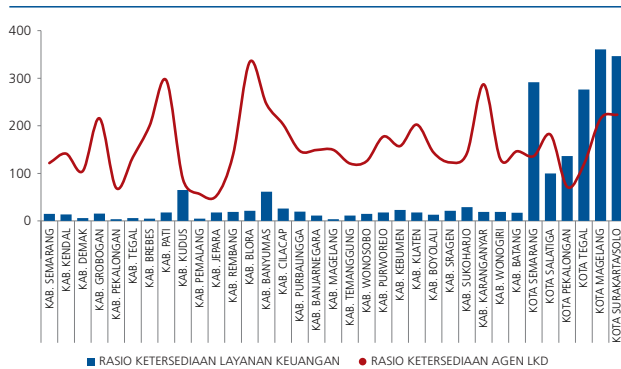
5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

Sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), penggunaan transaksi secara non tunai (elektronifikasi) terus didorong melalui program elektronifikasi transaksi Pemda, pembayaran tol, penyaluran bantuan sosial, serta penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan transaksi pemerintah daerah. Pada triwulan III 2018 dilakukan *workshop* dan *sharing knowledge* mengenai elektronifikasi Pemda kepada seluruh bendaharawan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

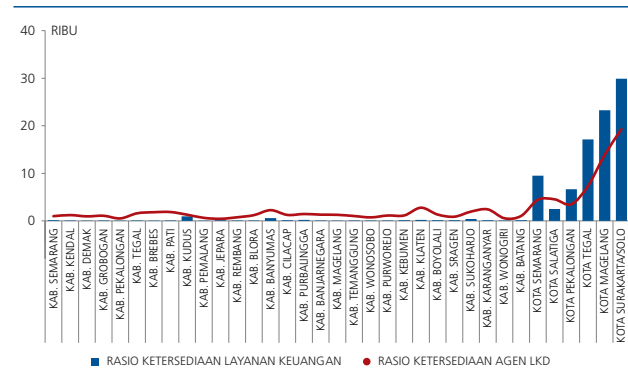
Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 98%. BI, BUJT, dan perbankan bersinergi untuk tetap menjaga kelancaran pembayaran non tunai di jalan tol, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur pada ruas tol eksisting dan fungsional. Dalam hal elektronifikasi bantuan sosial, **BI aktif melakukan koordinasi**

dengan Dinas Sosial dan bank penyalur, melakukan edukasi dan *monitoring* kepada agen penyalur, pendamping, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mulai akhir triwulan III 2018 akan dilakukan perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

Perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat terus didorong melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Berdasarkan rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 100.000 penduduk dewasa di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang penduduknya mendapat layanan keuangan melalui kantor perbankan maupun ATM dalam jumlah tertinggi adalah Kota Magelang dengan nilai rasio 360,4, diikuti oleh Kota Solo (346,1), dan Kota Semarang (291,5). Daerah dengan ketersediaan layanan keuangan yang relatif rendah bagi penduduk dewasa adalah Kabupaten Magelang (3,4).



Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa



Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km² Luas Wilayah

Apabila ditinjau dari luas wilayahnya, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km² luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayahnya adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Pekalongan. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.





KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan III 2018 relatif membaik, tercermin dari berkurangnya persentase kemiskinan dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

- Jumlah penduduk usia kerja pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sedangkan angka pengangguran sedikit mengalami penurunan.
- NTP pada triwulan III 2018 tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
- Indeks Pembangunan Manusia relatif meningkat, yang diindikasikan perbaikan di aspek pendidikan dan kesehatan.
- Angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
- Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2018 sedikit meningkat dibandingkan Maret 2017.



6.1. KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja.

Pada Agustus 2018 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah sebesar 26,34 juta orang, atau meningkat 1,07% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2017 yang berjumlah 26,06 juta orang. Kondisi ini mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami sedikit peningkatan pada triwulan laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 18,01 juta orang menjadi sebanyak 18,06 juta orang atau tumbuh 0,28% (yoy). Peningkatan pertumbuhan angkatan kerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Februari 2018 yang tumbuh sebesar 0,16% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus 2017 yang tumbuh 4,04% (yoy).

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 17,25 juta orang atau 95,52% dari total angkatan kerja. Jumlah pekerja ini hanya tumbuh 0,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,19 juta orang. Sementara itu,

sebesar 4,49% atau 0,81 juta orang merupakan jumlah angkatan kerja yang tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tergolong lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, di mana 94,66% angkatan kerja tergolong bekerja sementara 5,% merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, pada triwulan laporan tercatat sebesar 68,56%, atau turun dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 69,11%. Namun demikian, kondisi TPAK Jawa Tengah ini tercatat masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 67,26%.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Agustus 2018, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 4,20 juta orang atau 24,35% dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2017 yang mencatatkan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 4,32 juta orang atau 25,13% dari total penduduk bekerja.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
ANGKATAN KERJA	18,29	17,30	17,91	17,31	18,20	18,01	18,23	18,06
BEKERJA	17,32	16,44	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25
PENGANGGURAN	0,97	0,86	0,75	0,8	0,76	0,82	0,77	0,81
TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA (TPAK) %	72,19	67,86	69,89	67,15	70,20	69,11	69,58	8,28
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%	5,31	4,99	4,20	4,63	4,15	4,57	4,23	26,34
PEKERJA TIDAK PENUH	4,91	4,51	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	68,56
SETENGAH PENGANGGUR	1,18	1,07	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	4,51
PARUH WAKTU	3,73	3,44	3,74	3,20	3,69	3,24	3,84	4,67

Data diolah dari Sakernas 2015-2018
Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PERTANIAN	5,39	4,71	5,16	5,07	4,97	4,32	4,75	4,20
INDUSTRI	3,33	3,27	3,22	3,25	3,6	3,56	3,75	3,76
KONSTRUKSI	1,34	1,53	1,28	1,43	1,25	1,49	1,23	1,51
PERDAGANGAN	4,01	3,8	4,11	3,71	4,12	4,13	3,26	3,22
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	0,49	0,55	0,55	0,55	0,55	0,61	0,53	0,57
KEUANGAN	0,31	0,34	0,3	0,3	0,39	0,42	0,22	0,24
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN	2,29	2,07	2,39	2,04	2,4	2,48	2,62	2,68
LAINNYA**	0,17	0,16	0,15	2,44	0,16	0,17	1,09	1,07
TOTAL	17,33	16,43	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

*Data diolah dari Sakernas 2015-2018

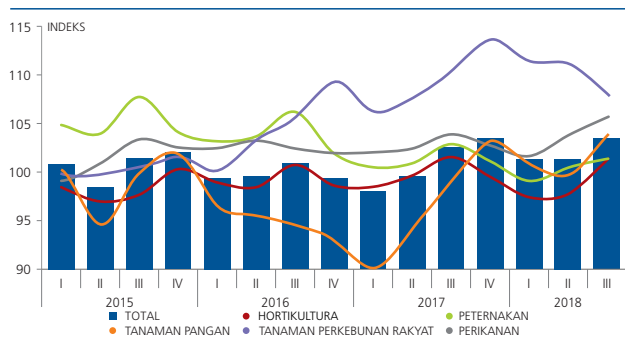
** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan

Sumber : BPS Jawa Tengah

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian mengalami penurunan sebesar 0,12 juta orang atau -2,78% (yoy) pada Agustus 2018. Tren penurunan tenaga kerja pertanian ini telah berlangsung selama 1 (satu) dekade terakhir baik secara nasional maupun di kawasan Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain adanya pergeseran musim panen raya, alih fungsi lahan, pertumbuhan sektor industri yang mendorong peralihan profesi, tingginya kesenjangan kesejahteraan pedesaan dan perkotaan, serta rendahnya pertumbuhan insentif di sektor pertanian dibandingkan subsektor lainnya khususnya sektor jasa dan sektor industri. Imbal hasil NTP yang rendah di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penduduk beralih ke lapangan usaha lain yang memberikan pendapatan lebih baik. Disisi lain, nilai tukar petani (NTP) pada triwulan III 2018 mulai menunjukkan peningkatan setelah pada triwulan sebelumnya pertumbuhannya relatif lambat dan

berfluktuasi tinggi akibat pengaruh siklus musiman dan struktur ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah mengalami pembalikan tren setelah terjadi penurunan di seluruh subsektor sejak triwulan III 2017. Seluruh subsektor pertanian mengalami peningkatan NTP kecuali subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena turunnya secara rata-rata harga komoditas di kelompok tanaman perkebunan rakyat (khususnya komoditas lada/merica, pala biji, kopi dan kakao). Subsektor hortikultura yang hampir selalu mencatatkan defisit dalam satu tahun terakhir dengan angka NTP di bawah 100 mulai menunjukkan perbaikan. Terjadi kenaikan secara rata-rata komoditas di kelompok buah-buahan dan kelompok tanaman obat.

Selanjutnya, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,76 juta orang atau 21,80% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh 2,17% (yoy). Adapun lapangan usaha perdagangan menempati posisi ketiga sebesar 3,22 juta orang atau menyerap 18,67% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 1,26% (yoy). Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha pertanian



Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi fenomena relokasi sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah yang mendorong peralihan tenaga kerja, dari yang semula bekerja di sektor pertanian menjadi ke sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Bila ditinjau dari status pekerjaan utamanya, tenaga kerja yang dominan di Jawa Tengah pada Agustus 2018 adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Jumlah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,12 juta orang, namun lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2018 yang tercatat sebesar 6,35 juta orang atau pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 6,32 juta orang. Apabila jumlah kelompok tersebut ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu buruh tetap, maka akan membentuk proksi kelompok pekerja sektor formal yang juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di sektor formal. Pada Agustus 2018 ini, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,74 juta orang atau 39,07% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut menurun dibandingkan dengan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 6,83 juta orang. Sebaliknya, jumlah pekerja di sektor informal mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsinya dibandingkan total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Pada Agustus 2018, pekerja informal

tercatat sebanyak 10,51 juta orang atau 60,93% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 10,36 juta orang (60,27%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah pekerja berwaktu penuh Jawa Tengah per Agustus 2018 tercatat sebanyak 12,57 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 2,18% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 12,85 juta orang. Kondisi ini ditengarai dipengaruhi adanya pergeseran musim panen raya yang berdampak terhadap berkurangnya jam kerja tenaga kerja di sektor pertanian. Namun demikian, rasio utilisasi yang tinggi tercermin dari rasio pekerja berwaktu penuh (*full time worker*)¹⁵ sebesar 72,87% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami kenaikan, yaitu dari 4,34 juta orang pada periode Agustus 2017 menjadi 4,67 juta orang pada periode laporan. Dengan peningkatan kuantitas tersebut, proporsi pekerja berwaktu tidak penuh terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari sebesar 25,25% pada Agustus 2017 menjadi 27,07% pada Agustus 2018. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja lebih didorong oleh lapangan usaha sementara yang bersifat musiman.

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2015 – Februari 2018 (juta orang)

STATUS PEKERJAN UTAMA	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
BERUSAHA SENDIRI	3,03	2,68	2,86	2,63	3,07	3,30	3,21	3,21
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	3,02	2,93	3,35	3,09	3,23	2,77	3,00	2,96
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	0,57	0,58	0,54	0,50	0,59	0,51	0,63	0,62
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	6,09	5,71	5,89	5,75	6,05	6,32	6,35	6,12
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN	0,92	0,79	0,85	0,86	0,92	0,83	0,72	0,73
PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN	1,34	1,54	1,34	1,43	1,14	1,56	1,23	1,51
PEKERJA TAK DIBAYAR	2,37	2,19	2,32	2,25	2,43	1,90	2,32	2,11
TOTAL	17,34	16,42	17,15	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

Sumber : BPS Jawa Tengah

15. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PEKERJA TIDAK PENUH	4,91	4,51	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67
SETENGAH PENGANGGUR	1,18	1,07	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	0,90
PEKERJA PARUH WAKTU	3,73	3,44	3,74	3,2	3,69	3,24	3,84	3,77
PEKERJA PENUH	12,41	11,92	12,19	12,29	12,71	12,85	12,56	12,57
TOTAL	17,32	16,43	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

* Data diolah dari Sakernas 2015-2018
Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

STATUS PEKERJAN UTAMA	2015*		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
SD KE BAWAH	9,39	8,61	8,92	8,44	8,69	8,40	8,49	8,25
SMP	3,15	3,16	3,28	3,29	3,47	3,35	3,59	3,38
SMA UMUM	1,94	1,91	1,9	1,78	1,97	2,11	1,95	2,17
SMA KEJURUAN	1,51	1,49	1,64	1,71	1,85	1,82	2,03	1,93
DIII/III DAN UNIVERSITAS	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,39	0,34	0,39
UNIVERSITAS	0,98	0,91	1,06	0,93	1,12	1,12	1,06	1,12
TOTAL	17,32	16,44	17,16	16,5	17,44	17,19	17,46	17,25

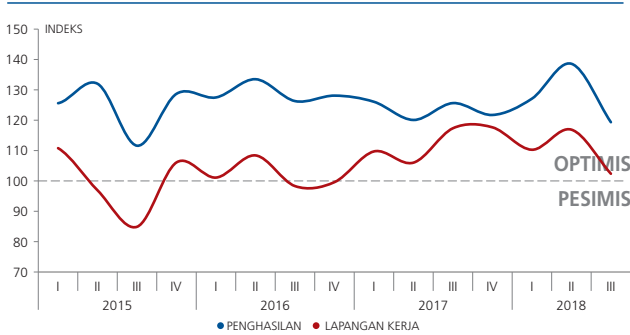
Sumber : BPS Jawa Tengah

Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Jawa Tengah relatif diimbangi oleh peningkatan kualitasnya. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan yang menargetkan bahwa tingkat pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2018 tercatat mencapai 52,12% dari jumlah tenaga kerja atau sebanyak 8,99 juta orang, meningkat sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 8,79 juta orang. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah tersebut utamanya disumbang oleh pertumbuhan tenaga kerja terampil dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan yang tercatat sebesar 1,93 juta orang atau meningkat 6,04% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 lalu. Perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga terampil ini diharapkan

dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di industri pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 8,25 juta orang atau menurun dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 8,40 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

6.2. PENGANGGURAN

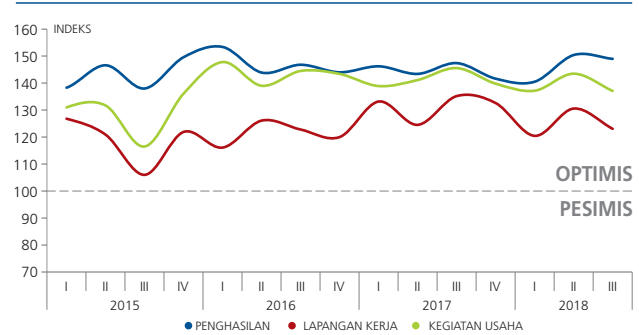
Angka pengangguran mengalami sedikit penurunan pada Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/pengangguran pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 0,81 juta orang, atau berkurang 1,22% (yoy) dibandingkan kondisi Agustus 2017 yang berjumlah 0,82 juta orang. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang tercatat tumbuh 0,28% (yoy) menjadi 18,06 juta orang pada



Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

periode yang sama. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi penyerapan tenaga siap kerja di Jawa Tengah yang lebih baik sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang 11,57% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 7 juta orang.

Seiring dengan penurunan angka pengangguran, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah juga mengalami penurunan. TPT Jawa Tengah terpantau menurun dari 4,57% pada Agustus 2017 menjadi 4,51% pada Agustus 2018. TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 5,34%. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT pada Agustus 2018 di perkotaan (5,15%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di pedesaan (3,87%). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu TPT di perkotaan relatif stabil sedangkan TPT di pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,14%. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, khususnya di pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2018 – triwulan III 2018 yang menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan keseluruhan tahun 2016–2017.



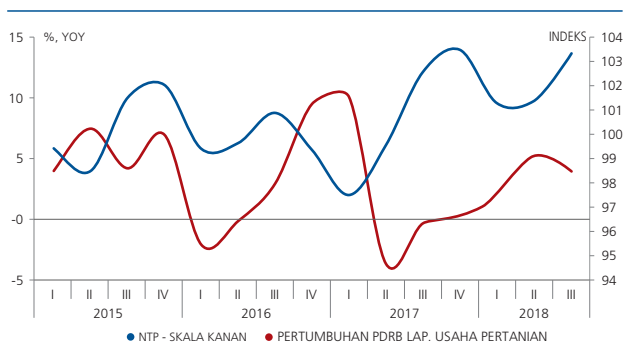
Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, konsumen masih memandang optimis pertumbuhan lapangan pekerjaan di Jawa Tengah walaupun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut konsumen menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong komponen penghasilan mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan perkembangan terkini pada triwulan III 2018, konsumen memperkirakan berlanjutnya tren peningkatan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha di Jawa Tengah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan ke depan.

6.3. NILAI TUKAR PETANI¹⁶

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan II 2018 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan tren yang sama dengan tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan NTP, sebagai dampak pemulihan produktivitas tanaman pertanian dan hortikultura di Jawa Tengah setelah mengalami gangguan akibat fenomena *El Nino* di tahun 2016. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 103,31 atau meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 101,36 maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 102,56.

16. Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan usaha Pertanian

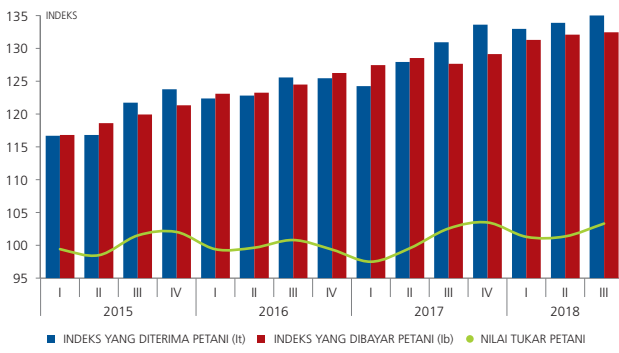
Dalam kurun empat triwulan terakhir, NTP Jawa Tengah mencatatkan perbaikan dengan selalu berada di atas ambang batas 100, yang berarti penghasilan agregat yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya.

Perbaikan NTP ini sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2018, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,88% (yoy); lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan usaha ini pada periode yang sama tahun lalu yang mengalami penurunan sebesar 0,22% (yoy), walaupun lebih lambat jika dibandingkan triwulan lalu (5,14%; yoy). Pendapatan petani membaik, seiring dengan meningkatnya indeks harga yang diterima petani (It) dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Perbaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan III 2018 didorong oleh meningkatnya penerimaan petani yang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan pengeluarannya. Penerimaan yang meningkat tercermin dari peningkatan indeks yang diterima petani (It) dari 133,89 menjadi 136,83 atau meningkat sebesar 2,20% (qtq) pada triwulan laporan. Peningkatan It terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan yang meningkat sebesar 4,19% (qtq) dari semula sebesar 135,23 menjadi 14,89. Kenaikan It pada triwulan III 2018 disebabkan oleh kenaikan rata-rata kelompok

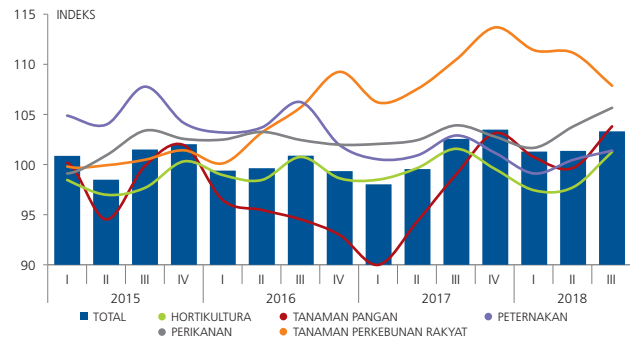
padi (komoditas gabah) dan kelompok palawija (komoditas jagung, ketela pohon dan ubi jalar). Sub sektor hortikultura juga mengalami peningkatan It sebesar 3,61% (qtq) menjadi sebesar 134,97. Hal ini tercermin dari kenaikan secara rata-rata berbagai komoditas buah-buahan dan kelompok tanaman obat. Sedangkan kelompok sayur-sayuran secara rata-rata mengalami penurunan. Selain itu, kenaikan indeks penerimaan juga terjadi di subsektor perikanan, yang meningkat sebesar 1,82% (qtq) dan subsektor peternakan yang meningkat sebesar 1,81% (qtq). Di sisi lain, subsektor tanaman perkebunan rakyat justru mengalami penurunan indeks penerimaan sebesar 2,72% (qtq); dari 147,78 di triwulan II 2018 menjadi 143,76 pada triwulan laporan. Penurunan It tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas di kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya lada/merica, pala biji, kopi dan kakao.

Sementara itu, pengeluaran petani, yang digambarkan oleh indeks yang dibayarkan petani (Ib) meningkat dengan skala yang sedikit lebih tinggi yakni 0,26% (qtq); dari sebelumnya 132,10 pada triwulan II 2018 menjadi 132,45 pada triwulan laporan. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara persisten. Peningkatan biaya pengeluaran petani pada periode laporan juga berlangsung pada seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada subsektor peternakan (0,88%; qtq), diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat (0,24%; qtq), subsektor tanaman pangan dan perikanan masing masing sebesar 0,04% (qtq). Lebih lanjut, peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di seluruh komponen, baik biaya kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Walaupun harga bahan makanan cenderung terjaga, pengeluaran konsumsi lainnya khususnya untuk makanan jadi, minuman,



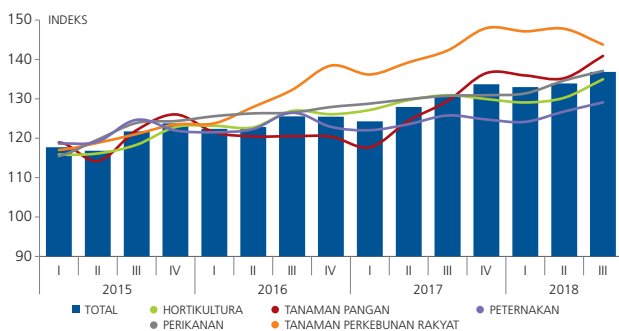
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya



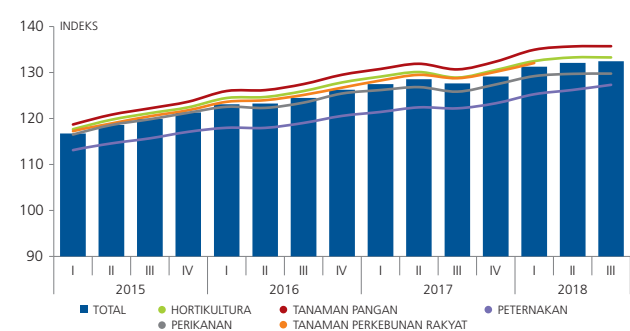
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

rokok, dan tembakau; serta untuk perumahan mengalami peningkatan. Sementara itu, pengeluaran untuk BPPBM meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang modal. Peningkatan biaya relatif lebih tinggi pada komponen BPPBM karena biaya-biaya tersebut yang digunakan secara langsung untuk mengantisipasi ataupun menangani gangguan proses budidaya tanaman/ternak yang biasanya berkaitan erat dengan faktor cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi kemampuan produksi petani. Lebih lanjut, hal ini pun turut memengaruhi tingkat kesejahteraan petani sebagaimana tercermin dari angka NTP.

Kemampuan produksi petani pada periode laporan tercatat mengalami peningkatan. Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)¹⁷ pada triwulan III 2018 naik 1,02% (qtq) menjadi 108,93 dari sebelumnya 107,83 pada triwulan II 2018. Peningkatan NTUP pada triwulan laporan terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali subsektor tanaman perkebunan rakyat. Peningkatan NTUP terutama disebabkan oleh subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang masing-masing meningkat sebesar 3,08% (qtq) dan 2,90% (qtq) menjadi 106,15 dan 110,20 pada triwulan III 2018.

17. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

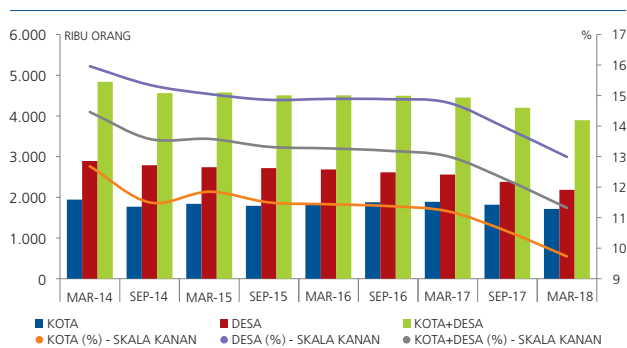
SUBSEKTOR	2015				2016				2017				2018		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
TANAMAN PANGAN	106.68	97.5	103.73	106.24	101.17	99.83	99.22	98.17	94.61	99.42	102.76	107.90	104,80	102,98	106,15
HORTIKULTURA	102.91	102.83	104.49	107.76	107.43	106.84	109.76	107.99	107.66	109.28	110.04	108.79	107,26	107,08	110,19
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	103.71	105.4	106.87	108.6	107.97	111.07	114.32	119.03	114.35	116.07	117.92	122.96	120,60	119,35	114,69
PETERNAKAN	109.24	109.08	113.60	109.88	109.64	110.44	113.32	109.00	107.62	108.24	109.50	108.22	106,04	107,14	107,24
PERIKANAN	103.92	106.17	109.31	109.46	111.26	112.06	111.87	112.7	113.06	113.46	113.57	113.18	112,45	114,77	115,65
TOTAL	104.99	103.09	107.00	107.95	106.05	106.16	107.85	106.78	104.44	106.88	108.79	110.71	108,36	107,83	108,93

Sumber : BPS Jawa Tengah

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah per Maret 2018 sebanyak 3.897 ribu jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.451 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan secara persentase menjadi 11,32% dari total penduduk Jawa Tengah, atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 13,01% dari jumlah penduduk.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan mengalami penurunan dari 2.562 ribu jiwa pada Maret 2017 menjadi 2.181 ribu jiwa pada Maret 2018. Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang berada di perkotaan menurun dari 1.889 ribu jiwa pada Maret 2017 menjadi 1.716 ribu jiwa pada Maret 2018.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (ribuan orang)

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2018 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Apabila dibandingkan dengan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 14,86% (yoy) atau setara dengan 381 ribu orang. Sementara di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun 9,15% (yoy) atau setara dengan 173 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2018 mencapai 2.181 ribu jiwa sedangkan di perkotaan mencapai 1.716 ribu jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 14,77% pada Maret 2017 menjadi 12,99% pada Maret 2018, sedangkan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 11,21% pada Maret 2017 menjadi 9,73% pada Maret 2018. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan optimalisasi program atau anggaran.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional dan program pemerintah provinsi seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2017 (Rupiah)

GARIS KEMISKINAN	2011	2012	MAR 2013	SEP 2013	MAR 2014	SEP 2014	MAR 2015	SEP 2015	MAR 2016	SEP 2016	MAR 2017	SEP 2017	MAR 2018
KOTA	222.430	245.817	254.801	268.397	279.036	286.014	299.011	308.163	315.269	322.799	334.522	339.692	353.240
DESA	198.814	223.622	235.202	256.368	267.991	277.802	296.864	310.295	319.188	322.489	331.673	337.657	348.206
KOTA & DESA	209.611	233.769	244.161	261.881	273.056	281.750	297.851	309.314	317.348	322.748	333.224	338.815	350.875

Sumber : BPS Jawa Tengah

untuk masyarakat miskin. Pada tahun 2017, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Tengah yang menerima bantuan sosial non tunai berjumlah 969.513 keluarga dengan total bantuan PKH yang dianggarkan sebesar Rp1,83 triliun. Jumlah KPM di Jawa Tengah ini memiliki kontribusi sebesar 16% - 17% terhadap jumlah KPM nasional. Sedangkan untuk KJS sendiri dialokasikan bagi 12.764 penerima dengan total anggaran sebesar Rp38,29 miliar. Selain itu, di tahun 2017 pemerintah menargetkan untuk melakukan perbaikan 20.027 unit RLTH yang tersebar di 385 Kecamatan dan di 1.141 Desa dengan total anggaran sebesar Rp200 miliar dari total seluruh RLTH Jawa Tengah yang berjumlah 1.682.723 unit.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami penurunan sebesar 6,55% (yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada 15,02% dari total penduduk miskin nasional, menurun dibandingkan kontribusi pada Maret 2017 yang sebesar 16,03%.

Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan¹⁸. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan tahunan sebesar 5,60% (yoy) dari Rp334.522 per kapita/bulan pada Maret 2017 menjadi Rp353.240 per kapita/bulan pada Maret 2018. Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 4,98% (yoy), dari Rp331.673 per kapita/bulan pada Maret 2017 menjadi Rp348.206 per kapita/bulan pada Maret 2018. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan desa meningkat 5,30% (yoy) dari Rp333.224 per kapita/bulan pada Maret 2017 menjadi Rp350.875 per kapita/bulan pada Maret 2018.

Kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin. Namun demikian, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat pada triwulan laporan meningkat, seiring membaiknya pendapatan masyarakat.

6.5. PEMBANGUNAN MANUSIA¹⁹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 70,52; meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 69,98. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 – 80). Capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional dengan nilai IPM 70,81; meningkat dibandingkan IPM tahun 2016 yang sebesar 70,18.

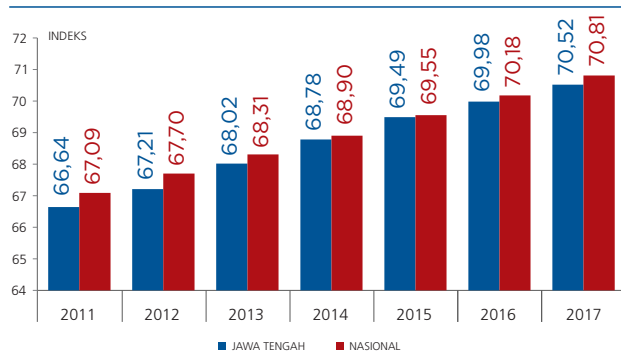
18. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

19. Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:

a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)

b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

c. Standar Hidup: PNB per kapita



Sumber : BPS Nasional

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers

PROVINSI	IPM		PERTUMBUHAN IPM (% , YOY)
	2016	2017	
BANTEN	70,96	71,42	0,65
DKI JAKARTA	79,60	80,06	0,58
JAWA BARAT	70,05	70,69	0,91
JAWA TENGAH	69,98	70,52	0,77
DI YOGYAKARTA	78,38	78,89	0,65
JAWA TIMUR	69,74	70,27	0,76
NASIONAL	70,18	70,81	0,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

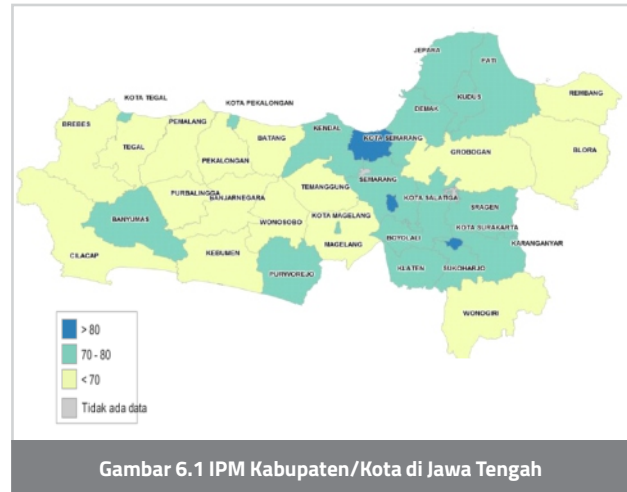
Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah setelah Jawa Timur. Status pembangunan manusia di seluruh provinsi di kawasan Jawa telah berada pada kategori tinggi (nilai IPM 70-80) dengan indeks tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 80,06. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2017.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup.

Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

DIMENSI	SATUAN	TAHUN						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KESEHATAN								
ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)	TAHUN	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08
PENGETAHUAN								
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	TAHUN	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	TAHUN	6,74	6,77	6,8	6,93	7,03	7,15	7,27
STANDAR HIDUP LAYAK								
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN	RUPIAH	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377
IPM		66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,86	70,52
PERTUMBUHAN IPM	%	0,84	0,86	1,21	1,12	1,04	0,71	0,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah



Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi (nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai IPM < 60).

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

6.6. PEMERATAAN PENDUDUK

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2018 sedikit meningkat.

Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada Maret 2018, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,378; sedikit mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 0,365. Meskipun relatif kecil, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional yang sebesar 0,389. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah menempati urutan pertama terendah, diikuti oleh Jawa Timur (0,379) dan Banten (0,385), sedangkan tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta (0,441) dan Jawa Barat (0,407).

Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

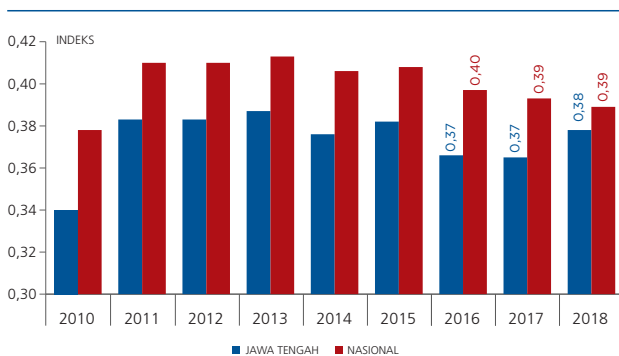
PROVINSI	KOEFSIEN GINI					PERTUMBUHAN MAR 18/MAR 17 (% , YOY)
	MAR-16	SEP-16	MAR-17	SEP-17	MAR-18	
JAWA TENGAH	0,366	0,357	0,365	0,365	0,378	3,56
BANTEN	0,394	0,392	0,382	0,379	0,385	0,79
JAWA TIMUR	0,402	0,402	0,396	0,415	0,379	-4,29
JAWA BARAT	0,413	0,402	0,403	0,393	0,407	0,99
DKI JAKARTA	0,411	0,397	0,413	0,409	0,394	-4,60
DI YOGYAKARTA	0,420	0,425	0,432	0,440	0,441	2,08
INDONESIA	0,397	0,394	0,393	0,391	0,389	-1,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta mencatatkan adanya penurunan tingkat ketimpangan dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, empat provinsi lain yaitu Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah mencatatkan peningkatan koefisien Gini dibandingkan Maret 2017, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang lebih besar pada periode laporan.

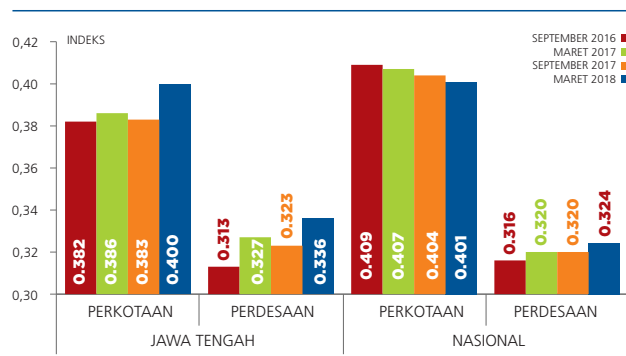
Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada Maret 2018, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah tercatat sebesar 0,40; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,34. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional sebesar 0,40; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,32.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah





PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan IV 2018.

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2019 diperkirakan menguat dibandingkan dengan triwulan IV 2018. Dari sisi pengeluaran, peningkatan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan diperkirakan melambat.
- Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan mengalami perbaikan, meskipun relatif terbatas.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2019 DAN TAHUN 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2019 diperkirakan masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perbaikan bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan masih tertahan di awal tahun, di tengah berlanjutnya penguatan impor luar negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diprediksi tumbuh melambat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3%-5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang diperkirakan 5,2%-5,6%. Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap meningkatnya permintaan domestik. Optimisme terhadap percepatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh prospek belanja pemilu serta dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran

bansos, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali mendukung terjaganya daya beli masyarakat, sehingga turut berperan terhadap akselerasi konsumsi rumah tangga. Namun demikian, tren peningkatan harga minyak dunia yang diikuti dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, dikhawatirkan berpengaruh terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat.

Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan investasi pada 2019. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan semakin membaik seiring dengan membaiknya penerimaan pajak, meskipun dari sisi belanja pemerintah masih cenderung bersifat jangka pendek.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor luar negeri diperkirakan lebih terbatas, yang disebabkan oleh meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh melandai dan tidak merata, serta risiko meningkatnya ketegangan hubungan perdagangan antarnegara akan berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dunia, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Di samping itu, risiko kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) yang masih

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2017**					2018**					2019p	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IVp	TOTALp	Ip	TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,65	4,89	4,32	4,65	4,63	4,67	5,15	4,30	↑	↑	↑	↑
KONSUMSI LNPRT	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	↑	↑	↔	↑
KONSUMSI PEMERINTAH	2,22	(4,97)	6,64	5,81	2,93	5,26	2,48	2,38	↑	↑	↑	↑
PMTB	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,37	8,94	10,15	↑	↑	↑	↑
EKSPOR LUAR NEGERI	8,30	(1,71)	33,93	13,22	12,55	12,33	15,71	16,26	↑	↑	↓	↑
IMPOR LUAR NEGERI	16,19	(11,75)	12,81	25,07	9,98	18,36	45,54	47,74	↑	↑	↑	↓
NET EKSPOR ANTARDAERAH	20,88	(12,05)	(13,55)	115,20	2,04	14,07	45,04	39,71	↑	↑	↓	↑
PDRB	5,32	5,18	5,17	5,40	5,27	5,40	5,48	5,25	↑	↑	↑	↑

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

akan berlanjut pada 2019 dapat berpengaruh terhadap kebijakan impor pelaku usaha, karena pemenuhan barang impor menjadi lebih mahal nilainya.

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Secara keseluruhan, konsumsi diperkirakan akan mengalami percepatan pada triwulan I 2019. Peningkatan pertumbuhan diproyeksikan terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, sedangkan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) diperkirakan tumbuh stabil pada level yang relatif tinggi.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih cepat pada triwulan I 2019. Penyesuaian UMK Jawa Tengah yang ditetapkan sebesar 8,03% pada tahun 2019 diperkirakan turut menjaga daya beli masyarakat. Lebih lanjut, belanja pemilu terkait kegiatan kampanye dan persiapan Pileg dan Pilpres tahun 2019 diperkirakan mencapai puncak pada triwulan I, sehingga diharapkan dapat memberikan *spillover* berupa meningkatnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memiliki pangsa hampir mencapai 60% dari total PDRB Jawa Tengah, sehingga akselerasi komponen ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Peningkatan ini juga turut didorong oleh berlanjutnya kegiatan pembangunan infrastruktur swasta dan pemerintah yang diyakini mampu mendorong tingkat mobilisasi dan konsumsi masyarakat di Jawa Tengah. Semakin besarnya komitmen pemerintah untuk perlindungan daya beli dan pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan melalui peningkatan alokasi anggaran bansos/program pengendalian sosial dalam APBN 2019 juga turut mendukung terjaganya daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, tingkat inflasi yang rendah dan terkendali juga mendukung daya beli konsumen tetap terjaga. Namun demikian, berlanjutnya tren kenaikan harga minyak dunia yang ditransmisikan pada kenaikan harga BBM nonsubsidi, dapat menahan konsumsi masyarakat di masa mendatang dan daya beli masyarakat. Selain itu pemberlakuan kenaikan tarif PPh impor atas 1.147 komoditas yang termasuk sebagai barang konsumsi dan barang yang diproduksi dalam negeri, diperkirakan sedikit meredam pengeluaran masyarakat atas barang konsumsi impor.

Sejalan dengan konsumsi swasta yang meningkat, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan juga tumbuh tinggi sejak awal tahun. Hal tersebut terutama ditopang oleh belanja pemilu yang diperkirakan mencapai puncak pada triwulan I 2019. Biaya pelaksanaan Pemilu 2019 yang lebih besar dari 2014 turut memberikan dorongan positif terhadap prospek konsumsi ke depan. Lebih lanjut, dukungan pemerintah melalui peningkatan alokasi anggaran bansos/program perlindungan sosial juga diperkirakan akan mendorong naiknya konsumsi pemerintah. Secara keseluruhan tahun, anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran (TA) 2019 ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun atau meningkat 5,23% dari APBD-P 2018. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 ditetapkan sebesar Rp26,46 triliun atau meningkat 4,32% dari APBD-P 2018.

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2019. Beberapa proyek investasi *multiyears* diperkirakan akan disebut pengerjaannya sejak awal tahun, seperti proyek pembangkit listrik di Batang, Cilacap, dan Jepara; penyelesaian Tol Trans Jawa; Pembangunan Bandara Wirasaba (Bandara Jenderal Soedirman); Perluasan

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	2017**	2018**					2019 _p	
	TOTAL	I	II	III	IV _p	TOTAL _p	I _p	TOTAL _p
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	1,46	1,72	5,14	3,88	↓	↑	↑	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	4,35	4,85	4,39	3,98	↑	↑	↑	↑
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	6,10	4,81	4,53	5,25	↑	↓	↓	↑
PDRB	5,27	5,40	5,48	5,25	↑	↑	↑	↑

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

Bandara Adi Sumarmo dan Kereta Api Akses Bandara; SPAM Semarang Barat; serta KRL Solo-Yogyakarta. Dari sisi swasta, risiko berlanjutnya kenaikan FFR secara gradual pada 2019 dapat berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan oleh swasta, terlebih untuk komponen investasi yang berasal dari impor, sehingga banyak pengusaha yang cenderung *wait and see*.

Sementara itu, ekspor luar negeri Jawa Tengah diperkirakan cenderung melambat pada awal tahun 2019. Berdasarkan hasil *liaison*, ekspor pada awal tahun biasanya belum terlalu banyak karena sedang memasuki *low season* di negara mitra dagang. Meski melambat, ekspor luar negeri diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan, didorong oleh optimisme menguatnya perekonomian di negara tujuan ekspor utama Jateng yaitu Amerika Serikat. Perekonomian AS berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jawa Tengah (pangsa ekspor 31,84%).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang lain yang cenderung melambat seperti Eropa dan Tiongkok, berpotensi menahan pertumbuhan volume ekspor. Lebih lanjut, terdapat beberapa risiko ketidakpastian global yang perlu diwaspadai, yaitu: risiko memburuknya hubungan dagang antarnegara yang berdampak pada rendahnya volume perdagangan dunia; risiko berlanjutnya kenaikan FFR secara gradual pada 2019; pergerakan harga minyak dunia; serta normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara. Risiko-risiko tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia.

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan I 2019, percepatan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan, sedangkan lapangan usaha perdagangan diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan triwulan IV 2018.

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan I 2019 diperkirakan kembali menunjukkan perbaikan dibanding triwulan IV 2018. Pelaku usaha diperkirakan akan mendorong kegiatan produksinya guna memenuhi permintaan domestik yang tetap kuat sejak awal tahun. Hal tersebut terkait dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II 2019. Selain itu, pertumbuhan lapangan usaha ini diperkirakan tetap kuat didorong oleh meningkatnya permintaan barang produksi terkait aktivitas jelang Pileg dan Pilpres 2019.

Peningkatan pasar domestik juga didukung oleh daya beli yang masih kuat, baik dari sisi penghasilan, serta keterjangkauan harga. Lebih lanjut, penyelesaian proyek jalan tol di beberapa ruas di Jawa Tengah akan meningkatkan konektivitas sehingga berdampak positif terhadap industri. Namun demikian, melemahnya permintaan ekspor pada awal tahun diperkirakan akan

sedikit menahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Risiko berlanjutnya kenaikan FFR pada 2019 dapat memberikan tekanan pada nilai tukar, sehingga berpotensi memberatkan industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi dan berorientasi pasar domestik.

Pertumbuhan lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami percepatan pada triwulan I 2019 dibanding triwulan sebelumnya. Fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat pada Oktober 2018-Februari 2019, yang ditandai dengan mundurnya periode musim hujan dari periode normalnya, menyebabkan mundurnya awal musim tanam (MT III 2018). Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap mundurnya musim panen menjadi berlangsung di akhir triwulan I 2019. Namun demikian, hasil panen pada periode tersebut berisiko tertahan karena terjadi penurunan produktivitas sebagai pengaruh musim kemarau panjang. Rendahnya pasokan pengairan pada MT III 2018 menyebabkan lahan persawahan yang semula produktif mengalami kekeringan ekstrim, sehingga berpotensi bera/tidak bisa ditanami.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan cenderung melambat pada triwulan I 2019. Berakhirnya periode libur Natal dan Tahun Baru, sesuai dengan siklus tahunan, diperkirakan menahan kinerja lapangan usaha perdagangan. Namun demikian, rangkaian proses pemilihan umum Legislatif dan Presiden yang diperkirakan mencapai puncak pada triwulan I 2019 berpotensi menahan perlambatan kinerja sektor ini tidak terlalu dalam.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, meskipun peningkatannya terbatas. Peningkatan pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, permintaan terhadap

hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri pengolahan. Perbaikan kinerja lapangan usaha dimaksud didukung oleh faktor perbaikan akses konektivitas antarwilayah serta terjaganya daya beli masyarakat. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 diperkirakan turut mendorong permintaan terhadap barang hasil industri, serta mendorong aktivitas perdagangan.

Selanjutnya, meskipun kinerja lapangan usaha pertanian di awal tahun sempat dipengaruhi oleh gangguan cuaca yang terjadi pada periode tanam sebelumnya, secara keseluruhan tahun 2019 kinerja lapangan usaha ini diproyeksikan lebih tinggi dibanding tahun 2018. Kondisi cuaca tahun 2019 diperkirakan masih relatif normal atau tidak terpengaruh anomali cuaca seperti halnya El Nino dan La Nina yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, sehingga dinilai lebih kondusif bagi lapangan usaha pertanian. Fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat yang terjadi pada Oktober 2018-Februari 2019 sempat berpengaruh terhadap mundurnya awal musim hujan dan musim tanam pada triwulan akhir 2018. Namun demikian, puncak musim hujan 2018/2019 di sebagian besar wilayah Jateng diperkirakan masih relatif normal, yaitu jatuh pada Januari 2019.

Turut menunjang perekonomian tumbuh lebih tinggi, komitmen pemerintah untuk pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan kinerja investasi dan industri. Pada sisi swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 antara lain tantangan berupa berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Perubahan kebijakan ekonomi AS dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional maupun Jawa Tengah, baik terkait pasar keuangan, nilai tukar, maupun perdagangan. Sebagai contoh, melemahnya nilai tukar rupiah akibat tekanan eksternal dapat berdampak pada kinerja industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Di sisi lain, depresiasi tersebut belum terlihat berdampak besar terhadap peningkatan kinerja ekspor, sehingga hal ini berpotensi semakin memperlebar defisit neraca perdagangan. Sampai dengan Oktober 2018, defisit neraca perdagangan Jawa Tengah mencapai USD6.913,55 juta atau meningkat hampir dua kali lipat dari defisit pada periode yang sama tahun 2017.

Selain itu, beberapa risiko lain yang perlu diwaspadai dapat menahan pertumbuhan ekonomi adalah: (i) risiko berlanjutnya kenaikan FFR secara gradual pada 2019; (ii) perekonomian global yang tumbuh melandai dan tidak seimbang; (iii) risiko memburuknya hubungan dagang antarnegara; serta (iv) pergerakan harga minyak dunia dan harga komoditas lainnya. Meningkatnya ketidakpastian global berpotensi mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional.

Lebih lanjut, tingginya persaingan di pasar global dengan negara yang memiliki produk ekspor serupa dengan produk unggulan Jawa Tengah juga perlu diwaspadai. Negosiasi perjanjian kerjasama perdagangan berpotensi tinggi seperti Indonesia *European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) perlu dipercepat penyelesaiannya guna meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dibanding negara kompetitor seperti Vietnam.

7.2. PROSPEK INFLASI TRIWULAN I 2019 DAN KESELURUHAN TAHUN 2019

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2019 diperkirakan mengalami penurunan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong penurunan laju inflasi terutama berasal dari kelompok Bahan Makanan serta kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

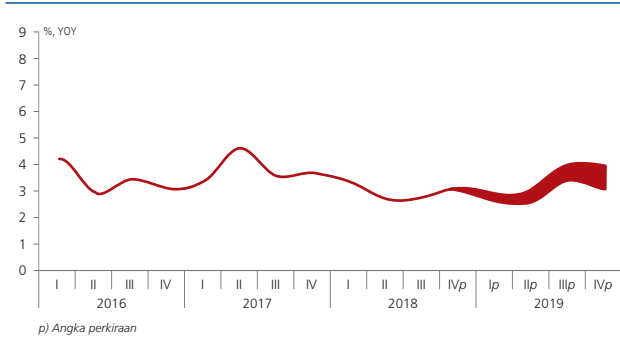
Inflasi kelompok bahan makan diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018. Sesuai dengan pola historisnya, konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan sebagai dampak normalisasi pasca hari raya keagamaan dan libur akhir tahun. Selanjutnya, tingkat pasokan produksi tanaman padi dan hortikultura diperkirakan akan meningkat, khususnya komoditas pangan padi dan bawang merah yang diperkirakan akan panen pada bulan Maret-April 2019. Faktor-faktor tersebut akan mendorong capaian inflasi bulanan kelompok bahan makanan untuk mengalami penurunan sepanjang bulan Februari-Maret 2018. Untuk memitigasi risiko gangguan produksi akibat gangguan cuaca di skala lokal dan regional, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil dan medium seperti infrastruktur embung, dan jaringan irigasi sekunder.

Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga diperkirakan akan melambat pada triwulan I 2019. Pola musiman yang mendorong penurunan permintaan mobilisasi masyarakat diperkirakan akan meredam tekanan inflasi kelompok ini. Kesiapan infrastruktur konektivitas antar daerah diharapkan akan mengurangi aspek spekulasi para pelaku usaha penyedia jasa transportasi. Selain itu, meredanya tren peningkatan harga minyak dunia pada bulan Juli 2018 juga diperkirakan akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2019. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah secara tidak langsung mengendalikan penetapan harga BBM nonsubsidi, namun dengan tetap mengacu pada perkembangan harga minyak dunia.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menunda penyesuaian tarif komoditas energi. Beberapa kebijakan penyesuaian tarif energi yang diperkirakan akan ditunda adalah kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kebijakan skema distribusi tertutup untuk bahan bakar gas bersubsidi. Dengan demikian, **inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan II 2019 diperkirakan akan relatif stabil dan terjaga rendah.**

Hal yang perlu diwaspadakan adalah risiko peningkatan laju inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok sandang. Hal tersebut terutama disebabkan oleh gangguan dari sisi eksternal khususnya pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah. Risiko pelemahan kurs mata uang Rupiah terutama disebabkan kebijakan peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dalam rangka normalisasi setelah indikasi makro ekonomi AS membaik serta risiko peningkatan intensitas perang dagang antara negara-negara di dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah akan berdampak pada akselerasi biaya bahan baku industri pengolahan di Jawa Tengah, khususnya industri tekstil serta industri makanan dan minuman.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2018

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu $3,5 \pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2018. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan *mobile app* Gen III untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kelembagaan petani dengan penyusunan skema *Rice Market Center* untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2019 pada level yang terkendali.

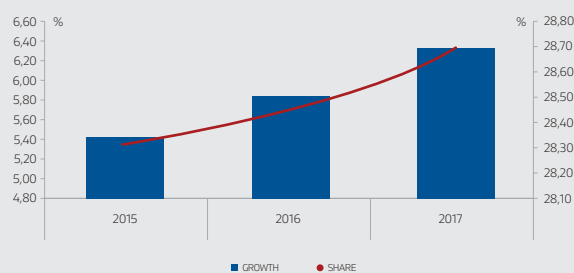
Gambaran dan Potensi Industri Otomotif di Wilayah Soloraya

SUPLEMEN III

Industri pengolahan memegang peranan penting pada perekonomian di wilayah Soloraya. Pada tahun 2015, industri pengolahan mencatatkan *share* sebesar 28,32% dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terus meningkat menjadi sebesar 28,69% pada tahun 2017. Sementara dari sisi pertumbuhannya, industri pengolahan juga tercatat mengalami peningkatan dari 5,44% (yoy) di tahun 2015 menjadi sebesar 6,35% (yoy) di tahun 2017 (grafik 1).²⁰

Salah satu segmen industri yang cukup potensial dan sedang berkembang di wilayah Soloraya adalah industri otomotif. Data Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Surakarta menunjukkan bahwa pendaftaran kendaraan baru cenderung meningkat setiap tahunnya (grafik 2).²¹ Hal ini menggambarkan kebutuhan masyarakat akan kendaraan baru terus tumbuh dan diperkirakan masih berlanjut ke depan.

Di wilayah Soloraya, terdapat beberapa pelaku usaha yang mendukung pengembangan industri otomotif, dari hulu (perakitan *spare part*) hingga hilir (perakitan angkutan pedesaan dan angkutan penumpang).

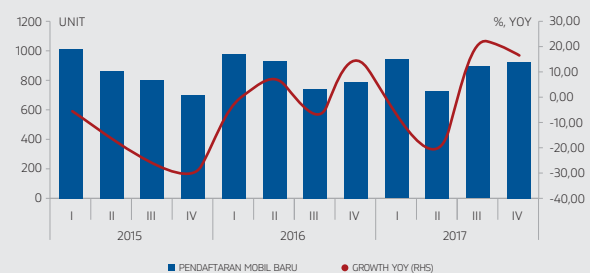


Gambar 1. Growth dan Share Industri Pengolahan pada PDRB Wilayah Soloraya

1. Industri Perakitan Spare Part

Menurut salah satu pelaku industri, produk *sparepart* buatan Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik daripada buatan Tiongkok, karena bahan baku yang digunakan merupakan aluminium, berbeda dengan produk buatan Tiongkok yang terbuat dari asbes. Namun demikian, mayoritas bahan baku industri ini, mencapai 85%, masih berasal dari impor, terutama bahan kimia dan karet. Sehingga, harga produk *sparepart* Indonesia cenderung lebih mahal, bahkan mencapai 40%, dibandingkan dengan produk impor. Tingginya ketergantungan pada impor juga berdampak pada meningkatnya risiko produksi *sparepart*, ketika bahan baku sulit didapat. Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di industri ini, antara lain:

- Industri *spareparts* dinilai belum menjadi prioritas pemerintah dan belum ada asosiasi yang menaungi industri dimaksud;
- Hingga saat ini, Badan Standarisasi Nasional belum memiliki alat ukur untuk proses sertifikasi perusahaan yang bergerak di



Gambar 2. Pertumbuhan Pendaftaran Kendaraan baru di Surakarta

20. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya, diolah.

21. Data dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Surakarta

SUPLEMEN III

industri spareparts, sehingga perusahaan belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI);

- Permintaan untuk jenis produk sparepart sangat beragam (mencapai 1.800 jenis), sementara skala produksi yang optimal pada masing-masing produk belum tercapai sehingga berdampak pada tingginya biaya produksi;
- Impor ilegal masih marak terjadi, sehingga produksi lokal kalah dari sisi harga, dan berpengaruh pada daya saing produk perusahaan;
- Pelonggaran kebijakan larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) barang impor berdampak pada menurunnya daya saing produk.

Ke depan, untuk mendorong perkembangan industri *spareparts*, dukungan Pemerintah utamanya diperlukan melalui: (i) pembentukan asosiasi industri *spare part*; (ii) peningkatan dukungan kebijakan pemerintah (antara lain terkait Lartas); (iii) penyediaan alat ukur untuk sertifikasi SNI; (iv) kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga kepastian dunia usaha lebih terjaga.

2. Industri Angkutan Pedesaan (Alat Mekanisasi Multiguna Pedesaan)

Alat Mekanisasi Multiguna Pedesaan (AMMDES) merupakan alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa (termasuk pertanian) yang bisa dikombinasikan dengan peralatan

pertanian, seperti penggilingan padi, pemutih beras, pompa air dan genset. Pembuatan AMMDES telah menggunakan teknologi yang cukup mumpuni, antara lain: (a) mesin *diesel* 650 cc sehingga biaya pengoperasiannya lebih murah dan hemat; (b) 4 *disc brake* untuk memastikan keamanan dalam berkendara; (c) *Different Locking System* yang membuat AMMDES menjadi handal dalam area berlumpur; (d) *diesel engine* sehingga lebih bertenaga. Selain itu, *spare part* dan *service* AMMDES relatif lebih mudah didapatkan. Delapan puluh persen bahan baku diperoleh dari dalam negeri, sementara 20% lainnya diimpor dari Jepang dan Tiongkok.

Salah satu pelaku usaha di industri ini telah berhasil memproduksi AMMDES, dan produksinya akan terus ditingkatkan mulai awal Januari 2019 dengan target produksi sebanyak 15.000 unit. AMMDES tersebut nantinya akan dijual ke pemerintah, masyarakat pedesaan, serta memenuhi permintaan dari Bangladesh. Dalam *roadmap* pengembangan ke depan, pelaku usaha merencanakan pengembangan produk motor listrik dan kendaraan SUV.

3. Industri Angkutan Penumpang (Mobil Esemka)

Inisiatif pengembangan mobil Esemka berasal dari cita-cita pelaku usaha untuk membuat mobil nasional. Pelaku usaha telah melakukan kerjasama alih teknologi dengan perusahaan swasta di

SUPLEMEN III

Tiongkok untuk percepatan proses produksi dan teknologi, serta saat ini telah mendapatkan TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) dan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dari Kementerian Perhubungan dan telah memproduksi salah satu jenis mobil, yaitu *pickup*.

Sejalan dengan semangat nasionalisme, mayoritas tenaga kerja yang digunakan juga tenaga lokal (SMK) dan saat ini perusahaan sedang melakukan perekrutan tenaga kerja seiring dengan akan dimulainya kegiatan produksi massal.

Dukungan Pemerintah mutlak diperlukan untuk mendukung perkembangan industri otomotif baik di daerah maupun nasional. **Dari sisi tenaga kerja**, pemerintah perlu menyediakan lembaga formal maupun informal untuk mendukung pengembangan industri otomotif. Kemudian **dari sisi infrastruktur** dan fasilitas, baik infrastruktur jalan, jaringan komunikasi dan lainnya perlu diperbaiki untuk menunjang kelancaran distribusi dan efisiensi biaya bagi pelaku usaha, termasuk penyediaan alat ukur untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh sertifikasi SNI.

Komponen penting lainnya bagi pelaku usaha adalah kemudahan **akses bahan baku produksi**. Untuk mendukung pelaku usaha, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mempermudah akses impor bahan baku bagi pelaku usaha, memberikan insentif untuk penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan akses terhadap bahan baku lokal. Pemerintah juga perlu **mendukung peningkatan SDM lokal**, yaitu dengan menyediakan pelatihan manajemen bisnis, kerjasama dengan perusahaan asing dan teknik produksi agar proses produksi menjadi lebih efisien.

Saat ini Pemerintah memang sedang mendorong industri otomotif lokal agar mampu menyediakan mobil nasional yang menjadi cita-cita bangsa sejak lama. Diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah konsisten dan berkelanjutan, tidak bergantung pada periode kepemimpinan. Selain itu kebijakan yang bersifat pemberian insentif terhadap pelaku usaha lokal juga diperlukan untuk mendorong semangat nasionalisme. Sehingga nantinya para pelaku usaha dan calon investor

Gambar 1. Pabrik dan Mobil Esemka



SUPLEMEN III

memiliki kepercayaan positif terhadap pemerintah dan kepastian akan keberlangsungan usaha di bidang otomotif.